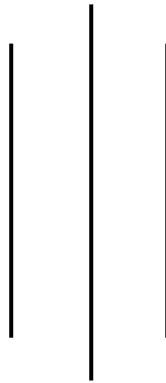


SISTEM SOSIAL INDONESIA

DISUSUN



OLEH



NUR IZA DORA, M.Hum

TADRIS PENDIDIKAN IPS

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TAHUN AKADEMIK GENAP 2019/2020

Halaman deskripsi

Mata kuliah ini menggambarkan tentang pengertian sistem sosial, masyarakat sebagai sistem sosial dan pengertian masyarakat sebagai sistem sosial itu sendiri.

Masyarakat dalam perspektif organisasi sosial menurut para ahli berdasarkan dan karyanya.

Selanjutnya integrasi sosial dalam masyarakat menurut perspektif ahli dan sistem sosial menurut pendekatan struktural fungsional dan pendekatan konflik

DAFTAR ISI

BAB I SISTEM SOSIAL	1
A. Pengertian Sistem	1
B. Sistem Sosial	3
BAB II MASYARAKAT SEBAGAI SISTEM SOSIAL	7
A. Pengertian Masyarakat	7
B. Masyarakat sebagai Sistem Sosial	9
BAB III MASYARAKAT DALAM	18
PERSPEKTIF ORGANISASI SOSIAL	
A. Masyarakat dalam Perspektif Organisasi Sosial	18
menurut August Comte	18
1. Biografi dan karyanya	18
2. Asumsi-asumsi Comte	20
3. Masyarakat sebagai organisasi sosial	21
B. Masyarakat dalam Perspektif Organisasi Sosial menurut	
August Comte	26
1. Biografi dan karyanya	26
2. Asumsi-Asumsi Spencer	28
3. Masyarakat sebagai organisasi sosial	29
4. Evolusi sosial	31
5. Tipe masyarakat	33
BAB IV INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT	
MENURUT PERSPEKTIF EMILE DURKHEIM	36
A. Biografi dan Karyanya	36
B. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Menurut Emile Durkheim	37
1. Asumsi-asumsi Emile Durkheim	37
2. Beberapa pandangan Emile Durkheim	40
a. Sosiologi dalam Perspektif Durkheim	40
b. Solidaritas sosial	43

BAB V INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARKAT MENURUT

PERSPEKTIF TALCOT PARSON47

A. Biografi dan karyanya	47
B. Integrasi Sosial dalam Masyarakat menurut Talcott Parson	48
1. Asumsi-asumsi	48
2. Teori AGIL	50
3. Sistem tindakan	51
4. Sistem sosial	53
5. Aktor dan sistem sosial	54
6. Masyarakat	56
7. Sistem kultural	57
8. Sistem kepribadian	58

BAB VI SISTEM SOSIAL MENURUT PENDEKATAN

STRUKTURAL FUNGSIONALISME59

A. Karakteristik Perspektif struktural fungsional	61
B. Pandangan Ahli tentang Struktural Fungsionalisme	67
1. Ralf Dahrendorf	67
2. Robert K. Merton	67
C. Kelemahan Teori Struktural Fungsionalisme	70

BAB VII SISTEM SOSIAL MENURUT PENDEKATAN KONFLIK .74

A. Beberapa Preposisi teori Konflik	75
B. Teori-teori Konflik menurut Pendapat Ahli	80
1. Teori konflik Marx	80
2. Teori konflik Ralf Dahrendorf	82
3. Teori konflik Jonathan Turner	85
4. Teori konflik Lewis Coser	87

BAB VIII MASYARAKAT INDONESIA SEBAGAI

MASYARAKAT MAJEMUK92

A. Gambaran Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk pada Masa Hindia-Belanda Menurut Furnivall	92
B. Pengertian masyarakat majemuk	95

C. Sebab-sebab Terjadinya Masyarakat Majemuk di Indonesia	97
---	----

BAB IX INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT

MAJEMUK	109
A. Pengertian Integrasi Sosial	109
B. Faktor-faktor Pendorong terjadinya Integrasi Sosial	109
C. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk	110

BAB X SISTEM SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

A. Pengertian Kebudayaan	114
A. Empat Wujud Kebudayaan	114
B. Tujuh Unsur Kebudayaan	115
C. Hubungan antara Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	116

BAB XI SISTEM SOSIAL DAN INDUSTRIALISASI

DI INDONESIA	119
A. Pengertian Industri	119
B. Sejarah Pertumbuhan Industri	120
1. Revolusi Industri di Eropa	120
2. Pertumbuhan Industri di Indonesia	127

BAB XII SISTEM SOSIAL DAN PENDIDIKAN

A. Pendidikan	133
1. Pengertian Pendidikan	133
2. Komponen	133
3. Fungsi Pendidikan	134
4. Tujuan Pendidikan	134
B. Pendidikan bagian dari Sistem Sosial	137

BAB XIII SISTEM SOSIAL DAN POLITIK

A. Pengertian Politik	142
B. Demokrasi sebagai Bagian dari Sistem Sosial Masyarakat	142
C. Demokrasi di Berbagai Negara	146

BAB I

SISTEM SOSIAL

A. Pengertian Sistem

Menurut Abidin dan Saebani (2014: 13), secara linguistik sistem berasal dari bahasa Latin, *systema* dan bahasa Yunani *sustema* artinya kesatuan yang terdiri atas komponen yang saling berhubungan secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu serta memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Dalam bahasa Yunani, kata sistem berasal dari kata *sustema* yang berarti keseluruhan yang terdiri atas banyak bagian dan hubungan erat yang teratur antar berbagai komponen. Beberapa ahli mengemukakan definisi sistem sosial sebagai berikut:

1. Menurut Campbell, sistem ialah himpunan komponen atau bagian yang saling berhubungan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.
2. Awad mengatakan bahwa sistem ialah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan saling berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Menurut Konontz dan O. Donnell sistem bukan wujud fisik melainkan ilmu pengetahuan yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin dan sejenisnya.
4. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur komponen atau bagian di dalamnya memiliki keterikatan fungsional dan kohesif sehingga ketotalitas unit terjaga utuh eksistensinya.
5. Sistem ialah cara yang mekanismenya berpola, konsisten, dan bersifat otomatis.
6. Sistem merupakan kesatuan interaktif antarsub sistem yang saling berhubungan, berada dalam struktur tertentu, dan memiliki motif untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, misalnya sistem organisasi yang terdiri atas pengurus dengan tugas dan kewajibannya yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu dan lainnya.

Menurut Abidin dan Saebani (2014: 14-15), setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen, yaitu:

1. Objek yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variabel dapat bersifat benda konkret serta bagian abstrak.
2. Atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
3. Hubungan internal sebagai relasi yang dapat dipisahkan
4. Lingkungan, tempat sistem berada.

Beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem ialah:

1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan yang menjadi motivator yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali, meskipun setiap sub sistem memiliki tujuan yang berbeda secara spesifik.

2. Input

Input sistem ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem, yang menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa materi yang tampak secara fisik dan *immaterial*.

3. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari input menjadi output yang berguna dan bernilai, misalnya input mengenai informasi daya beli masyarakat yang berkaitan dengan produk yang dibutuhkan.

4. Output

Output atau keluaran merupakan hasil dari proses, misalnya input ialah seleksi penerimaan mahasiswa baru, sedangkan outputnya ialah alumni yang telah bekerja di berbagai instansi.

5. Batas

Batas sistem ialah pemisah antara daerah sistem dengan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau

kemampuan sistem, misalnya pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran tergantung pada sumber daya dosen sebagai tenaga pendidik.

6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik

Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan masukan dan proses. Pengendalian bertujuan untuk mengatur agar sistem mencapai target yang telah ditentukan.

7. Lingkungan

Lingkungan ialah sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan dapat mempengaruhi operasi sistem yang dapat merugikan atau menguntungkan sistem tertentu. Lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan lingkungan yang menguntungkan harus dipertahankan dan ditingkatkan karena akan mengacu kelangsungan hidup sistem.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem terdiri atas berbagai subsistem atau komponen yang integral dan interaktif dengan fungsi, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang beragam, tetapi secara sinergis bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Sistem Sosial

Sebelum menjelaskan lebih mendalam mengenai sistem sosial, lebih baik dipahami lebih dahulu pengertian sosial yang merupakan lawan dari kata individual. Apabila individual diartikan sebagai sendiri atau hidup sendiri, kata sosial berarti bersama atau hidup bersama. Dalam bahasa Inggris, kata sosial berasal dari kata *social* yang sering disebut sebagai *society* yaitu masyarakat atau *peoples*. Dengan demikian, maksud sosial ialah masyarakat atau sekelompok orang yang hidup bersama, saling menjalin komunikasi dan berinteraksi.

Mempelajari sistem sosial berarti memahami dan menyadari kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Manusia ialah makhluk sosial, oleh sebab itu manusia harus peka terhadap permasalahan sosial serta menyadari bahwa setiap masalah sosial yang

timbul dalam masyarakat bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan sosiologis dalam menyelesaikannya.

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 31-32), dalam pandangan ilmu-ilmu sosial, sistem sosial diartikan sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan antar elemen-elemen tersebut selanjutnya menghasilkan produk-produk interaksi itu sendiri, yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang keadannya selalu dinamis.

Menurut Sulaeman (1995: 16), teori sistem sosial pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiologi Amerika bernama Talcott Parsons. Konsep sistem sosial merupakan alat analisis realitas sosial sehingga sistem sosial menjadi suatu model analisis terhadap organisasi sosial. Sistem sosial ialah alat pembantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia yang bertitik tolak dari pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu sistem. Tiap-tiap sistem sosial terdiri atas pola-pola perilaku tertentu yang mempunyai struktur dalam dua arti, yaitu:

1. Relasi-relasi sendiri antara orang-orang yang bersifat agak mantap dan tidak cepat berubah.
2. Perilaku-perilaku mempunyai corak atau bentuk yang relatif mantap.

Sistem sosial merupakan sinergi antar berbagai sub sistem dalam kehidupan masyarakat yang saling bergantung dan saling berkaitan. Sistem sosial bersifat abstrak sehingga komponennya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dibayangkan dengan konstruksi berpikir.

Menurut Wirawan (2012: 54-56), sistem sosial adalah suatu sistem tindakan yang terbentuk dari sistem sosial berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dengan secara tidak kebetulan, tetapi tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum atau norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya komitmen terhadap norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat dengan menemukan

keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Ekuilibrium terpeliharanya oleh berbagai proses dan mekanisme sosial, di antaranya mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial.

Ciri-ciri sistem sosial antara lain:

1. Tiap bagian dari sistem saling bergantung satu sama lain dan memberikan konsekuensi secara bervariasi.
2. Hubungan antar bagian merupakan hubungan saling ketergantungan hingga membentuk keteraturan.
3. Keseimbangan tidak terbatas meskipun terjadi keanekaragaman.

Kondisi minimal yang diperlukan dalam sebuah sistem sosial antara lain:

1. Orientasi pelaku terhadap situasi dilatarbelakangi oleh motivasi mewujudkan ekuilibrium
2. Harapan timbal balik yang ajek di antara pelaku
3. Membagi dan sama-sama merasakan makna tentang apa yang sedang terjadi

Tidak jauh berbeda, Ritzer juga mengungkapkan tujuh ciri sistem yaitu:

1. Sistem mempunyai *property of order*, dan bagian-bagian saling bergantung
2. Sistem cenderung mengarah *self maintaining order* atau keseimbangan
3. Sistem menjadi statis
4. Ciri satu bagian sistem mempunyai dampak pada bagian-bagian lainnya
5. Alokasi dan integrasi dua proses fundamental ialah *given state* dari sistem keseimbangan
6. Sistem cenderung memelihara diri dan cenderung mengubah sistem dari dalam

Sesuai dengan uraian di atas, ada seperangkat asumsi untuk mengatur suatu sistem sosial, yaitu:

1. Sistem mempunyai properti aturan dan saling ketergantungan antara bagian-bagian
2. Sistem cenderung ke arah bagian tata tertib pemeliharaan diri atau keseimbangan
3. Sistem mungkin statis

4. Sifat dari satu bagian sistem mempunyai impak pada bagian lainnya
5. Sistem-sistem memelihara batasan-batasan dengan lingkungannya
6. Alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental
7. Sistem cenderung pemeliharaan diri meliputi pemeliharaan batasan-batasan dan hubungan bagian-bagian keseluruhan, pengawasan variasi-variasi lingkungan dan pengawasan tersebut untuk membuat analisis aturan struktur dan sistem

Prasyarat fungsional sistem sosial yaitu:

1. Sistem sosial mesti disusun dan dioperasikan dengan tepat dengan sistem-sistem lainnya
2. Agar tetap hidup, sistem sosial mesti mempunyai dukungan dari sistem-sistem lainnya
3. Sistem mesti menemui proposisi yang signifikan dalam kebutuhan aktor-aktornya
4. Sistem membutuhkan partisipasi anggota-anggotanya
5. Pada hakikatnya mempunyai kontrol minimum secara potensial terhadap gangguan tingkah laku
6. Konflik yang mengganggu mesti dikontrol

BAB II

MASYARAKAT SEBAGAI SISTEM SOSIAL

A. Pengertian Masyarakat

Menurut Supardan (2011: 136), masyarakat ialah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan dan karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, hidup bermasyarakat merupakan bagian integral karakteristik dalam kehidupan manusia.

Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika manusia tidak bermasyarakat. Sebab manusia tidak dapat hidup dalam keterpencilan sama sekali selama-lamanya, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup sebagai manusia. Sebuah masyarakat pada dasarnya ialah sebetuk tatanan yang mencakup pola-pola interaksi antar manusia yang berulang secara ajeg pula. Tatanan ini bukan berarti tanpa konflik ataupun tanpa kekerasan, semuanya serba mungkin serta kadarnya jelas bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 35-38), tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat manusia dalam sebuah kelompok yang dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu. Akibatnya persepsi para pakar tentang masyarakat juga berbeda satu dan yang lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat dari pakar sosiologi.

1. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
2. Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antar kelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya.
3. M. J. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu

4. J.L. Gillin dan J.P. Gillin memberikan batasan masyarakat sebagai kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.
5. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
6. Selo Soemartjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
7. Poul. B. Harton mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Di lain pihak ia mengatakan masyarakat ialah organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Terlepas dari pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, secara substansial terdapat titik temu yaitu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen:

1. Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya baik antar individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan yaitu kebudayaan.
2. Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar (makro) antarkelompok.
3. Menempati kawasan tertentu dan hidup di dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antargenerasi.

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat ialah:

1. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu
2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat

dari kehidupan bersama tersebut timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.

3. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
4. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dan lainnya

Dari beberapa pendapat tentang masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan.

Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terdapat gejala tarik menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Untuk itulah akhirnya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik menarik dengan kekuatan alam tersebut.

Berdasarkan gejala tersebut, maka manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat di dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan.

Hubungan antara manusia satu dengan lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku sehari-hari.

B. Masyarakat sebagai Sistem Sosial

Kehidupan masyarakat harus dipandang sebagai sistem sosial yaitu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Yang dimaksud dengan bagian atau unsur-unsur itu ialah bagian-bagian atau unsur-unsur dari kehidupan sosial atau atau disebut juga unsur-unsur sosial. Menurut Margono Slamet dalam Ranjabar (2006: 12), masyarakat sebagai suatu sistem sosial dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Ekologi, tempat, dan geografi dimana masyarakat itu berada.
2. Demografi yaitu yang menyangkut populasi, susunan, dan ciri-cirinya.
3. Kebudayaan yaitu menyangkut nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan, norma-norma dalam masyarakat.
4. Kepribadian yang meliputi sikap mental, semangat, temperamen, dan ciri-ciri psikologis masyarakat.
5. Waktu, sejarah dan latar belakang masa lampau dari masyarakat tersebut.

Sistem sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila sistem sosial itu dipengaruhi oleh lingkungan maka berarti sistem sosial yang terbuka yaitu menerima unsur-unsur dari luar. Sistem sosial yang terbuka di masyarakat juga akan menimbulkan jalinan ikatan unsur-unsur dengan unsur lainnya (jalinan internal) dan saling pertukaran antara sistem sosial itu sendiri dengan lingkungannya (jalinan eksternal).

Terdapatnya jalinan sistem juga menjadi pertanda adanya batasan antara sistem sosial tersebut dengan lingkungannya. Sebagai konsekuensi dari sistem sosial yang bersifat terbuka yang mengalami pertukaran dengan lingkungannya dapat menimbulkan perubahan pada sistem sosial itu. Perubahan yang diakui sebagai unsur yang dinamis itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kegoncangan dalam sistem sosial itu. Hal ini dapat dilakukan karena, sebagaimana sistem lainnya, sistem sosial memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan kata lain, suatu perubahan diterima dengan tetap menjaga stabilitas dan keteraturan dalam sistem (walaupun mungkin keteraturan itu hasil dari konflik).

Menurut Alvin L. Bertrand dalam Ranjabar (2006: 13), menyatakan bahwa proses-proses dalam sistem sosial tidak saja terjadi atas dua hal yaitu

jalinan internal dan jalinan eksternal, tetapi masyarakat sebagai sistem sosial juga terjadi beberapa proses, yaitu:

1. Komunikasi

Tidak ada suatu proses yang melebihi pentingnya komunikasi di dalam suatu sistem sosial. Tanpa komunikasi, para pelaku tidak akan dapat menyampaikan informasi, mengutarakan sikap, perasaan atau kebutuhan mereka. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan pula bahwa tanpa komunikasi organisasi sosial tidak akan muncul.

2. Memelihara tapal batas

Semua sistem sosial memiliki cara-cara tertentu untuk melindungi atau mempertahankan identitasnya. Dengan kata lain untuk melindungi tapal batas dirinya dengan pihak luar. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mendirikan tembok, membatasi penggunaan sarana hanya untuk warganya sendiri, mengadakan upacara-upacara suci atau dengan jalan mengharuskan anggota untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu.

Semakin kuat ikatan suatu sistem, semakin tinggi kesetiakawanan yang ditunjukkan oleh para anggotanya di dalam memisahkan diri dengan pihak luar. Dalam masa-masa kritis seperti peperangan, sering kali mendorong mereka untuk menjaga tapal batas lebih ketat, sebab mereka merasakan adanya maksud jahat yang datang dari anggota-anggota kelompok musuh.

3. Penjalinan sistem

Suatu proses menjalin ikatan antara suatu sistem dengan sistem lainnya dinamakan penjalinan sistem. Cara terbaik untuk melihat jalinan tersebut ialah dengan melihat keeratan antara mereka, baik individu maupun di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan. Loomis menyatakan bahwa penjalinan sistem merupakan suatu proses dimana suatu unsur atau lebih dari minimal dua atau lebih sistem sosial tampak sedemikian rupa sehingga kedua sistem itu dalam beberapa hal dan peristiwa tertentu dapat dipandang sebagai suatu kesatuan tunggal. Sub-sub sistem membentuk sistem yang lebih besar melalui penjalinan sistem. Sistem-sistem sekolah lokal yang

tersebar banyak itu misalnya, lalu diadakan jalinan hubungan sedemikian rupa hingga membentuk sistem pendidikan regional dan nasional.

4. Sosialisasi

Sejauh menyangkut pengertian sosiologi, sosialisasi termasuk proses dasar di dalam sistem sosial. Secara singkat, sosialisasi dapat dikatakan sebagai proses penyebaran warisan-warisan sosial dan budaya oleh seseorang dari masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang menjadi yang lebih berfungsi di dalam kelompoknya seseorang diubah dari suatu organisme menjadi seorang manusia yang berkepribadian. Kepribadian yaitu di dapat melalui interaksi, interaksi tersebut termasuk di dalam proses sosialisasi. Sosialisasi sebagai suatu proses utama, merangkum semua unsur dan suatu sistem baik kecil maupun besar.

5. Pengawasan sosial

Istilah pengawasan sosial mengandung arti sebagai suatu proses pembatasan atau pengekangan tingkah laku. Di dalam sistem-sistem sosial, pengawasan merupakan proses pembetulan atau pembolean di dalam batas-batas tertentu yang bisa diterima terhadap penyimpangan-penyimpangan (tanpa memandang apapun alasannya). Unsur-unsur yang erat hubungannya, dengan pengawasan sosial ialah norma-norma, kekuasaan dan sanksi-sanksi.

Berbagai macam mekanisme digunakan untuk menjaga anggota suatu sistem sosial supaya bertingkah laku sesuai dengan semestinya. Mekanisme-mekanisme itu meliputi cara-cara yang informal, seperti pencemoohan, pengasingan dari pergaulan, atau desas-desuskan. Juga melalui cara-cara formal yang ada sangkut pautnya dengan hukum dan peraturan tata tertib.

6. Pelembagaan

Pelembagaan merupakan proses pengesahan suatu pola tingkah laku tertentu menjadi hukum, yaitu diakui sebagai benar dan tepat. Di dalam suatu masyarakat tertentu, hal ini mungkin berlangsung secara berangsur-angsur melalui proses evolusi atau juga biasa berlangsung cepat melalui keputusan yang didukung oleh suara terbanyak. Keluarga dan sekolah merupakan lembaga-lembaga sosial, sebab pada keduanya memiliki ciri-ciri

tertentu. Ciri yang dimaksud yaitu terdapat hubungan yang diformalisasi dimana penyimpangan-penyimpangan daripadanya sampai pada titik tertentu tidak dapat ditoleransi.

7. Perubahan sosial

Perubahan sosial sebagai suatu perubahan di dalam pola interaksi sosial yang berlaku. Penggunaan definisi semacam ini memungkinkan untuk meninjau proses perubahan tanpa dibebani. Istilah-istilah yang mengandung nilai-nilai, seperti kemajuan atau kemunduran. Sebagai suatu proses utama dari sistem perubahan selalu menimbulkan unsur tekanan ketegangan dan hal itu kait mengait dengan unsur-unsur lain, misalnya kekuasaan dan saksi.

Kepecahan sebagai suatu proses elemental sesungguhnya berlangsung secara terus-menerus. Oleh sebab itu, reorganisasi secara terus-menerus merupakan sifat utama perubahan sebagai suatu proses. Sehubungan dengan itu, suatu gambaran keadaan yang terorganisasi atau utuh dari suatu masyarakat sesungguhnya hanyalah lukisan abstrak sebab sistem sosial bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan secara terus menerus.

Selanjutnya, kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dilihat oleh Talcott Parsons, merupakan komponen dari sistem bertindak yang lebih umum. Konsepsi mengenai sistem bertindak ini dapat ditelaah, pada kenyataannya bahwa setiap manusia mempunyai apa yang dinamakan perilaku yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dari fungsi kognitif dari manusia. Salah satu dari unsur perilaku ialah: gerak sosial (*social action*); yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu
4. Didorong oleh motivasi-motivasi tertentu

Setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup sub sistem, yakni:

1. Subsistem budaya

Sub sistem budaya merupakan susunan daripada unsur-unsur yang berisikan dasar-dasar hakiki dari masyarakat yaitu nilai-nilai

2. Subsistem sosial

Subsistem sosial merupakan pedoman bagaimana manusia sepantasnya bertingkah laku atas dasar nilai

3. Subsistem kepribadian

Berisikan sikap atau kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap manusia atau benda-benda tertentu.

4. Subsistem organisme perilaku

Subsistem organisme perilaku merupakan perilaku nyata dari manusia.

Sub sub sistem tersebut itu pada hakikatnya ialah tindakan atau gerak manusia yang merupakan suatu hierarki pengaturan. Artinya setiap sub sistem yang berada di atasnya merupakan pengawas atau pengatur bagi sub sistem yang berada di bawahnya, kecuali daripada itu, maka gerak manusia dibatasi oleh lingkungan dalam alam fisis dan organis (yang sifatnya fisik) serta lingkungan realitas yang ideal.

Menurut Parsons masing-masing dari keempat sub sistem bertindak tersebut di atas memenuhi salah satu dari kebutuhan fungsional. Dengan pernyataan ini dimaksudkan adalah bahwa masing-masing sub sistem dari sistem bertindak (budaya), sosial, kepribadian, dan organisme perilaku sebagai imperatif fungsional liga. Hal ini berlaku pula bagi sistem sosial sebagaimana dengan sistem lainnya. Dari deskripsi tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara fungsional, setiap sistem sosial akan dapat dianalisis sebagai: sistem gerak sosial, yang masing-masing sub sistem mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Sub sistem budaya atau fungsi mempertahankan pola termasuk ke dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem budaya atau kultur sebagai sub sistem dari sistem gerak sosial. Suatu sub sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor-faktor dasar falsafah hidupnya. Falsafah hidup tersebut kemudian terwujud dalam sistem nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
2. Fungsi integrasi mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi atau hubungan serasi antar bagian suatu sistem, agar bagian-bagian tadi berfungsi sebagai keseluruhan atau kesatuan. Hal ini

mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seorang dalam masyarakat, dan susunan normatif.

3. Fungsi mencapai tujuan termasuk di dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan kepribadian warga masyarakat tersebut, atas dasar faktor sebagai berikut:
 - a. Masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang dapat mendorong warga agar dapat menjunjung nilai dan kaidah-kaidah. Hal ini terwujud dalam proses sosialisasi dan sistem pengendalian sosial.
 - b. Masyarakat perlu mengorganisasikan warganya untuk mencapai tujuan bersama yang biasanya dianggap sebagai aspek politik dan masyarakat.
4. Adaptation (A) atau fungsi adaptasi termasuk di dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan organisasi perilaku warganya. Hal ini mencakup pengarahan dan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dengan keadaan sekelilingnya yang mencakup ekonomi dan teknologi.

Dalam sistem sosial menurut Parsons, *laten patern maintenance* diselesaikan melalui *fiduciary* subsistem; suatu sistem yang erat kaitannya dengan sistem kultur atau budaya. Kebudayaan integrasi dipenuhi melalui komunitas sosial, adaptasi melalui sistem ekonomi dan *goal attainment* melalui sistem politik.

Dalam pada itu, sistem sosial atau sistem kemasyarakatan mencakup berbagai bidang kehidupan manusia yang merupakan sub sistem karena menjadi bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh. Biasanya sub sistem tersebut adalah:

1. Subsistem politik,
2. Subsistem ekonomi,
3. Subsistem sosial,
4. Subsistem budaya
5. Subsistem pertahanan keamanan,
6. Subsistem hukum.

Masing-masing subsistem saling berkaitan secara fungsional karena menjadi wadah dan proses yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Subsistem sosial budaya merupakan struktur dan proses dalam suatu wadah tertentu dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai unsur pokok sebagai berikut:

1. Kepercayaan yang merupakan pemahaman dari semua aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran atau mutlak.
2. Perasaan dan pikiran yakni suatu keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial.
3. Tujuan yang merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai dengan cara mengubah sesuatu atau mempertahankannya.
4. Kaidah atau norma yang merupakan pedoman untuk berperilaku pantas.
5. Kedudukan dan peranan; Kedudukan atau status merupakan posisi-posisi tertentu secara vertikal, sedangkan peran atau *role* adalah hak-hak dan kewajiban, baik secara struktural maupun prosesual.
6. Pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat menaati norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.
7. Sanksi, yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakan dinamakan sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan hukuman dalam arti yang luas.
8. Fasilitas, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu.
9. Kelestarian dan kelangsungan hidup
10. Keresasian antara kualitas kehidupan dengan kualitas lingkungan.

Secara makro, unsur-unsur pokok itu juga akan dapat ditemui pada bentuk-bentuk atau wadah kehidupan lainnya, misalnya di dalam suatu keluarga batih yang merupakan subsistem sosial budaya. Penjabarannya ialah:

1. Adanya suatu kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga batih merupakan kodrat alamiah.
2. Adanya perasaan dan pikiran tertentu dari seorang anggota keluarga batih terhadap anggota lainnya yang mungkin terwujud dalam rasa saling menghargai, bersaing, dan seterusnya.
3. Tujuan adanya keluarga batih ialah antara lain agar manusia mengalami sosialisasi dan mendapat jaminan akan ketenteraman hidupnya.
4. Setiap keluarga batih mempunyai norma-norma yang mengatur hubungan antara suami dengan istri, anak-anak dengan ayah-ibunya, dan seterusnya.
5. Setiap anggota keluarga batih mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing, baik secara internal maupun eksternal.
6. Di dalam setiap keluarga batih lazimnya terdapat proses pengawasan tertentu yang semula datang dari orang tua yang dipengaruhi oleh pola pengawasan yang ada di dalam masyarakat.
7. Sanksi-sanksi tertentu juga dikembangkan di dalam keluarga batih yang diterapkan kepada mereka yang berbuat benar atau salah.
8. Sarana-sarana tertentu juga ada pada setiap keluarga batih umpamanya, sarana untuk mengadakan pengawasan, sosialisasi, dan seterusnya.
9. Setiap keluarga batih memiliki konsep kelestarian dan kelangsungan hidup. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup.
10. Kelestarian merupakan aspek stabilitas kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika.
11. Keserasian antara kuantitas dengan kualitas hidup juga ada pada keluarga batih, oleh karena kuantitas merupakan pencerminan nilai kebendaan (materialisme), sedangkan kualitas merupakan pencerminan nilai keakhlakan atau spritualisme.

BAB III

MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI SOSIAL

C. Masyarakat dalam Perspektif Organisasi Sosial menurut Auguste Comte

4. Biografi dan karyanya

Upe (2010: 70-72), Isidore Marie Auguste Francois Comte adalah sosiologi yang lahir di Montpellier, Perancis, 19 Januari 1798. Sosiolog kawakan ini sangat populer dengan nama Auguste Comte. Dirinya dilahirkan dari keluarga seorang bangsawan berdarah Katolik, tetapi sejak saat muda dia telah menamakan dirinya sebagai seorang ateis. Comte pernah mengenyam pendidikan lokal di Montpellier, sekolah dimana dia mendalami Matematika. Kemudian dia Hijrah ke Paris, dan menempuh pendidikan di Ecole Polytechnique. Di sana ia terdidik dalam lingkungan psikologi dan kedokteran.

Auguste Comte tergolong cepat menjadi mahasiswa namun ia tidak berhasil meraih ijazah di perguruan tinggi. Karena Comte merupakan salah satu mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, dalam setiap kelasnya, Comte bersama dengan seluruh temannya dikeluarkan karena gagasan politik dan pemberontakan yang mereka lakukan.

Ia juga dikenal dengan mahasiswa yang berpikiran bebas dan memiliki semangat untuk tidak berada di bawah posisi orang lain. Selama menjadi mahasiswa, Comte mengalami pergolakan sosial, politik, dan intelektual yang cukup hebat. Comte hidup pada masa revolusi Perancis rezim Napoleon, pergantian monarki, dan periode republik. Serentetan kondisi sosial itulah yang ikut melatarbelakangi perkembangan pemikiran Comte pada saat itu.

Meski pada masa itu terjadi pergolakan sosial politik yang sangat hebat, tetapi tidak membuat dirinya menjadi mati suri. Ia dikenal sebagai seseorang yang sangat brilian, pekerja keras dan seorang penulis yang

produktif. Karir profesionalnya dimulai dengan memberi les dalam bidang matematika.

Kalau kita lihat profesinya sebagai seorang guru les matematika, maka mengapa ia justru mengkaji sosial? Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan tidak terlepas dengan pertemuannya dengan Saint Simon. Pada 1817 ia menjadi sekretaris sekaligus anak angkat Simon, filsuf yang 40 tahun lebih tua. Laksana sebagai keluarga, mereka bekerja sama secara akrab, selama bertahun-tahun, Comte pun merasa berutang budi kepada Saint Simon. Di sinilah ia melanjutkan karirnya sebagai pengajar filsafat positivistik dan mendirikan masyarakat positivistik.

Tidak ada gading yang tak retak, mungkin pepatah ini tepat diajukan pada hubungan mereka. Keakraban mereka tidak berjalan selamanya. Tahun 1824 keduanya bersengketa, karena Comte yakin Simon menghapus namanya dari salah satu karya sumbangannya. Atas kejadian itu, pada 1852 Comte menyatakan bahwa dirinya tidak lagi berutang apapun pada Simon. Sejak saat itu Comte menjalani kehidupan intelektualnya sendiri, menjadi seorang profesional dan Comte menurut Coser menjadi seorang intelektual yang termarginalkan di kalangan intelektual Perancis di zamannya.

Kehidupan pun terus bergulir, Comte mulai melalui hari-harinya sebagai dosen pembimbing, penguji dan mengajar mahasiswa secara privat. Kendati demikian, penhasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhannya. Bukan hanya itu, karya awalnya pun menjadi mandek. Hal ini disebabkan intensitas Comte mengalami fluktuasi yang drastis dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompleksitas permasalahan itu menyebabkan Comte berada dalam kegelisahan. Inilah masa-masa titik rawan Comte, ia makin merasa tertekan dan akhirnya psikologisnya pun mejadi terganggu. Karena sifat dasarnya sebagai pemberontak mambawa dirinya mengalami gejala paranoid yang hebat. Tidak jarang pula perdebatan yang dimulai Comte mengenai apapun diakhirinya dengan perkelahian.

Kegilaan yang diderita Comte membuat dirinya menjadi nekat dan sempat menceburkan dirinya ke sungai. Lalu datanglah dewi penyelamat Comte yang bernama Coroline Massin yang dinikahnya pada tahun 1825.

Coroline bukan hanya terbebani secara materil saja, namun juga tidak ada perubahan pada perilaku Comte untuk Caroline karena itu ia memutuskan meninggalkan Comte pada 1841. Akhirnya, Comte kembali dengan kegilaannya lagi dan mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya Comte wafat di Paris pada 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetien du Pere Lachaise.

5. Asumsi-asumsi Comte

Kinloch (2005: 74-75), menjelaskan beberapa asumsi Comte yaitu:

- a. Menurut Comte alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tak terlihat sejalan dengan evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang dominan.
- b. Comte menyatakan bahwa proses evolusi ini terjadi melalui tiga tahapan utama, yaitu:
 - 1) Tahapan teologis
 - 2) Tahap metafisis
 - 3) Tahapan positivistik

Sepanjang tahapan ini, metode positif memungkinkan seseorang untuk menemukan dan memahami hukum-hukum alam dan gejala-gejala sosial, sehingga mampu mengembangkan potensi intelektual dan tatanan orang yang akan menyatakan kemajuan dan keteraturan bertentangan dengan situasi kacau yang masih berlangsung sekarang ini. Sosiologi haruslah merupakan ilmu yang terpadu dan menyatu, berdasarkan metode positif yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap evolusi sebuah tatanan moral alam.

- c. Comte memandang seluruh pengetahuan sebagai ilmu sosial alam dalam pengertiannya yang luas karena ia menggambarkan perkembangan konteks sosial, khususnya sebagai salah satu dari tiga tahapan intelektual tersebut.
- d. Comte membagi sistem sosial menjadi dua bagian penting, yaitu statistik sosial yang menyangkut sifat-sifat manusia, masyarakat, dan hukum-hukum keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan yang kedua ialah dinamika sosial atau hukum-hukum perubahan sosial.

e. Yang mendasari sistem ini ialah naluri kemanusiaan yang terdiri dari tiga faktor utama:

- 1) Naluri-naluri pelestarian setiap naluri seksual dan material
- 2) Naluri-naluri perbaikan seperti dalam bidang militer dan industri
- 3) Naluri sosial seperti kasih sayang, pemujaan, dan cinta semesta.

Di antara ketiganya, ada juga naluri-naluri kebanggaan kesombongan. Perkembangan dan kemajuan sosial tampak jelas dalam pertimbangan terakhir dari naluri-naluri (pembawaan) sosial yang berlawanan dengan naluri-naluri pelestarian dan peningkatan sebagai hubungan timbal balik (interaksi) di antara elemen-elemen teologis dan militer yang berakibat pada perubahan menuju model pemikiran positif.

Perkembangan ini ditunjang oleh beberapa permasalahan atau kegagalan manusia pada sistem karena ia mengalami perkembangan yang tidak terelakkan melalui tiga tahapan perkembangan intelektual. Beberapa faktor penunjang lain ialah tingkat kebosanan penduduk secara keseluruhan. Semua faktor ini mendorong terjadinya evolusi dari naluri-naluri rendah ke naluri yang tinggi dalam masyarakat sebagai proses awal terjadinya peradaban.

f. Comte menemukan semacam impian atau khayalan sosiologis yaitu sebuah masyarakat sosial sebagai titik akhir dan evolusi sosial serta sebuah agama kemanusiaan atau positivisme yang akan mendominasi tatanan sosial. Pada tahapan ini, seluruh bagian dari struktur sosial akan mengalami perkembangan yang positif dan Comte membicarakan berbagai kontribusi dari berbagai lembaga seperti pendidikan dan seni yang dapat mendorong evolusi ini sebagai kebijakan dari cinta berdasarkan pandangan positif.

6. Masyarakat sebagai organisasi sosial

Menurut Auguste Comte dalam Kinloch (2005: 77), model masyarakat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- a. Model masyarakat statis

Unsur-unsur masyarakat statis meliputi sifat-sifat sosial (agama, seni, keluarga, kekayaan, dan organisasi sosial), dan sifat kemanusiaan (naluri emosi, perilaku, dan intelegensi).

b. Model masyarakat dinamis

Unsur-unsur masyarakat dinamis terdiri dari atas hukum-hukum perubahan sosial dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kebosanan masyarakat, usia harapan, perkembangan penduduk, dan tingkat perkembangan intelektual. Comte memandang bagian-bagian ini sebagai suatu kesatuan yang berkembang melalui tiga macam tahapan perkembangan intelektual menuju positivisme.

Dalam konteks kemasyarakatan, tujuan utama kajian sosiologis Comte ialah mambatasi konstruksi masyarakat modren secara evolusioner, dalam artian menghentikan disorganisasi moral dan menekankan pada tuntutan moral. Comte senantiasa mendambakan pada tuntutan moral. Comte senantiasa mendambakan organisasi masyarakat dalam tatanan humanisme sebagai fondasi filsafat positivistiknya. Pada hakikatnya, Comte berupaya sekuat tenaga mengembangkan fisika sosial dengan tujuan hasil kejiannya tentang masyarakat dapat menghasilkan hukum-hukum sosial, sebagaimana hukum-hukum dalam disiplin ilmu sosial lainnya.

Comte merasa bahwa dinamika sosial lebih penting dibandingkan dengan statika sosial. Meskipun Comte menghendaki adanya perubahan sosial, tetapi ia tidak menginginkan perubahan secara revolusioner karena menurutnya evolusi masyarakat secara alamiah akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Pembagian ini berpengaruh dalam landasan pemikiran Comte dengan teori evolusinya atau hukum tiga tahap.

Menurut Comte, masyarakat adalah suatu kenyataan sosial yang lebih dari sekedar bagian-bagian yang saling tergantung. Oleh karena itu, untuk memahami kenyataan sosial tersebut diperlukan metode sosial yang empiris. Metode yang digunakan itu disebutnya sebagai positivisme.

Positivisme sendiri ialah paham filsafat yang cenderung untuk membatasi pengetahuan benar manusia kepada hal-hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan yang mengandung ciri pengkajian fakta yang pasti, cermat, dan bermanfaat melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis.

Dalam konteks ini tampaknya, Comte berusaha mengembangkan kehidupan manusia dengan menciptakan sejarah baru, mengubah pemikiran-pemikiran yang sudah membudaya, tumbuh dan berkembang pada masa sebelum Comte hadir. Comte mencoba dengan keahlian berpikirnya untuk mendekonstruksinya pemikiran yang sifatnya abstrak-teologis maupun pemikirannya yang pada penjelasan-penjelasanannya spekulatif.

Sebagai upaya dalam mengembangkan positivismenya Comte tidak sekedar melakukan sejumlah penelitian atau penjelasan abstrak dan teologis yang perlu direkonstruksi karena tidak sesuai dengan kaidah keilmiah, tetapi ia juga senantiasa melakukan kontemplasi dalam rangka mendapatkan variasi argumentasi yang menurutnya ilmiah.

Di sinilah Comte dengan jelas menampakkan keseriusan dan pergolakannya atau agitasinya tentang ilmu pengetahuan positif pada saat berdiskusi dengan kaum intelektual lainnya sekaligus menguji coba argumentasi atas mazhab yang sedang dipopulerkan dengan gencar-gencarnya. Menurutnya, sosiologi sebagai disiplin ilmu perlu menggunakan metode positif. Pasalnya, sebagai cabang ilmu sosial, sosiologi harus mampu menjadi ilmu yang sama ilmiahnya dengan ilmu pengetahuan alam yang mendahuluinya.

Pandangannya tentang positivisme dikembangkan melalui karyanya tentang pelajaran filsafat positif yang di dalamnya mengkaji tentang hukum kemajuan manusia dengan pandangan bahwa manusia akan melewati jenjang pemikiran yang semakin meningkat yang terdiri atas tiap jenjang. Tingkatan ini merupakan perkembangan intelegensi manusia yang juga berlaku bukan hanya terhadap perkembangan masyarakat, tetapi juga berlaku pada perkembangan seorang individu.

Menurutnya, perkembangan manusia dan pemikirannya berawal pada jenjang teologi yaitu tahap di mana manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati, artinya semua gejala dihasilkan oleh kekuatan gaib atau supranatural. Comte merasa bahwa tahap ini mendukung tipe organisasi sosial militer.

Tahap ini merupakan tahap yang paling lama dalam sejarah manusia yakni diperkirakan berlangsung sebelum era 1300. Untuk analisis yang lebih rinci Comte membaginya ke dalam tiga periode yaitu meliputi periode fetisisme, dengan dasar kepercayaan bahwa semua benda memiliki kekuatan supranatural. Bentuk pemikiran demikian terjadi pada masyarakat primitif yang dalam pandangan pengamat agama sebagai pandangan animisme.

Evolusi atau perkembangan pemikiran manusia pun terasa berlanjut. Manusia mulai menyederhanakan jumlah daripada kekuatan gaib tersebut hingga mengarah pada pandangan politeisme, di mana manusia percaya sejumlah kekuatan seperti dewa hujan, dewa matahari, dewa asmara, dewi padi, dan lain sebagainya.

Serentetan nama dewa itu memiliki kekuatan khusus untuk mengatur fenomena tertentu. Perkembangan pemikiran belum berhenti hingga di sini. Evolusi berjalan lagi, demikian pandangan Comte. Monoteisme adalah evolusi terakhir dalam tahapan pertama ini. Pada fase ini pemikiran mengalami restrukturisasi atas pemikiran banyak dewa. Pemikiran manusia menuju pada satu kekuatan gaib bahwa hanya satu Tuhan yang mengendalikan alam ini, dan karena itu manusia meninggalkan keyakinan terhadap banyak dewa.

Beralih pada pemikiran selanjutnya, yaitu tahap metafisika, disebut juga sebagai tahap peralihan atau transisi. Pemikiran manusia pada tahap ini mengacu pada kekuatan fisik (abstrak), bukan pada dewa-dewa personal. Pada fase ini fenomena alam sudah mampu dideskripsikan secara filosofis (jiwa, eksistensi) berdasarkan kepercayaan terhadap hukum-hukum alam. Menurut Comte peralihan ini berhubungan dengan

dominasi sosial dari ahli hukum yang berusaha menarik doktrin-doktrin sosial dan politik dari pemahaman tentang hukum-hukum alam. Tahap ini diperkirakan berlangsung sekitar antara tahun 1300-1800.

Tahap positif adalah tahapan yang terakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya, pada tahap ini gejala alam dan sosial dijelaskan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah yang didasarkan pada hukum ilmiah. Pada tahap ini akal budi manusia dikendalikan oleh rasionalitas yang di dukung oleh data empiris. Menurutnya, tahap ini merupakan tahap yang berakhir yang mendukung keteraturan sosial yang bersifat industrial. Tahap ini diperkirakan berlangsung mulai era 1800.

Kemampuan Comte dalam meramalkan kemajuan masyarakat, merupakan modal dasar dalam menciptakan masyarakat yang terikat dalam suatu keteraturan. Agama menurutnya, merupakan dasar untuk menciptakan konsensus secara universal sebagai sarana untuk menapai keteraturan itu. Dalam pembahasan ini dapat diketahui latar belakang lahirnya ajaran humanitas yang diciptakan oleh Comte dan pada saat itu Comte mengangkat dirinya sebagai imam agung.

Ajaran humanitas, yaitu suatu ajaran yang lebih berorientasi pada hubungan antarmanusia. Ajaran humanitas menganjurkan agar mengungkapkan orang-orang yang pernah memberi manfaat bagi masyarakat luas. Agama baru ini lahir dari hasil inspirasinya dengan Clothilde de Vaux, seorang wanita yang ditemuinya pada 1844. Begitu besar cinta Comte padanya, meskipun hingga akhir hayatnya Clotilde tidak pernah menerima cintanya karena sudah memiliki suami. Lagi-lagi romantika cinta Comte kandas di tengah jalan. Jiwanya pun sangat terguncang, dia bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk mengenang bidadarinya itu.

Setelah kematian bidadarinya itu, tulisan Comte nampaknya berubah secara menyolok. Salah satu karyanya misalnya *system of positive politics*, yang sebenarnya akan merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang strategi pelaksanaan praktis terhadap pemikiran mengenai filsafat positif, namun sebaliknya menjadi suatu bentuk

perayaan cinta. Meski demikian, masih tetap keinginan untuk membangun sistem secara menyeluruh. Dalam karyanya ini, Comte di dasarkan pada inspirasi bahwa kekuatan sebenarnya yang mendorong manusia dalam kehidupannya bukan hanya sekedar bersumber dari pertumbuhan inteligensi yang mantap, melainkan juga berasal dari dorongan perasaan.

Atas dasar pemikiran inilah, Comte mengusulkan adanya suatu reorganisasi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebesaran kemanusiaan. Reorganisasi masyarakat ini dirancangnya melalui sejumlah ritual atau tata cara untuk membangkitkan cinta murni dan tidak egoistis. Oleh karena itu, lahirlah suatu agama baru yang disebutnya agama Humanistas yang merupakan sumber-sumber utama bagi perasaan-perasaan manusia serta mengubah dari cinta diri dan egoisme mejadi altruisme dan cinta, serta sekaligus tidak membenarkan ajaran-ajaran agama yang bersifat supranaturalistik, melainkan sesuai dengan standar-standar intelektual positivistme.

Berangkat dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara komprehensif pemikiran Comte berusaha menjelaskan bagaimana pertumbuhan ilmu menghasilkan kemajuan sosial dan industri, bahkan pemikirannya sampai pada lahirnya keteraturan sosial dalam masyarakat, Comte senantiasa berlandaskan pada ajarannya tentang humanitas, di mana ia berusaha memajukan perasaan dan perkembangan altruistik sebagai suatu unsur hakiki dalam keteraturan sosial, tidak semata-mata bersandar pada akal budi perkembangan ilmu semata.

D. Masyarakat dalam Perspektif Organisasi Sosial menurut Herbert Spencer

1. Biografi dan karyanya

Upe (2010: 80-82), menjelaskan bahwa Spencer adalah seorang berkebangsaan Inggris yang lahir di Derby, 27 April 1820. Sejak awal ia menerima pendidikan klasik dalam lingkungan keluarga. Latar belakang keilmuan Spencer sebenarnya bukan dari seni humaniora, tetapi di bidang teknik dan utilitarian. Tahun 1837 ia mulai bekerja sebagai insinyur sipil

jalan kereta api, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1846. Kemudian pada 1848, Spencer ditunjuk sebagai redaktur dalam majalah *economist* pada kesempatan ini ide-ide briliannya mulai mantap.

Selama Spencer mulai menulis ia mengalami insomnia. Sejak kejiwaan inilah yang membuat dirinya tidak bisa tidur selang beberapa tahun berikutnya masalah mental dan fisiknya semakin parah. Spencer kemudian menderita gangguan saraf sepanjang sisa hidupnya. Ia pun memilih berhenti bekerja dan menjalani hidupnya sebagai seorang sarjana. Karena itu, ia tidak pernah meraih gelar kesarjanaan universitas terlebih lagi mendapatkan jabatan akademis.

Oleh sebab itu, sifatnya semakin tertutup, ditambah lagi dengan penyakit fisik dan mentalnya yang menggerogotinya menyebabkan produktivitasnya semakin menurun. Kendati kondisinya demikian, kemasyhuran Spencer bukan hanya di Inggris, tetapi mencakup internasional. Kemasyhurannya terbukti pada beberapa karyanya di antaranya *social statics* (1850), *first principle* (1862), *study of sociology* (1873), dan *description sociology* (1874).

Namun ternyata, nasib mujur tidak selamanya berpihak pada Spencer. Sifatnya yang keras dan enggan membaca karya orang lain menyebabkan kerusakannya intelektualnya. Karakternya tampaknya memiliki kesamaan dengan Auguste Comte yang juga mengalami gangguan otak. Prinsip yang melatari keengganannya membaca karya orang lain karena Spencer merasa dirinya telah menjadi pemikir sepanjang masa. Menurutny dengan membaca sebanyak yang dibaca orang lain, maka menyebabkan dirinya hanya mengetahui sedikit dari apa yang diketahui oleh orang kebanyakan.

Hal yang menarik untuk dipertanyakan kepada sosok penulis yang tidak pernah membaca karya sarjana lain ini ialah darimana asal gagasan dan pemahamannya? soal ini Spencer memiliki jurus pemungkas tersendiri. Pasalnya, ide-ide muncul tanpa disengaja dan melalui proses intuitif. Menurut Spencer, gagasannya muncul secara bertahap, sedikit demi sedikit, secara rendah hati tanpa disengaja ataupun upaya keras. Intuisi justru

dianggapnya jauh lebih efektif, jika dibandingkan dengan upaya lainnya yaitu berpikir dan belajar tekun.

Lebih dari itu, ia pun mengabaikan gagasan orang lain yang tidak mengakui gagasannya. Egoisme Spencer atas aturan main ilmu pengetahuan menyebabkan dirinya menghasilkan sejumlah gagasan kasar. Sampai akhir hidupnya pun (8 Desember 1903) ia masih meninggalkan pernyataan yang belum dibuktikan kebenarannya, sebut saja misal idenya tentang evolusi kehidupan manusia. Arogansi intelektual itulah menggiring sosiolog di abad ke-20 menolak gagasannya, lalu menggantikannya dengan riset ilmiah.

2. Asumsi-asumsi Spencer

- a. Dalam tradisi Victorian, Spencer memandang bahwa alam semesta berada dalam keadaan yang terus-menerus mengalami evolusi dan perubahan. Dia menganggap bahwa inilah tugas sosiologi untuk melacak proses-proses ini seperti mereka yang diterapkan dalam masyarakat.
- b. Spencer menganggap bahwa evolusi ialah sebuah proses universal sehingga suatu hukum alam dapat diterapkan secara universal. Kemudian, dia mendasarkan kerangka teorinya pada prinsip-prinsip alam, evolusi naturalistik.
- c. Dalam hal sosiologi, Spencer memandang masyarakat sebagai satu kesatuan dan perkembangan yang utuh, menggambarkan lebih dari sejumlah bagiannya dan bukannya subjek yang menghilangkan bagian-bagian itu. Hubungan-hubungannya sama dengan hubungan-hubungan fungsional dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini, Spencer merupakan seorang pelopor dari paham fungsionalis strukturalis kontemporer.
- d. Seperti halnya yang telah dilakukan Comte, Spencer membagi masyarakat menjadi dua bagian pokok yaitu masyarakat statis dan masyarakat dinamis, Masyarakat statis menggambarkan struktur lembaga masyarakat dan sistem sosial, sementara itu masyarakat dinamis meliputi evolusi struktur sosial yang sedang berlangsung.

- e. Menurut Spencer, lembaga-lembaga utama masyarakat terdiri atas keluarga, upacara, politik, pekerjaan (pembagian pekerjaan) dan lembaga-lembaga industri. Struktur sosial ini dipandang sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat primitif, poligam, militer, kekuasaan, dan sistem perbudakan menjadi suatu struktur masyarakat yang berdasarkan atas monogaminya negara secara pekerjaan-pekerjaan profesional dan pegawai atau tenaga kerja kontrak.
- f. Spencer juga membagi masyarakat menjadi dua sistem utama yaitu *inner* atau *inner society* yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi distribusi dan fungsi mempertahankan dan *outer* atau *outer society* yang menitikberatkan pada peraturan sosial atau kontrol sosial, *outer* berfungsi mempertahankan masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam sebuah perjalanan evolusi.
- g. Berkaitan dengan aspek masyarakat dinamis, Spencer menggarisbawahi sejumlah proses yang berbeda yaitu:
 - 1) Proses pergerakan yang berkelanjutan
 - 2) Perpindahan dari masyarakat yang homogen ke masyarakat heterogen
 - 3) Proses perhimpunan materi-materi superorganik
 - 4) Proses perubahan atau perpindahan masyarakat yang terus menerus menuju persamaan suatu keadaan yang mengakibatkan pecahnya atau sekilas berubahnya bahwa persamaan menjadi satu.

3. Masyarakat sebagai organisasi sosial

Upe (2010: 84-87), sebagai seorang yang Individualis, pandangan Spencer terhadap masyarakat tampaknya dipengaruhi oleh revolusi Industri dan ekspansi ekonomi, dari perspektif teori evolusi Darwin. Seperti halnya Comte, Herbert Spencer juga mengkaji masyarakat dengan menggunakan perspektif organik. Mereka adalah tokoh evolusionis yang menekankan gambaran tentang masyarakat sebagai suatu organisme keseluruhan lebih dari hanya sekedar jumlah bagian-bagiannya dan hanya dapat dimengerti sebagai suatu totalitas.

Dengan kata lain, organ-organ dalam organisme sosial yang meliputi individu-individu, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga ikut memberikan sumbangan bagi terpeliharanya konsensus sosial atau keteraturan sosial yang kompleks. Keduanya memiliki kebutuhan dan cara dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam analogi organiknya itu, Spencer begitu yakin terhadap masyarakat sebagai suatu organisme dengan menggunakan dasar pemikiran dari ilmu organisme hidup (biologi) dalam menguraikan organisme masyarakat. Dengan meminjam analogi biologi, Spencer memandang masyarakat memiliki sistem peraturan yang berupa pemerintah dan militer, sistem distribusi yang meliputi perniagaan dan komunikasi, dan sistem penopangan sebagaimana fungsi ekonomi.

Sirkulasi sistem ini pada dasarnya terdapat dalam suatu organisme biologis. Inilah dasar pemikiran aliran organisme sosial bagi tokoh sosiologi yang melihat konsepsi masyarakat layaknya seperti organisme hidup. Dengan kata lain, terdapat persamaan antara organisme biologi dan masyarakat sebagai organisme sosial.

Kendati antara organisme sosial dengan organisme sosial memiliki kesamaan, tetapi menurut Spencer masyarakat bukanlah organisme yang utuh. Keseluruhan sosial bukanlah keseluruhan yang utuh seperti organisme-organisme individual, karena dalam keseluruhan sosial setiap komponen terpecah. Satu hal yang paling mendasar ialah dalam organisme biologis kesadaran dipusatkan kepada otak, sedangkan dalam masyarakat kesadaran itu terpecah pada individu secara terpisah.

Oleh sebab itu, dalam analisisnya tentang masyarakat ia menamakan masyarakat sebagai suatu organisme hidup. Antara masyarakat dan organisme hidup memiliki ciri-ciri yang relatif sama yakni meliputi lima aspek:

- a. Masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan.
- b. Karena adanya pertumbuhan, maka struktur tubuh sosial maupun organisme mengalami penambahan pula.

- c. Tubuh organisme sosial dan tubuh organisme biologis memiliki fungsi dan tujuan tertentu.
- d. Baik organisme biologis maupun organisme sosial apabila mengalami perubahan pada suatu bagian, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lain.
- e. Masing-masing bagian saling berkaitan yang merupakan suatu struktur mikro yang dapat dipelajari secara terpisah.

4. Evolusi sosial

Upe (2010: 84-87), salah satu perhatian utama Spencer ialah berusaha menemukan proses evolusi sosial melalui masyarakat secara historis dalam sosiologi. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pemikiran Spencer banyak dipengaruhi oleh Darwin, dengan pemikiran prinsip-prinsip kajiannya tentang evolusi masyarakat ia menggunakan pendekatan evolusi biologis atau disebut juga pendekatan organik. Pada dasarnya, karya Spencer tidak memiliki perbedaan secara ekstrem dengan karya tokoh lainnya, khususnya Comte. Tetapi, ia mengembangkan dengan menyatakan bahwa masyarakat dapat diatur dalam satu susunan mengikuti beberapa ukuran sederhana.

Analisis kajian Spencer tentang masyarakat didasarkan pada suatu hukum evolusi yang berlaku di seluruh dunia. Menurut Spencer, proses evolusi tidaklah tentu harus mengikuti proses lurus. Proses tersebut mengikuti perubahan baik kemunduran maupun kemajuan, tergantung dari kondisi-kondisi yang memungkinkannya.

Evolusi tidak mengandung implikasi suatu kecenderungan laten untuk maju di mana pun hukum ini beroperasi. Tidak ada gerak naik yang seragam dari rendah ke tinggi, tetapi hanya ada penciptaan suatu bentuk sewaktu-waktu yang disebabkan oleh kecocokan dengan kondisi-kondisi yang lebih kompleks, menjadi mampu untuk bertahan lebih lama dalam kehidupan yang lebih beraneka ragam. Dengan demikian, maka ditinggalkan bentuk-bentuk lain yang kurang berkembang karena kurang sesuai, dan bentuk-bentuk itu tetap berada dalam keterasingan atau semakin mundur.

Hal ini menunjukkan bahwa semua kenyataan dalam masyarakat mengalami peralihan dari homogenitas yang tidak terpadu dan tidak pasti ke heterogenitas yang terpadu dan pasti. Realitas yang penting dan sederhana untuk dipahami sebagai contoh dalam proses evolusi sosial adalah peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan ini tergantung pada proses persediaan makanan dan kesempatan yang tersedia dalam lingkungan. Pertumbuhan bukan hanya merupakan akibat dari kelebihan kelahiran, melainkan juga dapat timbul dari penggabungan satuan-satuan sosial yang disertai dengan diferensiasi struktural.

Perhatiannya, tentang evolusi sosial, mendorong Spencer mengajukan empat pokok penting tentang sistem evolusi umum.

- a. Ketidakstabilan yang homogen. Setiap homogenitas akan semakin berubah dan membesar dan akan kehilangan homogenitasnya karena setiap kejadian tidak sama besar.
- b. Berkembangnya faktor yang berbeda-beda. Perkembangan bentuk-bentuk tersebut hanya merupakan batas dari suatu keseimbangan yaitu suatu keadaan yang seimbang yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang lain.
- c. Kecenderungan terhadap adanya bagian yang berbeda-beda dan terpilah-pilah melalui bentuk-bentuk pengelompokan.
- d. Adanya batas final dari semua proses evolusi di dalam suatu keseimbangan akhir.

Dengan demikian, evolusi sosial dapat ditandai dengan mulai terbentuknya bagian-bagian yang dapat dibedakan dengan demikian dapat dikenali karakteristiknya. Secara keseluruhan masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Jadi peningkatan struktur berlangsung secara simultan dengan spesialisasi sesuai dengan fungsi pada masing-masing bagian. Oleh karena itu, masing-masing bagian saling berfungsi satu sama lain, maka bagian-bagian itu saling tergantung pula.

Tumbuhnya hubungan yang saling ketergantungan, menyebabkan terciptanya integrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses evolusi terdapat tiga aspek yang terjadi yaitu diferensiasi struktural, spesialisasi

fungsional, dan integrasi yang meningkat. Struktur-struktur bagian atau sistem-sistem bagian yang timbul dalam proses evolusi sosial terdiri dari tiga sistem:

- a. Sistem penopang. Sistem penopang berfungsi mencukupi keperluan-keperluan demi terciptanya ketahanan hidup, dengan perkataan lain, sistem penopang memproduksi keperluan hidup secara besar-besaran sehingga masyarakat dapat melanjutkan proses kehidupannya. Dalam sistem penopang, produksi bahan makanan dibedakan misalnya kerajinan. Sistem ini mengembangkan diri dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan anorganis.
- b. Sistem pengatur. Sistem pengatur berfungsi dalam memelihara hubungan dengan masyarakat lainnya dan mengatur hubungan intern. Sistem pengatur terdiri atas para pemimpin yang secara rinci terbagi dalam sistem-sistem pengatur politik, militer, dan sistem pengatur keagamaan.
- c. Sistem pembagi. Sistem ini berfungsi mengangkut barang-barang dari satu sistem ke sistem lain.

Singkatnya, proses evolusi sosial dapat dilihat dengan jelas pada tiga aspek perubahan, yaitu adanya peralihan dari homogenitas ke heterogenitas yang tampak dari diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional. Atau peralihan dari tidak adanya perpaduan ke terjadinya perpaduan yang merupakan proses interdependensi dan integrasi yang semakin meningkat. Kemudian, dari tidak tentu ke yang tentu dapat dikenali dari kenyataan dimana semakin banyak ketentuan yang lebih cermat dalam bentuk hukum-hukum dan peraturan-peraturan.

5. Tipe masyarakat

Upe (2010: 87-88), sejalan dengan pembahasan tentang evolusi sosial, maka dalam proses evolusi perlu diketahui tipe-tipe masyarakat yang bersangkutan karena menurut Spencer evolusi terjadi sesuai dengan tipe-tipe masyarakat. Tipologi masyarakat yang dikembangkan oleh Spencer meliputi masyarakat yang didasarkan dalam bentuk ukuran, yaitu masyarakat

sederhana dan masyarakat majemuk. Di samping itu, berdasarkan perkembangannya ia membagi masyarakat ke dalam masyarakat primitif, masyarakat militer, dan masyarakat industri.

Masyarakat sederhana yang dimaksud oleh Spencer ialah masyarakat yang terdiri atas satu kesatuan kerja yang tunggal dan tidak tunduk pada pihak lain, bagian-bagiannya saling bekerja sama tanpa adanya pusat yang mengatur. Masyarakat sederhana tidak memiliki pimpinan secara tetap. Hidup bersifat nomaden, separuh menetap dan menetap pada suatu tempat tertentu. Sedangkan masyarakat majemuk ialah suatu masyarakat di mana setiap satu kelompok sosial memiliki seorang ketua tertinggi. Pada masyarakat majemuk kehidupan lebih bersifat menetap dan memiliki beberapa corak pemerintahan yang tunduk pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam masyarakat primitif dapat dikatakan belum terjadi diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Dengan demikian, belum terdapat pembagian kerja secara kompleks berdasarkan spesifikasi keahlian yang dimiliki, tetapi masih bersifat homogen. Pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan spontan atas dasar hubungan kekeluargaan. Begitu pula dengan hubungan-hubungan kekuasaan yang belum jelas. Masyarakat pada tipe ini masih tergantung kepada lingkungan karena belum memiliki teknologi untuk mengubah alam.

Perkembangan selanjutnya setelah masyarakat primitif ialah masyarakat militer. Dalam masyarakat militer terjadi peningkatan heterogenitas karena terjadi peningkatan jumlah penduduk atau bahkan karena akibat dari penaklukan. Hal yang sangat penting ialah terjadinya koordinasi tugas-tugas secara khusus dan cenderung dilaksanakan secara paksaan.

Sehingga kerja sama dilakukan dalam pekerjaan tidak didasarkan atas suka rela, melainkan kelangsungannya dijamin oleh pemimpin dan oleh negara nasional. Posisi negara pada tipe ini sangat berpengaruh, dimana pengendalian pada negara tidak hanya sebatas pada produksi dan distribusi,

tetapi juga sampai pada bidang kehidupan pribadi. Dengan demikian, tipe masyarakat ini sering juga disebut sebagai masyarakat militer.

Tipe perkembangan masyarakat menurut Spencer yang paling terakhir ialah masyarakat industri. masyarakat industri bercirikan suatu tingkat kompleksitas yang sangat tinggi dan kehidupan pribadi tidak lagi dikendalikan semata-mata oleh kekuasaan negara. Melainkan kehidupan pribadi ditentukan oleh diri sendiri. Atau dengan kata lain setiap individu berhak menentukan hidupnya sendiri tanpa intervensi yang berlebihan oleh kekuasaan negara. Negara hanya sebatas memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan hubungan kerja sama dan keseimbangan kepentingan bersama.

Dalam pandangan ini evolusi mengakibatkan individualisasi yang dapat dirasakan dengan kurangnya campur tangan pemerintah. Kebebasan dan nilai toleransi menjadi satu hal yang sangat pokok dan menjadi nilai sentral dalam masyarakat ini. Dengan demikian, terjailah konsensus tentang nilai-nilai sentral dan nilai-nilai utama yang didasarkan pada penerimaan aturan main secara ilmiah dengan prinsip kehidupan pribadi yang tidak dapat diintervensi secara berlebihan oleh siapapun. Oleh karena masyarakat semakin memegang teguh prinsip individualisme, maka hubungan saling ketergantungan semakin meningkat karena hubungan kerja dilakukan atas dasar keahlian yang dimiliki.

BAB IV

INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EMILE DURKHEIM

C. Biografi dan Karyanya

Upe (90-92), David Emile Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada 15 April 1858. Ayahnya seorang pendeta Yahudi, dan dia pun pernah belajar untuk menjadi seorang pendeta, namun cita-citanya itu gagal, dan dia memutuskan untuk tidak menjadi seorang pendeta pada umur 10 tahun. Tampaknya Durkheim saat itu mengalami kekecewaan terhadap pendidikan agama. Bukan hanya itu, ia pun kecewa terhadap pendidikan pada umumnya.

Sejak itu, kajian agamanya lebih bernuansa akademis daripada teologis. Pada umur 21 Durkheim masuk ke perguruan tinggi Ecole Normale Supérieure. Di masa itulah ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Kenyataan ini tampak dari peta perjalanan intelektualnya yang tidak hanya fokus pada satu bidang keilmuan. Di sinilah Durkheim mulai banyak memberikan perhatian terhadap masalah kesustraan, metodologi ilmiah dan prinsip-prinsip moral yang menurutnya dapat menuntun kehidupan sosial.

Dalam perjalanan intelektualnya, ia lalu menolak karir akademis tradisional di bidang filsafat dan berusaha memperoleh pelatihan ilmiah yang diperlukan untuk memandu moral masyarakat. Pada dasarnya Durkheim tertarik pada sosiologi ilmiah, hanya saja pada masa itu belum ada disiplin sosiologi, sehingga mengantarnya pada pengajar filsafat di beberapa sekolah disekitar Paris.

Karir ini ditekuninya sekitar tahun 1882 hingga 1876, setelah masa kerjanya usai di Paris, ia pun hijrah ke Jerman. Ia menerbitkan beberapa karya

yang melukiskan pengalamannya selama di Jerman. Publikasi-publikasi ini membawanya meraih posisi di Departement Filsafat Universitas Bordeaux pada 1887. Mulai saat itulah, Durkheim memberikan kuliah ilmu sosial khususnya di bidang pendidikan moral di Paris.

Selang beberapa tahun berikutnya, serentetan kesuksesan terpancar dalam karya-karya monumentalnya. Ia mengawali karyanya dengan menerbitkan tesis doctoralnya dengan judul *The Division of Labour in Society* (1893). Kemudian pernyataan metodologis utamanya dituangkan dalam karyanya berjudul *the Rules of Sociological of method* (1895). Sekitar tahun 1896 Durkheim menjadi profesor penuh di universitas Berdeaux, dan hanya membutuhkan waktu sekitar dua tahun, karyanya tentang metode-metode tersebut diikuti oleh penerapan dalam bentuk studi empiris.

Karyanya yang terakhir cukup terkenal diberi judul *the elementary of the religious life* (1912), tentang pengaruh kepercayaan kepada kehidupan masyarakat. Di akhir hidupnya, 15 November 1917 sosok Durkheim seringkali disebut sebagai seorang yang berhaluan politik konservatif. Kendati demikian, pada zamannya ia justru di pandang sebagai seorang liberal dan ini tercermin ketika ia secara aktif berperan dalam membela Alfrete Dreyfus yang divonis mati karena penghinaan terhadap Tuhan.

D. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Menurut Emile Durkheim

1. Asumsi-asumsi Emile Durkheim

Ada beberapa asumsi Emile Durkheim dalam Kinloch (2005: 89), yaitu:

- a. Masyarakat sebagai kesadaran kolektif mempunyai keberadaan yang independen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Spencer, dia pun memandang bahwa masyarakat lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagiannya, tetapi merupakan satu kesatuan; kesatuan yang utuh yang secara terkondisikan melaksanakan dan mempengaruhi struktur normatifnya.
- b. Lebih lanjut dalam fakta-fakta sosial (norma-norma kolektif) adalah kenyataan, sebagian bukti keberadaan kekuatan norma-norma dan struktur-struktur lembaga yang saling berhubungan.

- c. Kekuatan sosial didasarkan pada pandangan kolektif yaitu berbagai bentuk kekuasaan yang bersandar pada struktur-struktur normatif dari kelompok tertentu selama kontrol itu diterapkan pada anggota-anggota kelompok melalui norma-norma ini. Dalam kenyataannya secara umum, seluruh aspek struktur sosial, termasuk lembaga-lembaga bersandar pada seluruh sistem normatif masyarakat.
- d. Durkheim berpandangan bahwa evolusi fakta dan norma sosial didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, gejala sosial menggambarkan kebutuhan-kebutuhan sosial sebuah korelasi dari teori Durkheim yang mendorong para ahli sosiologi untuk mengkaji secara lebih mendalam. Pandangan tersebut juga menjelaskan pendekatan paham fungsionalis struktur yang lebih kontemporer.
- e. Integrasi sosial ditemukan dalam pembagian kerja dalam masyarakat yaitu semakin sama pembagian kerja dalam masyarakat, semakin tinggi integrasi sosial.
- f. Durkheim menghubungkan ukuran populasi dengan tingkat kepadatan penduduknya dan tingkat pembagian kerja selanjutnya dan integritas sosial, yaitu semakin tinggi ukuran populasi, semakin besar tingkat kepadatan penduduknya yang berakibat peningkatan dalam hal pembagian kerja dan penurunan dalam hal solidaritas sosial.
- g. Lebih lanjut Durkheim menguraikan dua tipe utama solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis merupakan golongan masyarakat tradisional yang pembagian kerjanya dalam masyarakat masih rendah, norma-norma yang cenderung represif, dan masih adanya kesatuan sosial dalam tingkat yang tinggi. Sedangkan solidaritas organik ialah sifat yang lebih maju, sebuah masyarakat industri dalam pembagian kerja yang begitu kompleks (tidak sama), meningkatnya hubungan kontrak (yang diikat dengan perjanjian) dan memiliki tingkat integrasi yang lebih rendah. Dalam hal ini, upaya kontrol individu menjadi lemah menuju suatu keadaan berkurangnya norma-norma yang lebih tinggi dalam masyarakat. Pada tahapan inilah,

penyimpangan-penyimpangan sosial tingkat tinggi seperti bunuh diri terjadi karena perakat antar individu dan struktur sosial menjadi melemah dan keinginan-keinginan mereka tidak lagi diatur secara tepat.

- h. Akhirnya Durkeim berasumsi bahwa kejahatan dan bentuk penyimpangan yang lain mempunyai fungsi untuk masyarakat dalam hal penyimpangan sehingga mendorong perubahan dan perkembangan norma-norma dalam masyarakat.

Secara ringkas, Durkheim memandang masyarakat sebagai satu kesatuan, kesatuan normatif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Karena meningkatnya populasi, kepadatan penduduk dan pembagian kerja dalam masyarakat, ia akan mengubah masyarakat yang berdasarkan solidaritas mekanik menuju masyarakat yang berdasarkan solidaritas organik.

Masalah praktis yang muncul kemudian ialah reintegrasi individu-individu dan lingkungan sosial mereka, seperti perkembangan kesatuan moral. Saran-saran Durkheim, termasuk penggunaan pendidikan dan sebuah moralitas yang baru melebihi individu, membarikan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Seperti Comte dan Spencer, Durkheim juga memerhatikan hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek praktis keharmonisan sosial.

Menurut Emile Durkheim dalam Poloma (2010: 25-26), masyarakat modern merupakan keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak terpenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis.

Sebagai contoh dalam masyarakat modern fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana kehidupan ekonomi mengalami fluktuasi yang keras, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Suatu depresi yang parah dapat menghancurkan sistem politik, mengubah sistem keluarga dan

menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan. Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalisme kontemporer menyebut keadaan normal sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

2. Beberapa pandangan Emile Durkheim

Upe (2010: 92-113), menjelaskan beberapa pandangan Emile Durkheim sebagai berikut:

a. Sosiologi dalam Perspektif Durkheim

Salah satu kontribusi terpenting Durkheim terhadap perkembangan sosiologi terpancar dalam bukunya yang berjudul *the Rules of Sociological Method*. Dalam karyanya ini ia menawarkan definisinya mengenai sosiologi. Durkheim menilai bahwa bidang yang mesti dipelajari sosiologi ialah fakta sosial. Fakta sosial ialah cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu.

Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan oleh Durkheim sebagai objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Sesuatu itu tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni semata, tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia melalui kegiatan penelitian empiris, dan tidak dapat dipelajari melalui intropkresi. Tipe dasar dari fakta sosial ialah struktur sosial dan pranata sosial.

Fakta sosial menurut Durkheim eksistensinya bersifat independen pada tingkat sosial, karena independen, maka fakta sosial tidak direduksi dalam fakta individu. Dalam artian untuk menjelaskan fakta sosial, maka kita harus mengamati fakta sosial itu sendiri, bukannya fakta individu sebagaimana dipahami oleh Homans, bahwa setiap usaha untuk menjelaskan gejala sosial harus di dasarkan pada proporsinya mengenai

perilaku hidup. Dengan demikian, tindakan individu merupakan tindakan yang diperlukan oleh norma-norma, nilai-nilai, serta struktur sosial. Dengan kata lain, Durkehim melihat masyarakat berada pada posisi deterministik.

Menurutnya, masyarakat merupakan wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara sesama manusia, masyarakat berada di atas segalanya. Masyarakat bersifat menentukan dalam perkembangan individu. Hal yang penting dalam jiwa manusia pun berada di luar diri manusia sebagai individu, misalnya, kepercayaan keagamaan, kategori alam pikir, kehendak, bahkan hasrat untuk bunuh diri. Serangkaian peristiwa tersebut bersifat sosial dan terletak dalam masyarakat. Untuk mengerti masyarakat yang dimaksud oleh Durkheim dan perannya yang dimainkan dalam menganalisis tindakan-tindakan kemanusiaan, maka kita harus melepaskan diri dari pengertian abstrak, dan kita harus lebih melihatnya dengan penggunaan perspektif masyarakat itu sendiri.

Masyarakat merupakan sumber dan dasar segala-galanya, di mana individu sama sekali tidak mempunyai arti dan kedudukan. Fenomena sosial seperti kejahatan, sakit jiwa, kesusilaan, kompetisi, ekonomi, undang-undang dan sebagainya. Semuanya diterangkan berdasarkan prioritas masyarakat.

Eksistensi masyarakat tidak tergantung pada anggota-anggotanya, melainkan sebagai suatu struktur adat-istiadat, kepercayaan, sebagai suatu lingkungan hidup terorganisasi. Sebagaimana tampak dengan jelas setiap individu itu lahir dan hidup dalam suatu lingkungan, berbicara satu bahasa, memiliki satu lembaga, tanpa persetujuan individu sejak lahir. Lingkungan telah membuktikan dan memaksanya mengikuti arah tertentu, tanpa harus menolak.

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam yakni:

- 1) Dalam bentuk materiil, yaitu barang sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya norma hukum;

2) Dalam bentuk non materiil yaitu sesuatu yang dinyatakan atau dianggap sebagai barang sesuatu yang nyata. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia, sebagai contoh egoisme, altruisme, dan opini.

Untuk kejelasan teorinya, Durkheim mencontohnya dalam pendidikan anak, di mana sejak bayi seorang anak diwajibkan makan, minum, tidur pada waktu tertentu, diwajibkan taat, dan menjaga kebersihan, diharuskan tenggang rasa terhadap orang lain, menghormati adat dan kebiasaan. Serangkaian kewajiban ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk cara berpikir dan bertindak seorang individu agar berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut bersama.

Ritzer dan Goodman (2004:22), dalam karya Durkheim *Teh Rule of Sociological* ia membedakan antara dua tipe fakta sosial, material dan non material. Meski ia membahas keduanya dalam karyanya, perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial nonmaterial misalnya kultur, institusi sosial, ketimbang fakta sosial non material (birokrasi, hukum).

Perhatiannya terhadap fakta sosial nonmaterial ini telah jelas dalam karyanya paling awal, *The Division of Labor in Society*. Dalam buku ini perhatiannya tertuju pada upaya membuat analisis komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat bisa dikatakan berada dalam keadaan primitif atau modern, Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta sosial nonmaterial, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau oleh apa yang ia sebut sebagai kesadaran kolektif yang kuat. Tetapi karena kompleksitas masyarakat modern, kekuatan kesadaran itu telah menurun.

Ikatan utama dalam masyarakat modern ialah pembagian kerja yang ruwet, yang mengikat orang satu dengan yang lain dalam hubungan saling tergantung. Tetapi, menurut Durkheim pembagian kerja dalam masyarakat modern menimbulkan beberapa patologi. Dengan kata lain, divisi kerja bukan metode yang memadai yang dapat membantu menyatukan masyarakat.

Kecenderungan sosiologi konservatif Durkheim terlihat ketika ia menganggap revolusi tak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Menurutnya, berbagai reformasi dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar tetap berfungsi. Meski ia mengakui bahwa dalam masyarakat modern moralitas bersama dapat diperkuat dan karena itu manusia akan dapat menanggulangi penyakit sosial yang mereka alami dengan cara yang lebih baik.

b. Solidaritas sosial

Selain dari teorinya tentang fakta sosial, Durkheim mengkaji lebih jauh tentang pembagian kerja. Perhatiannya tentang hal itu tertuang dalam karya nya yang berjudul *the Devision of Labour in Society*. Buku ini merupakan bentuk upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Menurutnya, terjadinya penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja di bidang industri modern mengakibatkan lahirnya pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin rinci. Gejala pembagian kerja tersebut dijumpai pula di bidang perniagaan dan pertanian, dan tidak terbatas pada bidang ekonomi, tetapi melanda pula bidang-bidang kehidupan lain seperti hukum, politik, kesenian, dan bahkan juga keluarga.

Tujuan kajian Durkehim ini ialah bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas. Di sini ia membagi solidaritas ke dalam dua tipe utama, yaitu:

1) Solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Pada masyarakat dengan tipe solidaritas mekanis, individu diikat dalam suatu bentuk solidaritas yang memiliki kesadaran kolektif yang sama dan kuat. Karena itu, individualitas tidak berkembang karena dilumpuhkan oleh tekanan besar untuk menerima konformitas. Realitas masyarakat yang memiliki solidaritas

mekanis dapat kita temukan pada masyarakat sederhana, segmental, praindustri dan masyarakat pedesaan.

Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakwaan ini diikat oleh apa yang Durkheim namakan *collective consciousness* yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat. Pada masyarakat yang demikian itu, belum tampak secara jelas pembagian kerja yang begitu berarti.

Hal ini terjadi karena di samping kekuatan masyarakat secara deterministik atas individu, juga disebabkan oleh sifat masyarakat yang relatif homogen. Sehingga apa yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, lazimnya dapat pula dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Olehnya itu, tidak terdapat saling ketergantungan antara kelompok berbeda.

Masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Sementara itu, ketika masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks melalui pembagian kerja, maka solidaritas mekanik luluh lantah dan digantikan oleh solidaritas organik.

2) Solidaritas organik

Pada masyarakat dengan tipe solidaritas organik masing-masing anggota masyarakat tampaknya tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, mereka terspesialisasi berdasarkan jenis pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan dependensi atau saling ketergantungan yang semakin menganga lebar.

Munculnya perbedaan-perbedaan di tingkat individu ini mengubah kesadaran kolektif tersebut, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara lebih relatif lebih otonom sifatnya.

Solidaritas organik merupakan sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung. Jika solidaritas mekanik di dasarkan pada hati nurani kolektif, maka lain halnya dengan solidaritas organik. Tipe solidaritas ini di dasarkan pada hukum dan akal.

Ikhwal inilah yang menggairahkan individu untuk meningkatkan kompetensinya secara individual sehingga kesadaran kolektif semakin redup, bahkan pada kondisi akut dapat mati kekuatannya. Secara konkret, solidaritas sini dapat kita jumpai pada masyarakat Industri atau masyarakat perkotaan. Melihat fenomena ini, Durkehim mengusulkan perlunya suatu konsensus intelektual dan moral untuk menciptakan keteraturan sosial yang bersifat harmonis dan integratif.

Selanjutnya Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik hukum sering kali bersifat represif, dimana pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan diberikan hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu.

Hukuman tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Lain halnya dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organis, hukum bersifat restitutif. Hukum ini bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.

Dalam konteks ini telah terjadi suatu revolusi berangsur-angsur dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis. Evolusi tersebut dapat dilihat dari meningkatnya hukum restitutif yang mengakibatkan berkurangnya hukum represif dan dari melemahnya kesadaran kolektif. Melemahnya kesadaran kolektif tampak paling jelas di dalamnya hilangnya pula arti agama. Karena itu, terdapat lebih banyak ruang bagi perbedaan-perbedaan individual.

Durkheim membuat kesimpulan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta sosial nonmateril, khususnya karena kuatnya moralitas bersama. Namun, seiring perjalanan kompleksitas

masyarakat modern, maka kekuatan kesadaran kolektif itu menjadi memudar dan menurun.

Ikatan utama dalam masyarakat modern ialah pembagian kerja yang spesifik. Spesialisasi pekerjaanlah yang kemudian mengikat orang satu sama lain dalam hubungan selain tergantung. Menurut Durkehim, pembagian kerja dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang spesifik. Spesialisasi pekerjaanlah yang kemudian mengikat orang satu sama lain dalam hubungan saling tergantung.

Menurut Durkheim, pembagian kerja dalam masyarakat modern menimbulkan beberapa patologi. Kendati kerinduan akan kesadaran kolektif di masa lalu tidak mungkin lagi kembali, namun menurutnya dalam masyarakat modern moralitas bersama dapat diperkuat dan karena itu manusia akan dapat menanggulangi patologi sosial yang mereka alami. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri yang dapat dijadikan sebagai pembeda antara struktur solidaritas mekanik dan struktur solidaritas organik.

Solidaritas mekanik	Solidaritas Organik
Pembagian kerja rendah	Pembagian kerja tinggi
Kesadaran kolektif kuat	Kesadaran kolektif rendah
Individualitas rendah	Individualitas tinggi
Hukum represif dominan	Hukum restitutif dominan
Konsensus terhadap pola-pola normatif penting	Konsesnsus pada nilai-nilai abstrak dan umum penting
Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang	Badan-badan kontrol yang menghukum orang yang menyimpang
Saling ketergantungan rendah	Saling ketergantungan tinggi
Bersifat primitif-pedesaan	Bersifat industrial-perkotaan

Durkheim mengkaji masyarakat ideal berdasarkan konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan solidaritas sosial menurutnya

lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional.

BAB V

INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF TALCOT PARSON

C. Biografi dan karyanya

Upe (113-115), Talcott Parson adalah seorang sosiolog modern yang lahir pada 13 Desember 1902 di Colorado Spring Amerika Serikat. Ia berasal dari latar belakang religius dan intelektual. Ayahnya seorang pendeta, profesor dan kemudian menjadi rektor sebuah perguruan tinggi. Ia belajar di Amherst Ollege 1920 dan mendapat gelar sarjana muda pada 1924. Pada tahun yang sama, ia menyiapkan disertasinya di London *School Of Economics*.

Pada tahun berikutnya, Parsons pindah ke Universitas Heidelberg, Jerman. Di sini Parsons banyak dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber meskipun ia meninggal 5 tahun sebelum kedatangan Parsons. Pemikiran Weber sebagaimana yang tercermin dalam disertasi Parsons di Heidelberg banyak diilhami melalui proses diskusi yang diselenggarakan di rumah istri yang telah ditinggal mati (janda Weber).

Parsons memulai karirnya sebagai seorang dosen di Harvard University pada 1927. Meski terbilang sering berganti jurusan (mula-mula di fakultas ekonomi, kemudian tahun 1931 di fakultas sosial sekaligus sebagai ketuanya pada 1944), namun ia tetap saja sebagai dosen di Harvard hingga akhir hidupnya 8 Mei 1979. Karir akademik Parsons sebagai profesor hingga tahun 1939 tampaknya tidak menunjukkan adanya perkembangan yang begitu cepat. Kendati demikian, dua tahun berikutnya ia menerbitkan buku yang merupakan pengenalan tentang pemikiran utama sosiologi. Melalui bukunya *the structure*

of social action (1937), ia meletakkan landasan teori tindakan-tindakan sosial sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Weber.

Berkat karyanya tersebut karir akademik Parsons semakin menunjukkan adanya kemajuan yang sangat berarti. Pada 1944 ia diangkat sebagai ketua jurusan Sosiologi di Harvard, dan berhasil mendirikan Departemen Hubungan Sosial. Tahun 1949, ia terpilih sebagai presiden *The American Sociological Association*. Karir Parsons tidak berhenti di sini, tahun 1950-an Parsons menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika atas terbitnya buku yang berjudul *the social system*.

Meskipun demikian, secara historis menunjukkan bahwa tidak satupun para ahli yang aman dari serangan dan kritikan dari ahli lainnya, ini telah menjadi dinamika dalam dunia ilmu pengetahuan. Kondisi inilah yang dirasakan oleh Parsons di akhir tahun 1960-an. Ia mendapat serang dari sayap radikal Sosiologi Amerika yang baru muncul. Parsons dinilai berpandangan politik konservatif dan teorinya dianggap sebagai konservatif dan tidak lebih dari sebuah skema kategorisasi yang rumit.

Serangan kritik atas dirinya menjadi berbalik di tahun 1980-an. Pada saat itu, perhatian terhadap teori Parsons timbul kembali bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Pasca kematian Parsons sejumlah mantan mahasiswanya merenungkan arti pentingnya teori dari proses pembentukannya. Robert Merton adalah salah seorang mahasiswa yang cukup brilliant ketika parson baru saja mulai mengajar di Harvard.

D. Integrasi Sosial dalam Masyarakat menurut Talcott Parson

Kinloch (2005: 188), menjelaskan bahwa tujuan utama teorisasi Parsons ialah pengembangan teori yang menerapkan masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Menurut pandangannya, teori fungsional organisasi masyarakat berdasarkan pada manusia, sebagai aktor pembuat keputusan yang dibatasi oleh faktor normatif dan situasional.

Faktor-faktor situasional inilah yang memperkenalkan kebutuhan-kebutuhan atau fungsi sistem ke dalam pemahaman perilaku sosial. Karena itu, lebih jauh menurut pandangan ini masyarakat memiliki karakteristik universal

yang memungkinkan dikembangkannya teori yang bisa diterapkan pada semua masyarakat yaitu evolusi dan perkembangannya.

1. Asumsi-asumsi

Parson membuat sejumlah asumsi yang berkenaan dengan masyarakat sebagai berikut:

- a. Sistem sosial diasumsikan untuk memunculkan *sui generis*, yaitu masyarakat memiliki suatu realitas independen untuk melintasi eksistensi individu sebagai suatu sistem interaksi.
- b. Struktur sosial atau subsistem masyarakat menggambarkan sejumlah fungsi utama yang mendasarinya (struktur mewakili fungsi) atau problem sistem yang mendasarinya. Fungsi-fungsi ini terdiri atas integrasi (sistem sosial didasarkan pada norma-norma yang mengikat individu dengan masyarakatnya melalui integrasi normatif), pola pertahanan (sistem budaya nilai-nilai dan nilai-nilai generalisasi), pencapaian tujuan (sistem kepribadian-basis pembedaan), dan adaptasi (organisasi perilaku-basis peran dan sistem ekonomi).
- c. Sistem sosial sebaiknya terdiri atas empat subsistem yaitu komunitas masyarakat (norma-norma integratif), pola pertahanan (nilai-nilai integratif), bentuk dan proses pemerintahan (diterapkan untuk perolehan tujuan), dan ekonomi (diterapkan untuk adaptif). Pada umumnya, fokus utama sistem sosial ini, menurut Parsons adalah internal, integrasi normatif. Sementara itu, basis masyarakat adalah tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya.
- d. Pandangan masyarakat ini adalah didasarkan pada sifat hakiki sistem kehidupan pada semua tingkat organisasi dan perkembangan evolusioner dengan asumsi yang ada yaitu kelanjutan kuat atas kelas-kelas sistem kehidupan, kemudian analisis biologis ialah pusat paradigma masyarakat dalam pandangan Parsons.
- e. Lebih jauh, dalam kaitan dengan analogi ini pandangan bahwa masyarakat ialah sama bagi sistem biologis dan natural, Parsons berasumsi bahwa fokus atau landasan sentral masyarakat ialah kecenderungan terhadap equilibrium dan homeostatik. Proses-proses

sentral dalam kecenderungan ini adalah beberapa hal antarhubungan empat subsistem aksi-interpenetrasi internalisasi masyarakat komponen-komponen negatif sebagai struktur konstitutif. Sistem sosial ini kemudian dipandang sebagai sistem yang berorientasi integrasi dan equilibrium.

- f. Sistem ini tidak dipandang statis daripada suatu kapasitas yang dimilikinya untuk evolusi dan adaptif. Dengan demikian, bisa berakibat meningkatkan pencapaian tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan peningkatan integrasi internalnya. Proses sentral perubahan evolusi mengandung perbedaan atau pembagian lebih jauh atau spesialisasi struktur fungsional, penyesuaian bimbingan (meningkatkan kebebasan unit-unit sosial dari sumber kekerasan).
- g. Akhirnya budaya kristen atau nilai aktivitas instrumen Barat dipandang sebagai penggerak utama dalam proses-proses evolusi dan modernisasi masyarakat, menghasilkan sejumlah tahapan sejarah bagi Amerika Modern dewasa ini.

2. Teori AGIL

Menurut Ritzer (2014: 117-118), selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. Bahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan, terkenal dengan skema AGIL. Sesudah membahas empat fungsi ini kita akan beralih membahas pemikiran Parsons mengenai struktur dan sistem.

Suatu fungsi ialah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Menurut Parsons, ada 4 fungsi penting diperlukan semua sistem, yaitu:

- a. *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

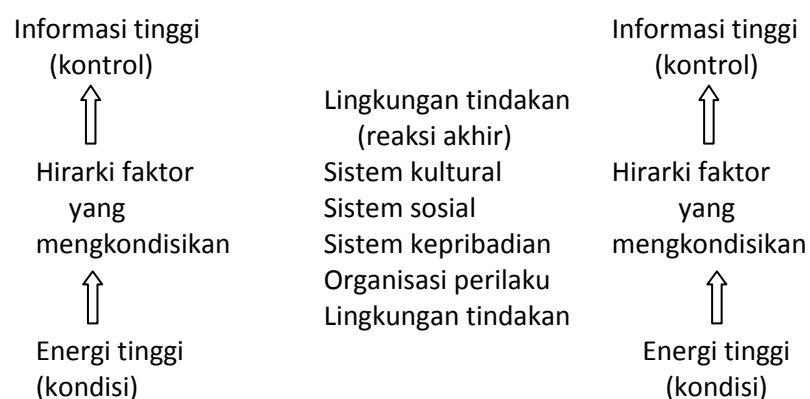
- c. *Integration* (integrasi): suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
- d. *Latency* (letensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Dalam bahasan tentang empat sistem tindakan di bawah, akan dicontohkan bagaimana cara Parsons menggunakan skema AGIL.

Organisme perilaku ialah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangka norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

3. Sistem tindakan

Ritzer (2014: 118-119), berikut ini akan dibahas bentuk menyeluruh sistem tindakan Parsons yang merupakan sebuah sistem tingkatan analisis sosial. Gambar ini adalah garis besar dari tingkatan utama dalam skema Parsons.



Gambar. Skema Tindakan Parson

(Sumber: Ritzer, 2014: 118)

Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkatan analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hirarkinya jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara, yaitu: *pertama*, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. *Kedua*, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang ada dibawahnya.

Dilihat dari sistem tindakan tingkat yang paling rendah berupa lingkungan fisik dan organis, meliputi aspek tubuh manusia, anatomi, dan fisiologinya. Tingkat paling tinggi, realitas terakhir, seperti dikatakan Jakson Toby berbau metafisik. Namun, Toby pun menyatakan bahwa Parsons tidak mengacu kepada sesuatu yang bersifat supernatural ketika berbicara tentang ketidakpastian, kegelisahan, dan tragedi kehidupan sosial yang menantang makna organisasi sosial.

Inti pemikiran Parson ditemukan di dalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling bergantung
- b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan
- c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur
- d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain
- e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya

- f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
- g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.

Perlu diingat bahwa empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam kehidupan nyata, keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.

4. Sistem sosial

Ritzy (2014: 120-121), konsep Parsons tentang sistem sosial berawal dari interaksi tinggi mikro antara ego dan alter ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan perhatian untuk menganalisis tingkat mikro ini, meski ia menyatakan bahwa gambaran sistem interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial.

Menurut Parsons sistem terdiri dari sejumlah aktor atau individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan, yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural.

Definisi ini mencoba berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultural. Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia tidak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Ia malah menggunakan status peran sebagai unit dasar dalam sistem.

Konsep ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran

ialah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikan fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas.

Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran (sekurang-kurangnya dilihat dari sudut posisi di dalam sistem sosial). Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya.

Di samping memusatkan perhatian pada status peran. Parsons memperhatikan sistem sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma, nilai. Namun dalam analisisnya mengenai sistem sosial, ia bukan semata-mata sebagai strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis. Ia menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial.

- a. Sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem yang lainnya.
- b. Menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
- c. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan.
- d. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya.
- e. Sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu,
- f. Bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan
- g. Untuk kelangsungan hidupnya sistem sosial memerlukan bahasa

5. Aktor dan sistem sosial

Ritzer (2014: 121-124), dalam menganalisis sistem sosial ini, Parsons sama sekali tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor dan struktur sosial. Ia sebenarnya menganggap integrasi pola nilai dan kecenderungan kebutuhan sebagai dalil dinamis fundamental sosiologi. Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem ialah proses internalisasi dan sosialisasi. Parsons tertarik pada cara

mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu.

Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan artinya norma dan nilai itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan. Seperti yang dinyatakan Parsons, kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor dalam sosialisasi), pada tingkat yang sangat penting harus menjadi fungsi dari struktur dan peran fundamental dan nilai dominan sistem sosial.

Umumnya Parsons menganggap aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak tak hanya mempelajari cara bertindak, tetapi juga mempelajari norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif, dimana disposisi kebutuhan (yang sebagian besar dibentuk oleh masyarakat) mengikat anak-anak kepada sistem sosial, dan sosialisasi itu menyediakan alat untuk memuaskan disposisi kebutuhan tersebut. Kecil sekali, atau tak ada ruang bagi kreativitas.

Kebutuhan untuk mendapatkan gratifikasi mengikat anak-anak kepada sistem sebagaimana adanya. Parsons melihat sosialisasi sebagai pengalaman seumur hidup. Karena norma dan nilai yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak cenderung bersifat sangat umum, maka norma dan nilai itu tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang mereka hadapi ketika dewasa. Karena itu, sosialisasi harus dilengkapi dengan serangkaian pengalaman sosialisasi spesifik sepanjang hidupnya. Norma dan nilai yang dipelajari ketika masih kanak-kanak cenderung tak berubah, dan sedikit penguatan, cenderung tetap berlaku seumur hidup.

Meski ada penyesuaian yang diakibatkan oleh sosialisasi seumur hidup, namun tetap ada sejumlah besar perbedaan individual di dalam sistem. Masalahnya ialah mengapa perbedaan individual ini biasanya

menjadi problem besar bagi sistem sosial, padahal sistem sosial memerlukan keteraturan?

- a. Sejumlah mekanisme pengendalian sosial dapat digunakan untuk mendorong ke arah penyesuaian. Tetapi, menurut Parsons, pengendalian sosial ialah pertahanan lapis kedua. Sebuah sistem sosial berjalan dengan baik bila pengendalian sosial hanya digunakan dengan hemat.
- b. Sistem sosial harus mampu menghormati perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu. Sistem sosial yang lentur lebih kuat ketimbang yang kaku, yang dapat menerima penyimpangan.
- c. Sistem sosial harus menyediakan berbagai jenis peluang yang memungkinkan berbagai macam kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan diri mereka sendiri tanpa mengancam integrasi sistem.

Sosialisasi dan kontrol ialah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangan, Individualitas dan penyimpangan diakomodasi, tetapi bentuk yang lebih ekstrem harus ditangani dengan mekanisme penyeimbangan ulang. Menurut Parsons, keteraturan sosial sudah tercipta dalam struktur sistem sosial itu sendiri.

6. Masyarakat

Ritzer (2014: 124), meskipun pemikiran tentang sistem sosial meliputi semua jenis kehidupan kolektif, suatu sistem sosial khusus dan yang sangat penting ialah semua jenis kehidupan kolektif. Satu sistem sosial khusus yang sangat penting ialah masyarakat yakni kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhannya sendiri, anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam kerangkanya sendiri.

Sebagai seorang fungsionalis struktural Parsons membedakan antara empat struktur dan sub sistem dalam masyarakat menurut fungsi AGIL yang dilaksanakan masyarakat itu. Ekonomi adalah sub sistem yang melaksanakan fungsi masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi dan alokasi. Melalui pekerjaan ekonomi

menyesuaikan diri dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan realitas eksternal.

Pemerintah (sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan dan memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem fiduciari (misalnya sekolah, keluarga) menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi) dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasikan kultur itu. Terakhir, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas kemasyarakatan (contoh hukum) yang mengorganisasikan berbagai komponen masyarakat).

Menurut Parsons, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial. Sebenarnya sistem kultural berada di puncak sistem tindakan Parsons dan ia menyebut dirinya determinis kultural.

7. Sistem kultural

Ritzer (2014: 125-126), Parsons membayangkan kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Atau menurut istilahnya sendiri, kultur ialah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur menengahi interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen dalam sistem yang lain. Jadi, di dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor.

Namun, sistem kultural tak semata-mata menjadi bagian sistem lain. Ia juga mempunyai eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol dan gagasan-gagasan. Aspek-aspek sistem kultural ini tersedia untuk sistem sosial dan sistem personalitas, tetapi tidak menjadi bagian dari kedua sistem itu.

Seperti yang dilakukan terhadap sistem yang lain, Parsons mendefinisikan kultur menurut hubungannya dengan sistem tindakan lain. Jadi kultur dipandang sebagai sebuah simbol yang terpola, teratur dan menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah

diinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan di dalam sistem sosial.

Karena sebagian besar bersifat subjektif dan simbolik, kultur dengan mudah ditularkan dari satu sistem ke sistem yang lain. Kultur dapat dipindahkan dari satu sistem sosial ke sistem sosial yang lain melalui penyebaran dan dipindahkan dari satu sistem kepribadian ke sistem kepribadian lain melalui proses belajar dan sosialisasi. Tetapi sifat simbolis kultur juga memberikan sifat lain, yakni kemampuan mengendalikan sistem tindakan lain. Inilah salah satu alasan mengapa Parsons memandang dirinya sendiri sebagai determinis kultur.

8. Sistem kepribadian

Ritzer (2014: 126-127), sistem kepribadian tidak hanya dikontrol oleh sistem kultural, tetapi juga oleh sistem sosial. Ini bukan berarti bahwa Parsons tak sependapat dengan pendapat tentang kebebasan sistem personalitas. Personalitas di definisikan sebagai orientasi dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisasi. Komponen dasarnya ialah disposisi kebutuhan.

Parsons dan Shils mendefinisikan disposisi kebutuhan sebagai unit-unit motivasi dari dorongan hati, yang merupakan kecenderungan bathiniah atau energi fisiologis yang memungkinkan terwujudnya aksi. Dengan kata lain, dorongan lebih baik dipandang sebagai bagian dari organisme biologis. Disposisi kebutuhan karenanya didefinisikan sebagai kecenderungan yang sama ketika kecenderungan itu bukan bawaan, tetapi diperoleh melalui proses aksi itu sendiri. Dengan kata lain, disposisi kebutuhan ialah dorongan hati yang dibentuk oleh lingkungan sosial.

Disposisi kebutuhan memaksa aktor menerima atau menolak objek yang tersedia dalam lingkungan atau mencari objek baru bila objek yang tersedia tidak dapat memuaskan disposisi kebutuhan secara memadai. Parsons membedakan antara tiga tipe dasar disposisi kebutuhan.

- a. Memaksa aktor mencari cinta, persetujuan dan sebagainya, dari hubungan sosial mereka.

- b. Internalisasi yang menyebabkan aktor mengamati berbagai standar kultural.
- c. Adanya peran yang diharapkan yang menyebabkan aktor memberikan dan menerima respons yang tepat.

BAB VI

SISTEM SOSIAL MENURUT PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONALISME

Menurut Kinloch (2005: 37), paradigma ini melihat masyarakat sebagai bagian sistem dari hubungan fungsional. **Bentuk awalnya** ialah pendekatan organik. Melihat cara kerja dari hukum-hukum alam dalam masyarakat ialah cara mekanis dan organik sebagai sistem sosial yang berkembang. **Bentuk kedua** pendekatan organik ialah pandangan bahwa masyarakat itu seperti halnya sebuah organisme. Masyarakat diibaratkan seperti organisme yang tidak berdiri sendiri melainkan bergabung dengan kelompoknya dalam sistem pembagian tugas, yang dalam kenyataannya berkaitan dengan jenis-jenis norma atau peraturan sosial yang mengikat individu pada keadaan sosialnya.

Menurut Nasikun (2013: 11), fungsionalisme struktural mula-mula sekali tumbuh dari cara melihat masyarakat yang menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis atau disebut *organismic approach*. Cara menganalogikan masyarakat dengan organisme biologi berkembang subur pada sebelum Auguste Comte memperkenalkan filsafat positifnya, dan oleh karena itu tidak mengherankan apabila pendekatan organisme muncul terutama pada awal pertumbuhan sejarah sosiologi.

Perwujudan yang paling penting dari pendekatan tersebut tergambar di dalam usaha untuk menerangkan hubungan antara konsep struktur dan fungsi,

yang sudah muncul dipemikiran Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan yang kemudian mencapai bentuk yang lebih jelas di dalam pemikiran para ahli antropologi Inggris seperti Bronislaw Malinowski dan Radcliffe-Brown. Pendekatan struktural fungsionalisme ini akhirnya mencapai tingkat perkembangan yang sangat besar di dalam pemikiran Talcott Parsons dan para pengikutnya.

Menurut Wirawan (2012: 41-), teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori integrasi, konsensus atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

General Agreements ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut sebagai *integration approach*, atau *structural functional approach* (fungsional struktural atau fungsionalisme struktural).

Pada mulanya, teori fungsional struktural diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuturkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis *phenomene sosial* dan kultural. Abidin dan Saebani (2014: 165-166), menjelaskan bahwa menurut para penganut fungsionalisme, struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut:

1. Masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus atau kesepakatan di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar)
2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat yang sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial lainnya

segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

Menurut Ritzer dan Goodman (2004: 118), dalam fungsionalisme struktural, istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya (atau akibatnya) terhadap struktur lain. Begitu pula, kita dapat meneliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur.

Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu. Meski fungsionalisme struktural mempunyai berbagai bentuk, fungsionalisme kemasyarakatan adalah pendekatan dominan yang digunakan dikalangan fungsionalis struktural sosiologi.

D. Karakteristik Perspektif struktural fungsional

Teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan. *Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan.

Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Asumsi dasarnya ialah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur ialah fungsional bagi

suatu masyarakat. Menurut Lawer, teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu:

- a. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi.
- b. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik
- c. Sistem sosial yang bersifat dinamis, penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh
- d. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan
- e. Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian
- f. Perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi
- g. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama

Sementara itu, Pieere L. Van dan Berghe, mengungkapkan tujuh ciri umum perspektif ini, yaitu:

- a. Masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, selaku sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Hubungan sebab dan akibat bersifat jamak dan juga timbal balik.
- c. Sistem sosial senantiasa dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu.
- d. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisir melalui mekanisme institusionalisasi.
- e. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang perubahan revolusioner.

- f. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi, dan melalui penemuan-penemuan internal.
- g. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kalangan fungsional memandang masyarakat manusia itu sebagai berikut:

- a. Masyarakat di pandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
- b. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan ke arah keseimbangan yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
- c. Setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus menerus, karena hal itu fungsional. Contoh: sekolah mendidik anak-anak, mempersiapkan para pegawai, mengambil tanggung jawab orang tua murid terutama pada siang hari, dan sebagainya.
- d. Contoh perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat. Dicontohkan bahwa, di daerah perbatasan Amerika terdapat beberapa penginapan dan hanya sedikit orang yang mampu menyewanya, timbullah suatu pola sikap yang penuh keramahan. Keluarga yang tengah bepergian pada waktu malam merupakan tamu yang disambut hangat oleh setiap penduduk. Mereka membawa berita-berita dan pelipur kebosanan, semnetara itu tuan rumah menyediakan makanan dan penginapan. tetapi dengan semakin bertambah mantapnya daerah perbatasan, pola keramah tamahan tidak lagi penting, sehingga kadarnya menurun. Jadi, pola-pola perilaku timbul untuk memenuhi kebutuhan dan akan hilang apabila kebutuhan itu berubah.

Masyarakat menurut model konsensus oleh Cohen, digambarkan sebagai berikut:

- a. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma dan nilai-nilai. Norma dan nilai merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial.
- b. Konsekuensi kehidupan sosial ialah komitmen.
- c. Masyarakat pasti kompak
- d. Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas
- e. Kehidupan sosial didasarkan pada kerja sama dan saling memerhatikan dan membutuhkan.
- f. sistem sosial tergantung pada konsensus
- g. Masyarakat mengakui adanya solidaritas yang absah
- h. Sistem sosial bersifat integratif
- i. Sistem sosial cenderung bertahan

Kesembilan hal di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Norma dan nilai sangat penting dalam model konsensus, karena nilai selalu berhubungan dengan yang diinginkan manusia. Nilai berhubungan dengan norma. Norma diciptakan dalam rangka mempertahankan suatu nilai tertentu. Sebagaimana diketahui, di dalam pendekatan fungsional terdapat prinsip yang paling penting yaitu adanya saling keterkaitan antar bagian-bagian dalam suatu sistem. Apabila saling keterkaitan ini diabaikan, maka mekanisme sistem itu akan terganggu.

Kemampuan suatu bagian untuk mengaitkan dirinya dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan disebut konsensus. Dengan demikian, konsensus merupakan kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus kemudian menjadi kesepakatan bersama antara bagian-bagian.

Dalam penjelasan Parsons, konsensus merupakan persyaratan fungsional. Adapun pada penjelasan Durkheim, norma diajarkan kepada anak-anak melalui proses sosialisasi, agar anak dapat hidup dengan mudah dalam masyarakat. Dengan proses sosialisasi, orang tua berusaha agar sistem yang ada itu tetap dipertahankan, karena masih dianggap dapat menjamin hubungan sosial. Usaha mempertahankan sistem sosial yang berlaku dalam bahasa Talcott Parsons disebut sebagai *latent pattern maintenance*.

Konsensus kehidupan sosial ialah komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai janji untuk bertanggung jawab dan setiap menepati janji. Jadi, dalam hubungannya dengan sistem sosial, begitu orang masuk ke dalam sistem sosial tertentu, dia harus benar-benar mengikuti sistem sosial tersebut. Kalau tidak, dia akan mengalami kesulitan untuk hidup bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Jika kita ingin hidup seperti orang Jawa, maka haruslah mengikuti nilai-nilai dan norma mereka. Hal inilah yang disebut dengan komitmen.

Konsep *adaptation* dan *integration* dalam sosiologi Talcott Parsons dapat menjelaskan hal tersebut dengan baik. Tingkat integrasi seseorang terhadap sistem sosial dapat diukur dengan melihat tingkat komitmennya. Semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu, semakin tinggi pula integrasi yang dicapainya. Komitmen berhubungan dengan tindakan yang merupakan konsekuensi dari norma dan nilai. Segi lain dari komitmen ialah tindakan yang konsekuen yang muncul dari dalam hati tanpa paksaan.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif.

Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada pada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar dijaga dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian.

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan sehingga melembaga. Pola-pola pelebagaan tersebut akan menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat,

setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Caranya dengan mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial.

Menurut Parsons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa dan lain-lain. Dengan proses ini anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol juga mencakup sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat bisa ditekan.

Mekanisme kontrol ini, antara lain: a) pelembagaan; b) sanksi-sanksi; c) aktivitas ritual; d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal; e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali; f) pelembagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial.

Menurut Nasikun (2013: 10), menurut pendekatan struktural fungsionalisme, masyarakat terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu general *agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota, masyarakat. Ia memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium.

Menurut Nasikun (2013: 34), suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain ialah suatu sistem dari tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Yang paling penting di antara berbagai standar penilaian umum tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

Prosesnya sebagai berikut: setiap orang menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku mereka kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu.

Pengaturan interaksi sosial di antara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi oleh karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial

menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu.

Equilibrium dari suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial penting dengan mana hasrat-hasrat para anggota masyarakat dapat dikendalikan pada tingkat dan arah yang menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial adalah mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial.

E. Pandangan Ahli tentang Struktural Fungsionalisme

Berikut penjelasan mengenai struktural-fungsionalisme menurut beberapa ahli, Wirawan (2012: 47-50)

1. Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf di samping dikenal sebagai ahli dalam perspektif konflik, dia juga memiliki andil dalam mengembangkan perspektif integrasi antara lain memahami masyarakat. Pokok-pokok pikiran Dahrendorf, antara lain:

- a. Setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng
- b. Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik
- c. Setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu
- d. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggota.

2. Robert K. Merton

Dengan mengacu pada pemikiran Max Weber, William I. Thomas dan Emile Durkheim, Merton berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial. Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga postulat itu sebagai berikut:

- a. Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur.
- b. Postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.
- c. Postulat indispensability, bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

Ketiga postulat ini menurut Merton memiliki tiga kelemahan, yaitu:

- a. tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas
- b. kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural.
- c. Kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional.

Merton menolak postulat-postulat fungsional yang masih mentah. Ia menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan indispensability. Ia juga menyebarkan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional serta fungsi manifes dan laten, yang dirangkai dalam rangka satu paradigma fungsionalis.

Menurut Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di dalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal dan tujuan organisasi.

Analisis paradigma Merton antara lain: a) *the functional unity postulat* dengan konsep integrasi sosial; b) *the issue of functional universality*, dengan konsep manifest dan laten, konsep *net balances of consequences*; 3) *the issue of indispensability*, dengan konsep alternatif fungsi. Paradigma Merton bersifat fungsional, disfungsional, dan fungsional universal. Hal ini menjadikan posisi individu tergantung pada sistem atau struktur.

Struktur yang mempunyai tujuan dapat melahirkan fungsi manifest dan fungsi laten. Pada posisi ini, Merton lebih banyak melihat hal-hal objektif dengan mengabaikan peristiwa-peristiwa yang subjektif. Merton mengkritik bahwa asumsi fungsionalisme cenderung konservatif dan lebih terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. Ia menginginkan adanya keseimbangan fungsional. Merton menunjukkan bahwa struktural fungsional memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat, sehingga mereka lebih menunjukkan kelakuan nonkonformis ketimbang konformis.

Hal ini secara implisit memperlakukan individu sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma atau aturan masyarakat individu yang tidak kreatif dalam aktivitasnya karena ia tidak independen. Merton lebih moderat karena ia menempatkan aktor sebagai entitas yang memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak sekedar robot yang otomatis, yang tindakannya ditentukan oleh struktur. Bagi Merton, struktur itu terintegrasi dan norma yang ada mengendalikan perilaku individu.

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Merton pada Tahun 1948 mendapat beberapa kritik, yaitu:

- a. Teori Merton masih bersifat konservatif yang terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Meskipun teori Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa fungsionalisme

struktural cenderung menjadi suatu teori sosial yang bersifat konservatif.

- b. Dengan menggunakan kekuatan yang bersifat deskriptif, pendekatan Merton terlalu memusatkan diri pada struktur masyarakat dan memberikan tekanan pada *status quo*, oleh sebab itu teori fungsionalisme Merton lebih merupakan studi tentang utopia daripada tentang realitas.

F. Kelemahan Teori Struktural Fungsionalisme

Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki, teori fungsionalisme tidak luput dari kelemahan. Kelemahan teori ini bersumber pada anggapan dasarnya, yaitu:

1. Anggapan dasar teori struktural fungsional terlalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial.
2. Anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau ekuilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Hal ini mengakibatkan para penganut struktural fungsional kemudian menganggap bahwa: disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat akibat dari pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar.

Berkaitan dengan itu, menurut Pierre L. Van den Berhe, anggapan dasar tersebut membuktikan bahwa teori struktural fungsional mengabaikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial.
2. Reaksi dari sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat *adjustive*
3. Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *visious cirle*
4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau equilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat akan nilai-nilai umum tertentu, mengakibatkan para penganut pendekatan fungsionalisme struktural kemudian menganggap bahwa disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan kemasyarakatan dalam bentuk tumbuhnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar.

Menurut Nasikun (2013: 17), anggapan semacam itu mengabaikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri, mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial.
2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat *adjustive*.
3. Suatu sistem sosial, di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat *visious icle*
4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner

Oleh karena mengabaikan kenyataan tersebut, maka pendekatan fungsionalisme struktural dipandang sebagai pendekatan yang bersifat reaksioner, dan oleh karenanya dianggap kurang mampu menganalisis masalah-masalah perubahan kemasyarakatan. Sistem sosial tidak selalu mampu

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, namun sering kali mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengalami disintegrasi. Sebaliknya, sistem sosial dapat juga menolak perubahan yang datang dari luar.

Suatu sisten sosial memang sering kali mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, dan oleh karenanya mampu mengikuti perubahan-perubahan tersebut tanpa mengalami disintegrasi sosial. Akan tetapi, sebaliknya, suatu sistem sosial juga menolak perubahan-perubahan yang datang dari luar, baik dengan cara tetap memelihara *status quo* maupun dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang bersifat reaksioner.

Keadaan demikian, dapat mengakibatkan bagian-bagian tertentu daripada sistem sosial tersebut menjadi disfungsional suatu hal yang akan mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sosial. Apabila faktor-faktor luar tersebut cukup kuat mempengaruhi bagian-bagian tersebut di atas tanpa diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian dari bagian-bagian yang lain, maka disfungsi dan ketegangan-ketegangan tersebut akan berkembang secara kumulatif serta mengundang terjadinya perubahan-perubahan sosial yang bersifat revolusioner.

Begitu juga, teori struktural fungsionalisme hanya memerhatikan pada kelompok konkret, kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial, sehingga dapat dianggap mengabaikan peran individu. Teori ini juga menganggap masyarakat bersifat harmoni, stabil, dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dalam pandangan neofungsionalisme teori struktural fungsionalisme harus mendapat autokritik dalam dunia observasi. Sekalipun demikian, teori struktural fungsional masih tetap didukung secara serius oleh kelompok minoritas yang signifikan secara sosiologis.

BAB VII

SISTEM SOSIAL MENURUT PENDEKATAN KONFLIK

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 64), pada hakikatnya teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Manurut Nasikun (2013: 18-19), apa yang kurang diperhatikan oleh para penganut fungsionalisme struktural. Berbeda dari fungsionalisme struktural, maka pandangan pendekatan konflik berangkat pada anggapan-anggapan dasar berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan perkataan lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain konflik ialah gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebenarnya tidak banyak berbeda dengan pandangan teori fungsional struktural, sebab keduanya sama-sama memandang sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara teori konflik dan fungsionalisme struktural terletak pada asumsi yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat.

Pandangan teori struktural fungsional menempatkan elemen-elemen sosial dalam keadaan saling berhubungan secara normal dan saling mendukung kelangsungan hidup sistem sosial, sementara teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebutlah yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan di antara elemen-elemen.

Teori ini dipaparkan dalam rangka memahami dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial terutama masyarakat yang kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka (terutama sumber daya ekonomi) di dalam masyarakat akan membangkitkan kompetisi di antara pelaku ekonomi yang memperebutkannya dan bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata.

Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kondisi semacam ini dalam banyak kasus kerap menyebabkan terjadinya konflik terbuka,

sebagaimana dinyatakan oleh Lockwood dalam Jonathan Turner, bahwa kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dalam mengejar kepentingannya masing-masing akan melahirkan mekanisme ketidakaturan sosial.

Dalam konteks ini, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan dalam bukunya *Sociology*, bahwa para teoritis konflik memandang suatu masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Berbeda dengan anggapan fungsionalis yang memandang nilai-nilai bersama atau konsensus anggota masyarakat menjadi suatu ikatan pemersatu, maka dalam pandangan teoritis konflik, konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk melaksanakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan.

Teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta sosial. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi. Teori ini mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marxian dan Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Marxian adalah memberi jalan keluar terjadinya konflik kelas pekerja. Adapun teori konflik Simmel berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, ketika orang frustrasi di kelas bawah atau kelas pekerja, mungkin bermusuhan dengan yang makmur. Begitu juga anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusuhan dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan.

A. Beberapa Proposisi teori Konflik

Penganut teori konflik menunjukkan proposisi yang sangat berbeda dengan kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan di dalam masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana suatu kelompok dengan yang lain saling bertarung memperebutkan *power* dan mengontrol bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka.

Jika kalangan fungsionalis melihat hukum dan undang-undang sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi sosial, maka para penganut teori konflik

melihat undang-undang itu tidak lain merupakan cara yang digunakan untuk menegakkan dan memperkuat suatu ketentuan yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lainnya. Menurut Alison dan Wallace, teori konflik memiliki tiga asumsi utama, di mana satu dengan yang lain saling berhubungan.

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu.
2. *Power* atau kekuasaan bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa. Asumsi kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. *Power* dipandang sebagai *core* dari *social relationship*. Analisis ini pada gilirannya memusatkan perhatiannya pada masalah distribusi sumber-sumber. Sebagian orang yang memperoleh atau menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperolehnya sama sekali.
3. Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang digunakan berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Ideologi itu merupakan aspek dari *groups interest*.

Wirawan (2012: 60-66), teori konflik banyak dikembangkan oleh para ahli, tetapi apabila dirunut secara historis, elemen-elemen dasarnya berakar pada pemikiran dua sosiolog besar, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Keduanya memang menunjukkan perbedaan pendapat, bahkan tak jarang saling memperdebatkan pokok-pokok pikirannya. Berikut ini disajikan beberapa preposisi teori konflik sebagai berikut:

1. Preposisi pertama

Semakin tidak merata distribusi sumber di dalam suatu sistem, akan semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan dan segmen lemah di dalam suatu sistem.

Dalam preposisi ini, Marx memandang bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi sumber, terutama kekuasaan, merupakan determinan konflik kepentingan objektif di antara mereka yang memiliki

kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Preposisi ini secara langsung mengikuti asumsi Marx bahwa di dalam semua struktur sosial, distribusi kekuasaan yang tidak merata pasti akan menimbulkan konflik kepentingan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

Menurut Marx, kesadaran akan konflik kepentingan dapat menyebabkan mereka yang lemah mulai mempertanyakan keabsahan pola distribusi sumber yang ada sekarang. Kondisi-kondisi yang mengubah keadaan untuk mempertanyakan masalah keabsahan distribusi sumber diintisarikan dalam preposisi-proposisi berikut.

2. Proposisi kedua

Proposisi ini dengan jelas menyatakan bahwa apabila segmen yang lebih lemah semakin menyadari akan kepentingan kolektif mereka, maka akan semakin besar kemungkinan mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi sumber yang tidak merata.

Proposisi tersebut masih diperinci lagi menjadi semakin spesifik sebagai berikut:

- a. Pengertiannya adalah apabila perubahan sosial yang diciptakan oleh segmen dominan semakin mengacaukan hubungan yang ada di antara segmen-segmen yang lebih lemah, maka semakin besar kemungkinannya segmen yang lemah itu menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.
 - b. Apabila praktik-praktik dari segmen dominan semakin menimbulkan disposisi keterasingan di antara segmen yang lebih lemah tersebut menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.
 - c. Pengertiannya adalah apabila para anggota segmen yang lebih lemah semakin bisa melontarkan keluhan mereka satu sama lain, maka semakin besar kemungkinannya mereka menjadi sadar akan kepentingan kolektif mereka.
- 1) Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah semakin renggang konsentrasi para anggota kelompok yang lebih lemah, maka

semakin besar kemungkinannya bahwa mereka akan melontarkan keluhan-keluhan mereka.

2) Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah apabila kalangan yang lebih lemah atau *subordinates* semakin memiliki akses untuk menjangkau media pendidikan, maka semakin bermacam-macam sarana bagi komunikasi mereka, dan semakin besar pula kemungkinan mereka melontarkan keluhan-keluhan mereka.

d. Apabila segmen yang lebih lemah dapat mengembangkan kesatuan sistem-sistem keyakinan, maka semakin besar kemungkinan mereka menjadi sadar terhadap kepentingan kolektif mereka.

1) Semakin besar kemampuan untuk merekrut atau membangkitkan juru bicara ideologis, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyatuan ideologi mereka.

2) Semakin kecil kemampuan kelompok-kelompok dominan untuk mengatur proses-proses sosialisasi dan jaringan komunikasi di dalam suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyatuan ideologi di kalangan *subordinate groups*.

3. Preposisi ketiga

Apabila segmen yang lemah di dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan kelompok mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka mempermasalahkan keabsahan distribusi sumber-sumber, dan semakin besar pula kemungkinan mereka mengorganisasi untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem.

Preposisi ini dipecah menjadi tiga anak preposisi sebagai berikut:

a. Semakin besar kesenjangan dari kalangan lemah bergeser dari dasar *absolute* ke dasar relatif, maka semakin besar kemungkinannya mereka mengorganisasi diri dan memulai konflik.

b. Apabila kelompok dominan semakin kehilangan kemampuannya untuk merumuskan kepentingan-kepentingan kolektif mereka, maka semakin besar kemungkinannya kelompok *subordinate* mengorganisasi dan mencetuskan konflik.

- c. Semakin besar kemampuan kelompok-kelompok *subordinate* mengorganisasi dalam mengembangkan struktur kepemimpinan, maka semakin besar kemungkinan mereka mengorganisasi diri dan memprakarsai konflik.

4. Preposisi keempat

Preposisi ini mengandung pengertian apabila segmen-segmen subordinate semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen dominan dan segmen yang dikuasai yang makin lemah akan semakin terpolarisasi.

- a. Preposisi ini mengisyaratkan bahwa apabila antara segmen dominan dan segmen yang dikuasai lebih rendah itu semakin terpolarisasi, maka akan semakin keras konflik yang terjadi.
- b. Semakin keras suatu konflik, maka akan semakin besar perubahan struktural suatu sistem dan redistribusi sumber-sumber.

Perubahan sosial oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, tetapi juga lebih daripada itu malahan dianggap bersumber di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, suatu hal yang kurang diperhatikan oleh para penganut pendekatan fungsionalisme struktural. Perubahan sosial yang demikian, terutama timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam setiap masyarakat.

Kenyataan intern tersebut bersumber di dalam kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas secara tidak merata, suatu hal yang senantiasa mengakibatkan timbulnya dua macam kategori sosial di dalam setiap masyarakat, yakni mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas.

Pembagian yang bersifat dikotomis serupa itu oleh para penganut pendekatan konflik dianggap menjadi sumber timbulnya konflik-konflik sosial di dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan pembagian otoritas yang demikian, di dalam dirinya sendiri, menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain. Pembagian otoritas yang demikian,

mengakibatkan mereka yang menduduki posisi sebagai pemegang otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas memiliki kepentingan-kepentingan, yaitu baik yang bersifat substansial maupun yang berlawanan satu sama lain.

Apa yang dimaksud dengan kepentingan di dalam artinya bersifat subjektif sebagaimana dirasakan oleh orang-orang, melainkan kepentingan yang secara objektif melekat di dalam kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian, apa yang mereka maksudkan dengan kepentingan di sini kurang lebih ialah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Karl Marx pada waktu ia mengatakan tentang *common situation* dengan *common interest*, suatu pengertian yang lebih bersifat sebagai gejala teoritis dari pada kenyataan yang bersifat empiris.

B. Teori-teori Konflik menurut Pendapat Ahli

Berikut beberapa teori konflik menurut beberapa pendapat ahli dalam Setadi dan Kolip (2013:367-373).

1. Teori konflik Marx

Beberapa pandangan Marx tentang kehidupan sosial yaitu:

- a. Masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan
- b. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan.
- c. Paksaan dalam berwujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi, perbudakan, kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan. Kesenjangan sosial terjadi dalam masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang bertumpu pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. Dengan demikian, titik tumpu dari konflik sosial ialah kesenjangan sosial.
- d. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka.
- e. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx yang memandang sarana dan alat produksi, yaitu kelas berjis dan proletar. Kelas berjis adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai modal dalam usaha. Kelas proletar ialah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi yang dalam hal ini ialah perusahaan sebagai modal dalam usaha. Kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan ekonominya tidak lain hanyalah menjual tenaganya.

Menurut Marx, masyarakat terintegrasi karena adanya struktur kelas di mana kelas berjis menggunakan negara dan hukum untuk mendominasi kelas proletar. Konflik antarkelas sosial terjadi melalui proses produksi sebagai salah satu kegiatan ekonomi di mana dalam proses produksi terjadi kegiatan pengeksploitasian terhadap kelompok proletar oleh kelompok berjis.

Perubahan sosial justru membawa dampak yang buruk bagi nasib kaum buruh karena perubahan sosial berdampak pada semakin banyaknya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyulitkan kehidupan kelompok proletar karena tuntutan akan lapangan pekerjaan semakin tinggi sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak bertamam.

Tingginya jumlah penawaran tenaga kerja akan berpengaruh pada rendahnya ongkos tenaga kerja yang diterimanya, sehingga kehidupan selanjutnya justru kian buruk. Sementara kehidupan kelompok kapitalis akan semakin berlimpah dengan segala macam kemewahannya. Gejala inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pangkal akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pangkal pada konflik sosial. Dengan demikian, akar permasalahan yang menimbulkan konflik sosial ialah karena tajamnya ketimpangan sosial berikut eksploitasinya.

Semakin memburuknya kehidupan kaum proletar dan semakin timpangnya kesenjangan ekonomi, maka gejala ini akan mendorong kaum proletar untuk melakukan perlawanan dalam bentuk revolusi sosial dengan tujuan menghapus kelas-kelas sosial yang dianggap sebagai bidang ketidakadilan.

Dalam teori Marx disebutkan bahwa keadilan sosial akan tercapai jika kehidupan masyarakat tanpa kelas, peran negara hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu sebagai alat pengendalian diktator proletariat atau kewenangan yang mewakili golongan proletar. Akan tetapi, di saat masyarakat komunis terbentuk maka peranan penyelenggara akan lenyap dengan sendirinya.

Peran negara hanya untuk melenyapkan eksistensi (keberadaan) eksploitasi kapitalistik, menengah konter revolusi (revolusi balik) dan mempengaruhi perubahan-perubahan ekonomi, yaitu meningkatkan produksi sampai pada tingkat di mana kebutuhan semua rakyat dapat dipenuhi semuanya. Wujud dari pemenuhannya ialah merelokasi (membagikan kembali) produksi dan distribusi barang ke tangan organisasi perwakilan seluruh rakyat.

2. Teori konflik Ralf Dahrendorf

Sebagaimana dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf bahwa masyarakat terbagi dalam dua kelas atas dasar pemilikan kewenangan yaitu kelas yang memiliki kewenangan (dominan) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi). Menurut teori ini, masyarakat terintegrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat banyak. Teori Dahrendorf justru merupakan kritik atas teori Marx, terutama menyangkut dua hal, yaitu:

- a. Teori Marx mencampurkan antara teori sosiologi yang empiris (dapat diuji kebenarannya secara faktual) dan konsep-konsep yang bersifat filosofis yang dapat diverifikasi (diuji) dengan fakta-fakta. Contoh masyarakat tanpa kelas merupakan kehidupan sosial terakhir yang membentuk kehidupan masyarakat tanpa kelas tidak pernah ada dalam kehidupan sosial.
- b. Kapitalisme berubah bukan melalui revolusi sosial, akan tetapi melalui proses transformasi. Dalam proses transformasi kapitalisme terdapat enam perubahan yang penting, yaitu:
 - 1) Pembagian komposisi kapital yaitu timbulnya penggolongan kelas berjenjang seperti pemilikan saham dan manajer perusahaan. Kelas

pemilik saham merupakan kelas pemilik sarana produksi. Dalam hal ini kepentingan pemilik saham dan manajer tidak selalu sama.

- 2) Pembagian komposisi buruh. Marx menganalisis buruh dalam masyarakat industri lebih bersifat homogen, akan tetapi kenyataan yang ada komposisi buruh ialah heterogen. Heterogenitas buruh tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu buruh yang berketarampilan, buruh yang tak berketarampilan, dan buru berketarampilan semi. Perbedaan tingkat keterampilan ini akan menimbulkan perbedaan kepentingan pula.
- 3) Tumbuhnya kelas menengah baru yang merupakan bagian dari rantai kewenangan (birokrasi dalam kelas ini baik yang berposisi tinggi maupun rendah sama-sama melaksanakan kewenangan sehingga posisi mereka secara langsung berkaitan dengan kelompok dominan dalam masyarakat dan pekerja yang menduduki posisi di luar hierarki kewenangan. Kelas kedua dari kelompok ini menduduki posisi yang lebih dengan dengan pekerja manual.
- 4) Meningkatnya mobilitas sosial baik secara intergenerasi dan antargenerasi. Mobilitas intergenerasi akan menghilangkan kelas-kelas sosial, sedangkan mobilitas antar generasi yang ditandai dengan adanya tingkat akan mengubah konflik kelompok menjadi kompetisi individual. Dengan demikian, maka perjuangan bersifat kompetisi antar individu untuk mendapatkan kedudukan terhormat di dalam kehidupan sosial.
- 5) Perbaikan hak-hak politik warga negara terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial warga negara. Di dalam perbaikan hak-hak politik rakyat ini terdapat kelompok-kelompok atau asosiasi-asosiasi politik yang menuntut hak-haknya kepada pemegang kekuasaan. Biasanya tuntutan tersebut berupa tuntutan kesejahteraan, jaminan keamanan, kepastian hukum, keadilan dan sebagainya. Biasanya realitas politik dalam kondisi tersebut menimbulkan dua kelompok besar, yang satu memberikan dukungan kepada pemerintah dan yang satunya melakukan tuntutan

kepada pemerintah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan nasib warganegara kepada negaranya.

- 6) Pelembagana konflik kelas dalam bentuk pengakuan prosedur arbitrase, diantaranya pengakuan hak-hak buruh untuk mogok kerja, prosedur penyelesaian perbedaan sebagai sarana untuk menegah konflik sosial dan sebagainya.

Menurut Dahrendorf, dalam setiap kehidupan masyarakat selalu ada asosiasi seperti negara, industri, partai, agama, klub-klub, dan sebagainya. Dalam setiap asosiasi akan selalu ada dua kelas yaitu kelas yang mempunyai kewenangan (dominasi) dan yang tak memiliki kewenangan (subjeksi). Dengan demikian, jika dalam kehidupan sosial terdapat 100 asosiasi, pasti akan terdapat 200 kelas sosial. Akan tetapi asosiasi yang dimaksud dalam teori ini ialah kelompok yang mempunyai struktur kewenangan dalam ruang lingkup luas seperti negara, industri, partai politik dan agama. Yang dimaksud kewenangan ialah hak yang sah untuk memberikan perintah kepada orang lain. Perbedaan antara kewenangan dengan kekuasaan menurut Weber ialah bahwa sumber-sumber pengaruh pada kewenangan bukan dari jabatannya sendiri, sedangkan sumber kekuasaan ialah berasal dari orang yang menduduki jabatan tersebut.

Contoh, jika seorang bupati memerintah para pegawai di lingkungan Pemda, bukan seorang bupati yang memerintah tetapi jabatannyalah yang memerintah. Adanya dominasi dari kelas yang mempunyai kewenangan berasal dari hak untuk memberi perintah itu, sedangkan adanya subjeksi itu karena tidak adanya kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, konflik akan timbul dalam kehidupan sesuai karena adanya pembagian kewenangan yang tidak merata,

Ketidakmerataan itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok yang memiliki kewenangan dan tidak memiliki kewenangan. Konflik antara dua kelompok tersebut akan terjadi ketika kelas yang memiliki kewenangan tersebut berusaha mempertahankan *status quo* pola-pola kewenangan yang ada (yaitu tetap mendominasi), sedangkan

kelas yang tidak memiliki kewenangan tersebut berusaha mengubah statusnya atau menentang status pemilik kewenangan.

Dari kedua teori konflik sosial tersebut dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok-pokok dasar dari teori yaitu:

- a. Kehidupan sosial selalu berada dalam proses perubahan, sehingga perubahan merupakan gejala yang bersifat permanen yang mengisi setiap perubahan kehidupan sosial. Gejala perubahan kebanyakan sering diikuti oleh konflik baik secara personal maupun secara interpersonal.
- b. Setiap kehidupan sosial selalu terdapat konflik di dalam dirinya sendiri, oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang permanen yang mengisi setiap kehidupan sosial. Gejala konflik akan berjalan seiring dengan kehidupan sosial itu sendiri, sehingga lenyapnya konflik juga akan bersamaan dengan lenyapnya kehidupan sosial.
- c. Setiap elemen dalam kehidupan sosial memberikan andil bagi perubahan dan konflik sosial, sehingga antara konflik dan perubahan merupakan dua variabel yang saling berpengaruh. Elemen-elemen tersebut akan selalu dihadapkan pada persamaan dan perbedaan sehingga persamaan akan mengantarkan pada akomodasi sedangkan perbedaan akan mengantarkan timbulnya situasi konflik.
- d. Setiap kehidupan sosial masyarakat akan terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi sejumlah kekuatan-kekuatan lain. Dominasi kekuatan secara sepihak akan menimbulkan konsolidasi akan tetapi mengandung simpanan benih-benih konflik yang bersifat laten, yang sewaktu-waktu akan meledak menjadi konflik manifes.

3. Teori konflik Jonathan Turner

Jonathan Turner merumuskan kembali teori konflik dalam tiga pandangannya tentang konflik, yaitu:

- a. Tidak ada definisi yang jelas tentang gejala mana yang termasuk konflik itu (yakni apakah yang termasuk konflik dan yang bukan

konflik), sebab ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah konflik seperti permusuhan, perang, persaingan antagonisme, tekanan, pertengakaran, perbedaan pendapat, kontroversi, kekejaman, revolusi, perselisihan, dan sebagainya. Persoalannya ialah istilah manakan yang dimaksud sebagai konflik di dalam teori konflik itu sendiri.

- b. Teori konflik tampak mengambang karena tidak menjelaskan unit analisis tentang konflik, apakah konflik tersebut terjadi antar individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas sosial atau konflik antarbangsa.
- c. Teori konflik sulit melepaskan dari teori fungsional, karena pada dasarnya teori ini merupakan reaksi dari teori fungsionalisme struktural. Keadaan ini membuat teori konflik jauh dari akarnya yaitu teori Marxisme.

Berangkat dari pemikiran itulah Jonathan Turner lalu memusatkan perhatiannya pada konflik sebagai proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih. Ia menjelaskan dua tahap menuju konflik terbuka yaitu:

- a. Sistem sosial terdiri dari unsur-unsur atau kelompok-kelompok yang saling berhubungan satu sama lain
- b. Di dalam unit-unit atau kelompok-kelompok itu terdapat ketidakseimbangan pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan
- c. Unit-unit atau kelompok-kelompok yang tidak berkuasa tidak mendapat bagian dari sumber-sumber penghasilan mulai mempertanyakan legitimasi sumber itu
- d. Pertanyaan akan legitimasi itu membawa mereka kepada kesadaran bahwa mereka harus merubah sistem alokasi kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan itu demi kepentingan mereka.
- e. Kesadaran tersebut menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah

- f. Kemarahan tersebut sering kali meledak begitu saja atau cara yang tidak terorganisasi
- g. Keadaan yang demikian menyebabkan mereka semakin tegang
- h. Ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa
- i. Akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Tingkatan kekerasan dalam konflik sangat tergantung kepada kemampuan masing-masing pihak yang bertikai untuk mendefinisikan kembali kepentingan mereka secara objektif atau kemauan masing-masing pihak untuk menanggapi, mengatur dan mengontrol konflik itu.

Dalam kesembilan tahap tersebut, Turner merumuskan kembali proses terjadinya konflik dalam sebuah sistem sosial atau masyarakat. Pada akhirnya konflik yang terbuka antara kelompok-kelompok yang bertikai sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing pihak untuk mendefinisikan kepentingan mereka secara objektif dan untuk menangani, mengatur dan mengontrol kelompok itu.

4. Teori konflik Lewis Coser

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser sering kali disebut teori fungsionalisme konflik, karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul *The Function of Social Conflict*, Lewis Coser memusatkan perhatiannya pada fungsi konflik.

Dari judul itu dapat dilihat bahwa uraian Coser terhadap konflik bersifat fungsional dan terarah kepada pengintegrasian teori konflik dan fungsionalisme struktural. Tetapi ia juga harus menguraikan akibat-akibat dari keteraturan terhadap konflik dan ketidakseimbangan. Misalnya, penekanan yang terlalu banyak terhadap peraturan bisa menimbulkan ketidakstabilan. Pemerintahan yang totaliter, misalnya sekalipun menekankan aturan yang ketat bisa menimbulkan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Namun, Lewis tidak sempat mendalami aspek-aspek itu.

Salah satu hal yang membedakan Coser dari pendukung teori konflik lainnya ialah bahwa ia menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok, padahal pendukung teori konflik lainnya memutuskan analisis mereka pada konflik sebagai penyebab perubahan sosial.

Lewis Coser menyebutkan beberapa fungsi konflik:

- a. Konflik dapat memperkuat solidaritas sekelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Dalam hal ini, ia sebenarnya mengembangkan apa yang sudah dikatakan oleh George Simel sebelumnya, misalnya negara Indonesia pada masa Soekarno dengan politik ganyang Malaysia atau penciptaan label-label pada masa Orba, seperti PKI, Subversif, GPK.
- b. Konflik dengan kelompok lainnya dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa mengantarkannya kepada aliansi-aliansi dengan kelompok-kelompok lainnya. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan negara Arab telah menyebabkan Israel menjalin hubungan begitu erat dengan Amerika Serikat. Bisa saja terjadi bahwa kalau perdamaian jangka panjang antara negara Arab dan Israel tercapai, maka ikatan antara Israel dan Amerika menjadi Kendur.
- c. Konflik juga menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan secara aktif. Misalnya, sesudah mahasiswa memprotes rezim Orde Baru, pada kehancurannya banyak orang tampil ke depan dan dianggap sebagai pejuang reformasi. Tidak sedikit tokoh yang barangkali tidak dikenal sebelumnya tetapi berperan aktif pada masa peralihan itu.
- d. Konflik juga bisa berfungsi untuk komunikasi. Sebelum terjadi konflik anggota-anggota masyarakat akan berkumpul dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Lewat tukar menukar pikiran bisa mendapat gambaran yang lebih jelas akan apa yang harus dibuat entah untuk mengalahkan lawan atau untuk menciptakan kedamaian.

- e. Secara teoritis fungsionalisme struktural dan teori konflik kelihatan bisa didamaikan dengan menganalisis fungsi-fungsi dari konflik sebagaimana diuraikan oleh Lewis Coser ini. Tetapi harus diakui bahwa dalam banyak hal, konflik juga menghasilkan ketidakberfungsian, tidak seberapa dibandingkan dengan ketidakstabilan atau kehancuran yang disebabkan oleh konflik itu.

5. Teori konflik . Wright Mills

C.Wright Mills yakin bahwa untuk menciptakan suatu masyarakat yang baik di atas dasar pengetahuan, dan pembentukan tersebut merupakan tanggung jawab intelektual peraya pada sosialisasi liberal dan mendukung revolusi di Cuba serta mengutuk reaksi Amerika atas revolusi di Cuba itu karena yakin bahwa revolusi di Cuba akan menyatukan sosialisme revolusioner dan kebebasan. Tema-tema yang dibahas secara khusus dalam Sosiologi Mills adalah hubungan antara alienasi dan birokrasi dan kekuasaan kaum elite.

a. Alienasi Birokrasi

Mills berpendapat bahwa kesulitan ekonomi yang dialami oleh pekerja di masa lampau telah diganti dewasa ini oleh ketidakpuasan psikologis yang berakar pada alienasi kaum pekerja dari apa yang mereka kerjakan. Ia melihat para pekerja di kantor apatis, takut, dan dibentuk oleh kebudayaan massa. Dalam masyarakat modern, mereka yang mempunyai kekuasaan seringkali menggunakan kekuasaan itu secara tersembunyi guna melakukan manipulasi-manipulasi. Oleh karena itu, Mills menilai bahwa birokrasi itu identik dengan manipulasi. Ia mengatakan bahwa sistem rasional menyembunyikan kekuasaan mereka sehingga tak seorang pun yang mengerti perhitungan mereka. Bagi birokrasi, dunia adalah objek manipulasi.

Dalam dunia bisnis dan pemerintahan yang besar jumlah kelompok pekerja halus atau jumlah pekerja di kantor semakin berkembang. Mereka hidup bukan dengan membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu sebagaimana halnya petani, nelayan, atau tukang, melainkan dengan mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh orang lain dan menjadikan

sumber keuntungan. Misalnya, petani menghasilkan kopi. Kemudian para pedagang mengambil kopi tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Semakin orang yang memiliki sendiri alat-alat produksi dan mengontrol sendiri pekerja mereka. Masyarakat yang stabil dan nilai-nilai tradisional perlahan-lahan menghilang.

Mills mengecam kapitalisme dan birokrasi modern karena keduanya menyebabkan alienasi dalam diri para pekerja atau karyawan di dalam proses pekerjaan dan di dalam hasil-hasil kerja mereka sendiri. Hal ini tampak jelas dalam diri pekerja-pekerja halus seperti para pramuniaga yang kepribadiannya menjadi komoditas yang biasanya dijual atau yang keramatahman dan sopan-santun adalah bagian dari mata pencaharian untuk bisa hidup. Ia mengatakan bahwa dalam semua pekerjaan yang melibatkan usaha penjualan, kepribadian dan keikhlasan seseorang menjadi bagian dari produksi dan hal tersebut menciptakan alienasi yang luar biasa.

Penekanan Mills terhadap alienasi muncul dari keprihatinannya terhadap hubungan antara karakter dan struktur sosial. Menurutnya, pekerjaan menjual yang dilakukan oleh pramuniaga menjauhkan mereka dari dirinya sendiri dan diri orang lain karena mereka memandang semua hubungan bersifat manipulatif.

Dalam analisis yang sama dengan analisis Frankfurt School, Mills berpendapat bahwa secara politis orang bersikap apatis karena penekanan media massa yang terlalu berlebihan pada hal-hal yang bersifat basa-basi dan karena orang struktur sosial memperkuat tendensi-tendensi psikologis yang membuat masyarakat modern bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat fasisi atau totaliter.

Menurut Mills, lingkungan kerja orang yang terfragmentasi menyebabkan mereka tidak mengingat dengan sungguh-sungguh bagaimana masyarakat bekerja dan percaya bahwa pemerintah yang campur tangan akan menyebabkan rasa tidak aman tanpa nilai-nilai

tradisional yang tinggi dengan orang-orang yang secara permanen emas adalah sangat rapuh.

b. Kekuasaan Kelompok Elite

Menurut Mills, Amerika dikuasai oleh sekelompok elite yang berkuasa, yang terdiri dari orang-orang yang memproduksi posisi-posisi dominan dalam bidang politik, militer dan ekonomi. Ketiga bidang kekuasaan itu mempunyai hubungan satu sama lain sehingga orang-orang yang berkuasa pada bidang itu bekerja sama untuk menciptakan kelompok elite yang berkuasa di Amerika.

Karena itu tidaklah mengherankan seorang pejabat tinggi militer bisa menjadi seorang kapitalis dan seorang kepala pemerintahan bisa menerapkan gaya pemerintahannya seperti tentara. Mills percaya bahwa kekuasaan bisa didasarkan atas faktor-faktor lain dan bukan pada hak milik semata-mata, namun demikian, kepentingan yang sama pada kelompok elite itu telah mempersatukan mereka dan mempertahankan ekonomi perang.

Analisis Mills ini sejalan dengan dan memperkuat sikap masyarakat Amerika yang tampak dalam kekacauan presiden Eisenhower terhadap para pengusaha dan pejabat militer yang mencampuri adalah kepentingan ekonomi dan militer. Banyak ilmuwan sosial yang sengaja dengan anggapan bahwa kehidupan ekonomi tercampur dengan kegiatan pemerintah yakni mereka yang mempunyai hubungan dengan orang-orang di ekonomi dan pemerintahan. Kerja sama antara dua kelompok itu bukan saja tampak dalam bantuan yang diberikan militer melainkan juga dalam hal keterlibatan pemerintahan yang semakin besar dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Secara umum bisa dikatakan bahwa Mills sependapat dengan Sosiologis Marxis dengan kelompok teori elite yang cenderung melihat masyarakat terbagi secara tajam antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa. Ia juga sependapat dengan Marxis dan Neo-Marxis tentang alienasi, efek dari struktur sosial terhadap kehidupan, dan manipulasi manusia oleh media.

Tetapi berbeda dengan yang lain, Mills tidak melihat hak milik pribadi sebagai satu-satunya sumber kejahatan di dalam masyarakat. Menurut Mills kepemilikan alat-alat produksi dalam skala kecil dan kenyataan akan adanya sekelompok pengusaha kecil yang mandiri berguna untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan. Mills sangat menyayangkan semakin lenyapnya kelompok petani dan pengusaha kecil yang di masa lalu banyak ditemukan di berbagai tempat di Amerika Serikat.

BAB VIII

MASYARAKAT INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT MAJEMUK

A. Gambaran Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk pada Masa Hindia-Belanda Menurut Furnivall

Nasikuk (2013: 32-37), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. *Secara horizontal*, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. *Secara vertikal*, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut. Berikut dipaparkan konsep masyarakat majemuk Indonesia menurut Furnivall tersebut.

Menurut Furnivall, masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, merupakan suatu masyarakat majemuk yakni suatu masyarakat yang terdiri

dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.

Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia disebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, kendati jumlahnya semakin bertambah-tambah terutama pada akhir abad ke-19, sekaligus adalah penguasa yang memerintah sejumlah besar orang-orang Indonesia pribumi (biasa disebut juga sebagai golongan pribumi) yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan orang-orang Tioangha sebagai golongan terbesar diantara orang-orang Timus Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas.

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas di antara masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu ialah tidak adanya kehendak bersama. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai satu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh.

Perhatikanlah keadaan berikut ini:

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, akan tetapi mereka tidak tinggal menetap di sana. Kehidupannya semata-mata berada di sekitar pekerjaannya itu, dan mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka.

Banyak pula diantara mereka yang tinggal di Indonesia sampai 20 tahun atau lebih lama, akan tetapi sesudah itu mereka kembali ke negerinya untuk menghabiskan sisa hidupnya di negeri asal mereka dengan pengetahuan Indonesia tidak lebih dari pengetahuan mereka untuk pertama kali menginjak bumi Indonesia. Orang-orang Timur Asing, terutama orang-orang Tionghoa, seperti halnya dengan orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

Sementara itu kehidupan orang-orang Pribumi, seperti halnya dengan kehidupan orang-orang Belanda dan orang-orang Tionghoa, tidaklah utuh pula. Kehidupan mereka tidaklah lebih dari kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas dasar sistem kasta tanpa ikatan agama.

Orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Indonesia Pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan dan memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Hasilnya sebagaimana telah disebutkan ialah berupa masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kehendak bersama.

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama tersebut menemukan pernyataan di dalam bentuk tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Setiap masyarakat politik, demikian menurut Furnivall, dari kelompok nomad sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui suatu waktu periode tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri: membentuk keseniannya sendiri, baik dalam bentuk sastra, seni lukis, maupun musik serta membentuk berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari: berupa terbentuknya sistem pendidikan informal di mana setiap anggotanya terisolir sebagai anggota dari masyarakat tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan keagamaan, politik, dan keindahan, pendek kata semua kebutuhan kultural, memiliki aspek ekonomi, oleh karenanya semuanya akhirnya menyatakan diri secara terorganisir hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi, yakni sebagai permintaan atau *demand* masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi di dalam masyarakat majemuk, seperti halnya masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, permintaan masyarakat tersebut tidaklah terorganisir, melainkan bersifat sektoral, dan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan Pribumi, masing-masing memiliki pola permintaannya sendiri.

Tidak hanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat menjadi sumber yang membedakan karakter ekonomi majemuk dari suatu masyarakat majemuk, dengan ekonomi tunggal dari suatu masyarakat yang bersifat homogeneous. Apabila proses ekonomi di dalam suatu masyarakat yang bersifat homogeneous dikendalikan oleh adanya kehendak bersama (*common will*), maka hubungan-hubungan sosial di antara elemen-elemen masyarakat majemuk sebaliknya semata-mata dibimbing oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang material sebagai tujuan utama daripada kehidupan masyarakat.

Oleh karena penggolongan masyarakat terjadi atas dasar perbedaan ras, maka pola produksi pun terjadi atas dasar perbedaan ras pula, dalam mana masing-masing ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri. Orang-orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang perkebunan orang-orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara di antara keduanya. di dalam setiap masyarakat memang selalu terdapat konflik kepentingan antara kota dan desa, antara kaum modal dan kaum buruh, akan tetapi lebih-lebih di dalam masyarakat majemuk maka konflik kepentingan tersebut menemukan sifatnya yang lebih tajam oleh karena perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan ras.

Apa yang diuraikan di atas merupakan gambaran dari keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda sebagaimana dituturkan oleh Furnival. Keadaan masyarakat Indonesia pada masa kini sudah jauh berbeda dari keadaan tersebut, dan oleh sebab itu pengertian masyarakat majemuk sebagaimana digambarkan oleh Furnivall harus tidak dapat begitu saja diperlakukan untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Namun demikian, dengan mengikuti beberapa modifikasi atas pengertian tersebut sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli ilmu kemasyarakatan dari generasi sesudah Furnivall, konsep masyarakat majemuk masih tetap dapat kita pergunakan untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa kini.

B. Pengertian Masyarakat Majemuk

Nasikun (2013: 37-40), dengan mengabaikan perwujudan yang konkret, kita dapat menangkap esensi dari konsepsi Furnivall yang terlepas dari ruang

dan waktu. *Suatu masyarakat majemuk, demikianlah apa yang dapat kita simpulkan dari konsepsi Furnivall yakni suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.*

Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya.

Atau kalau kita ingin meminjam istilah Clifford Geertz, maka *masyarakat majemuk* ialah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van Den Berghe menyebutkan beberapa *karakteristik* berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbag-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
4. Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain

5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
6. Serta adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain.

Oleh karena sifat-sifat yang demikian itulah, maka Van Den Barghe menganggap masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu di antara dua jenis masyarakat menurut model analisis Emile Durkheim. Suatu masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, akan tetapi sekaligus juga tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi.

Yang disebut pertama merupakan suatu masyarakat yang terbagi-bagi kelompok yang biasaya merupakan kelompok-kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, akan tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogeneous. Yang disebut kedua, sebaliknya, merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi yang tinggi dengan banyak lembaga yang bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain.

Di dalam artian yang demikian itulah, maka masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat majemuk. Hanya saja perlu kita sadari bahwa berbeda dari Furnivall yang mengartikan pluralitas masyarakat Indonesia di dalam konteks masyarakat kolonial yang membedakan golongan Eropa, Tionghoa dan Pribumi,

Maka pluralitas masyarakat Indonesia sesudah masa revolusi kemerdekaan harus dimengerti di dalam konteks perbedaan-perbedaan internal di antara golongan pribumi. Pengertian pluralitas masyarakat Indonesia yang membedakan golongan Eropa, Tionghoa, dan Pribumi sebaaimana yang dikemukakan oleh Furnivall memang cukup valid untuk melihat masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda.

Akan tetapi sejak Indonesia memperoleh kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, golongan Eropa yang saat itu menempati kedudukan yang sangat penting di dalam masyarakat Indonesia, kemudian terlempar ke luar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, pluralitas yang terdapat di

dalam golongan pribumi itu sendiri memperoleh artinya yang lebih penting daripada apa yang dikemukakan oleh Furnivall.

C. Sebab-sebab Terjadinya Masyarakat Majemuk di Indonesia

Nasikun (2013: 40-58), ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi, yaitu:

1. Keadaan geografi negara Indonesia

Keadaan atau geografi yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau terserak di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari Timur ke Barat dan lebih 1.000 mil dari Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pluralitas suku bangsa di Indonesia.

Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran dari daerah yang sekarang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2.000 tahun sebelum Masehi, keadaan geografis serupa itu telah memaksa mereka untuk harus tetap tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain. Isolasi geografis yang di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang lain.

Tiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan pengecualian yang sangat kecil mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang sering kali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di masyarakat.

Tentang berapa jumlah suku bangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama diantara para ahli ilmu kemasyarakatan. *Hildred Geertz, misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia*, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. *Skinner menyebutkan*

adanya lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama.

Lebih daripada sekitar menyebutkan banyaknya suku bangsa di Indonesia, Skinner menggambarkan juga perbandingan besarnya suku bangsa suku bangsa tersebut. Beberapa suku bangsa yang tergolong paling besar di antaranya, demikian menurut Skinner yaitu Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. Masing-masing memiliki jumlah anggota 36 juta, 12, 5 Juta, 2,7 juta, dan 2,4 juta orang pada tahun 1956. Delapan suku bangsa yang lain memiliki jumlah anggota antara 750.000 sampai 2 juta orang pada tahun yang sama, termasuk Bali dengan 1,6 juta orang, dan Batak toba dengan 950.000 orang, sementara Sumbawa memiliki jumlah anggota yang di sekitar 135.000 orang.

Sumber lain yang mengutip data-data dari buku statistik Hindia-Belanda, menggambarkan persentase besarnya berbagai suku bangsa di Indonesia pada tahun 1930 sebagai berikut: Jawa 47,02 persen, Sunda 14,53 persen, Madura 7,28 persen, Minangkabau 3,36 persen, Bugis 2,59 persen, 7, 28 persen, Minangkabau 3,36 persen, Bugis 2,59 persen, Batak 2,04 persen, Bali 1,88 persen, Jakarta (Betawi) 1,66 persen, Melayu 1,61 persen, Banjar 1,52 persen, Aceh 1,41 persen, Palembang 1,30 persen, Sasak 1,12 persen, Dayak 1,10 persen, Makasar 1,09 persen, Toraja 0,94 persen, dan lain-lain 9.54 persen.

Kendati angka-angka tersebut dimaksudkan menggambarkan keadaan puluhan tahun yang lalu, akan tetapi dengan perkiraan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan suku bangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.

Dalam pada itu, mengikuti pengertian suku bangsa sebagaimana tersebut digolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu suku bangsa di antara berbagai suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan angka statistik tahun 1956 yang dapat kita baca di dalam laporan Biro Pusat Statistik, dan berdasarkan perkiraan penambahan penduduk golongan Tionghoa sebesar 3 persen, serta dengan mengingat kurang lebih 100.000 orang Tionghoa yang

kembali ke negeri Tiongkok selama tahun 1959 dan 1960, Skinner memperkirakan jumlah orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia pada tahun 1961 ada kira-kira 2, 45 juta orang.

Sementara orang-orang Indonesia pribumi pada waktu itu ada kira-kira 90.882 juta orang. Sekalipun jumlah orang-orang Tionghoa tersebut tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah orang-orang pribumi, akan tetapi kedudukan mereka yang sangat kuat di dalam bidang ekonomi sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan suku-suku bangsa yang lain yang sebagai keseluruhan biasanya dipandang sebagai golongan pribumi.

2. Faktor yang kedua yakni kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera pasifik menyebabkan banyaknya pengaruh dari berbagai macam kebudayaan Hindhu-Budha dan Islam

Keadaan ini sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama sekali menerima pengaruh berbagai kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing.

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa kebudayaan Hindhu dan Budha dari India sejak 400 tahun sebelum Masehi. Hinduisme dan Budhaisme, pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta, lebur bersama-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup lebih dahulu sebelum itu. Namun demikian, terutama di pulau Jawa dan pulau Bali pengaruh agama Hindhu-Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini.

Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh agama Islam terutama memperoleh tanah tempat berpijak yang kokoh di daerah-daerah dimana pengaruh Hindhu-Budha tidak cukup kuat.

Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimana pengaruh agama Hindhu-Budha tidak cukup kuat. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur,

dimana pengaruh agama Hindu-Budha telah tertanam cukup kuat, suatu kepercayaan keagamaan yang bersifat *syncretic* diatur oleh sebagian besar penduduk di antara kedua daerah tersebut, dimana kepercayaan animisme, dinamisme, bercampur dengan kepercayaan Hindu-Budha dan Islam.

Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke-17 dan terutama pada akhir abad ke-19 itupun tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih tetap merupakan daerah pengaruh agama Hindu.

Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku, suatu jenis barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu.

Kegiatan missionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. ketika bangsa Belanda berhasil mendesak Portugis ke luar dari daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama katolik segera digantikan pula oleh pengaruh agama Protestan.

Namun demikian, sikap Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama dibandingkan dengan bangsa Portugis telah mengakibatkan pengaruh agama protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindhu, sekalipun Belanda berhasil menanamkan politiknya tidak kurang dari 350 tahun lamanya.

Hasil final daripada semua pengaruh kebudayana tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.

Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya golongan Islam Modernis terutama di daerah-daerah yang strategis berada di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reforasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisionalis di daerah-daerah pedalaman, dan golongan Kristen

(Katolik dan Protestasn) di daerah-daerah Maluku, nusantegara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindhu-Bali (Hindu-Dharma) terutama di pulau Bali.

Di dalam pulau jawa kita temukan golongan Islam konservatif-tradisionalis di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan golongan Islam nominal yang biasa disebut golongan abangan terutama di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta golongan minoritas kristen yang tersebar hampir di setiap daerah perkotaan di Jawa.

Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda di Indonesia, yakni: daerah pertanian sawah yang terutama banyak kita jumpai di daerah Jawa dan Bali, serta daerah pertanian ladang yang banyak kita jumpai di daerah luar pulau Jawa. Perbedaan lingkungan ekologis tersebut mnejadi penyebab bagi terjadinya kontras antara Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial dan budaya.

Data penyebaran penduduk pada tahun 1930 dan 1961 memperlihatkan kontras yang pertama. Pada tahun 1930 kita lihat bahwa pulau Jawa dan Madura yang hanya memiliki luas daerah kurang dari 7 persen luas daerah Indoensia, memiliki jumlah penduduk hampir 70 persen jumlah seluruh penduduk Indonesia. Sekalipun 1961 persentase tersebut menurun menjadi kira-kira 65 persen dari jumlah penduduk seluruh Indonesia, namun penurunan tersebut tidak terlalu mengubah keadaan.

Kontras tersebut tidak saja mempengaruhi persoalan pengadaan pangan, akan tetapi lebih daripada itu, bahkan mempengaruhi keseluruhan pola perekonomian di kedua daerah tersebut. Pulau Jawa dan Madura yang hanya memiliki luas daerah 132.174.00 kilometer persegi dengan kepadatan 314 pada tahun 1930 dan 455 pada tahun 1961, tidak memungkinkan pemilikan tanah pertanian yang cukup luas. Demikian sempitnya pemilikan tanah tersebut sehingga setiap petani di pulau Jawa rata-rata hanya memiliki

tanah kurang dari setengah hektar, suatu luas tanah yang sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar sekalipun.

Sebagai akibatnya, maka kebanyakan petani di Jawa hanya mampu mengolah tanahnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sementara rekan-rekannya di luar Jawa mampu melemparkan produksi pertaniannya untuk keperluan pasar. Data tersebut memperlihatkan pada tahun 1955-1956 hampir kira-kira 71 persen devisa Indonesia dihasilkan oleh ekspor dari pulau Sumatera dan 17 persen dari daerah-daerah di luar Jawa, sementara lebih dari 80 persen dari jumlah tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi dan kapital, bahan makanan dan bahan-bahan dasar bagi penduduk di pulau Jawa. Data perdagangan luar negeri tahun 1958 memperlihatkan gambaran yang kurang lebih serupa pula.

Angka-angka tersebut memberikan kesan akan ketergantungan Jawa kepada luar Jawa di dalam bidang ekonomi, sekalipun apabila kita memperhitungkan juga angka-angka perdagangan dalam negeri, maka ketergantungan tersebut sedikit banyak bersifat timbal balik pula.

Dari angka-angka tersebut, kelihatan bahwa secara nasional Jawa tergantung kepada daerah-daerah luar Jawa di dalam perdagangan internasional, sementara luar Jawa sedikit banyak tergantung kepada Jawa di dalam perdagangan dalam negeri.

Kontras antara daerah di Jawa dan luar Jawa sebagaimana telah kita uraikan di atas masih ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam di antara kedua daerah tersebut di dalam bidang sosial budaya. Kesuburan tanah dan sistem pertanian yang lebih intensif di pulau Jawa telah menjadi landasan bagi pentingnya peranan daerah tersebut pada masa-masa silam.

Karena sistem intensi yang berkembang di sana, maka desa-desa di Jawa tidak mungkin sepenuhnya dapat berdiri sendiri sebagai *selfsufficient* unit. Sistem pertanian yang demikian, sebaliknya justru membutuhkan kerja sama lebih besar untuk memelihara sistem irigasi di antara desa-desa yang tergantung kepada sistem irigasi tersebut.

Keadaan serupa tersebut lebih lanjut membutuhkan suatu unit kemasyarakatan yang lebih besar untuk mengintegrasikan beberapa desa tersebut. Maka berkembanglah di luar Jawa kerajaan-kerajaan membayar pajak, sementara kerajaan sebaliknya memberikan pelayanan birokrasi, perlindungan dan tuahnya kepada masyarakat sebagai imbalannya.

Di atas landasan pola itulah maka perkembangan lebih lanjut tidak saja menempatkan kerajaan dengan raja beserta para bangsawan yang ada disekitarnya sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga sebagai pusat kebudayaan.

Pengaruh Hinduisme dan Budhisme, maka sistem aristokrasi menjadi semakin tegas dan terinci dengan konsep tentang kerajaan yang bersifat suci dan mengandung kekuatan magis sebagai landasannya. Proses tersebut berjalan terus dan mencapai kematangannya justru pada awal-awal kedatangan orang-orang kulit putih di Indonesia.

Sebagai akibat terdesaknya pengaruh perdagangan laut oleh masuknya orang-orang kulit putih di perairan Indonesia, maka sejak abad ke-17 kebudayaan Jawa berpaling dari dunia luar, membalik ke dalam dan semata-mata menuju kepada upaya mempeertinggi dan memperluas kehidupan kraton.

Pemusatan kaum bangsawan dalam kraton memperkuat hal itu. Kendati sifat keningratan kebudayaan Jawa bukan baru timbul pada waktu itu, akan tetapi tingkatan yang tinggi dicapai pada waktu itu.

Berbeda sekali dengan sistem pertanian sawah di Jawa yang mendorong tumbuhnya suatu tertib kemasyarakatan yang mendasarkan diri atas kekuasaan di daratan, maka sistem pertanian ladang di luar Jawa telah mendorong timbulnya suatu sistem kemasyarakatan yang mendasarkan diri di atas kekuasaan lautan melalui keunggulan di dalam lapangan perdagangan.

Apabila di Jawa pernah tumbuh kekuasaan Majapahit yang gemilang, maka di luar Jawa pernah pula berkembang kerajaan Sri Wijaya yang cemerlang. Pemerintahan Hindia Belanda yang berlangsung tidka kurang

dari 350 tahun itu bukannya meniadakan kontras antara Jawa dan luar Jawa, melainkan membiarkannya demikian.

Sebagaimana kita ketahui bersama, maka sejak abad ke-18 tekanan perdagangan Belanda berpindah dari daerah Maluku ke pulau Jawa. Sejak saat itu, pengawasan pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah-daerah di luar Jawa menjadi lebih bersifat langsung. Akibat yang timbul dari keadaan ini tidak lain daripada tetap memelihara kontras antara Jawa dan luar Jawa, untuk tidak mengatakan mengukuhkannya.

Pola perdagangan yang telah tumbuh lama sebelum itu tetap terpelihara di daerah-daerah luar Jawa, Sementara kekuasaan langsung pemerintah Hindia-Belanda di pulau Jawa telah mematikan kegiatan perdagangan penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya, untuk kepentingan mencukupi kebutuhan tenaga-tenaga administratif yang murah bagi kepentingan pemerintah Hindia-Belanda, maka penduduk pulau Jawa lebih banyak direkrut ke dalam kehidupan birokrasi daripada yang dialami rekan-rekannya di luar Jawa.

Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan elit tradisional, yang sejak dilaksanakannya politik etnis banyak memperoleh kesempatan memasuki pendidikan Barat. Oleh karena itu, apabila usahawan-usahawan pribumi banyak muncul dari daerah-daerah luar Jawa, maka kaum birokrat justru lebih banyak tumbuh di pulau Jawa. Semua ini tetap merupakan faktor yang sangat mempengaruhi persoalan-persoalan hubungan antar daerah di Indonesia sampai saat ini.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama dan regional yang telah diuraikan di atas merupakan dimensi-dimensi horizontal daripada struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu, dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari waktu ke waktu, dapat kita saksikan dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan.

Semakin meluasnya pertumbuhan sektor ekonomi modern berserta organisasi administrasi nasional yang mengikutinya, maka kontras pelapisan sosial antara sejumlah besar orang-orang yang secara ekonomis dan politis

berposisi lemah pada lapisan bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas menjadi semakin mengeras. Proses tumbuhnya ketimpangan yang demikian mempunyai akarnya di dalam struktur ekonomi Indonesia pada zaman Hindia-Belanda yang oleh Boeke digambarkan sebagai *duel economy*.

Di dalam struktur ekonomi demikian, dua macam sektor ekonomi yang sangat berbeda sekali wataknya berhadapan satu sama lain. Sektor yang pertama berupa struktur ekonomi modern yang secara komersial lebih bersifat canggih, banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif memperoleh keuntungan yang maksimal, dan di dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang asing atau keturunan orang-orang asing, termasuk golongan penduduk Tionghoa yang terutama berasal dari daerah-daerah metropolitan di mana pusat kekuasaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi berada.

Berhadapan dan terpisah dari sektor yang pertama, kita jumpai sektor yang kedua berupa struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, yang menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, tidak berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi pada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial dari pada menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan-kekuatan internasional,

Serta kurang mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis. Kecuali sebagian kecil orang-orang yang telah memperoleh pengaruh kehidupan barat yang modern, maka sebagian sangat besar warga negara Indonesia hidup di dalam sektor yang kedua ini. Sekalipun apa yang dilukiskan oleh Boyke merupakan gambaran masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, namun karena daya pertumbuhan sektor ekonomi modern jauh mengatasi daya pertumbuhan sektor ekonomi

tradisional, maka sisa-sisa pertumbuhannya masih dapat kita saksikan dengan jelas pada masa kini. Ingat saja kenyataan bahwa lebih dari 80 persen penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan.

Perbedaan antara kedua sektor tersebut secara integral berakal di dalam keseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan yang tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern, dengan struktur masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Jika sektor ekonomi modern terutama kita jumpai di dalam masyarakat desa. Struktur kemasyarakatan yang demikian, seperti halnya dapat kita jumpai dikebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, ditandai oleh adanya gap di dalam hampir di semua aspek kehidupan.

Mengikuti lukisan Edward Shils, masyarakat yang demikian ditandai oleh adanya jurang yang memisahkan antara sejumlah kecil orang-orang yang kaya raya dengan sejumlah besar warga masyarakat yang melarat, antara sejumlah kecil orang-orang yang berpendidikan dengan sejumlah besar anggota masyarakat yang kurang berpendidikan,

Antara sejumlah kecil orang-orang kota dengan amat banyak warga masyarakat desa, antara sejumlah kecil orang-orang yang modern dengan sejumlah besar warga masyarakat yang berpandangan tradisional, antara sejumlah kecil orang-orang yang berkuasa dengan sejumlah amat besar orang-orang yang dikuasai.

Pendek kata, katanya, jurang perbedaan tersebut terjadi antara sekelompok orang-orang yang bergairah, penuh aspirasi, relatif kaya, berpendidikan serta berpengaruh dari kota-kota besar, dengan orang-orang desa yang kurang bergairah, melarat, kurang berpendidikan serta tidak berdaya. Barangkali lukisan Shils di atas memang terlalu provokatif, akan tetapi kebenarannya barangkali tidak mudah kita ingkari pula.

Gambaran berikut hanya melukiskan pola stratifikasi sosial berdasarkan ukuran luasnya kepemilikan tanah di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Nusantara, namun barangkali telah cukup menunjukkan kepada kita sampai seberapa jauh polarisasi sosial di dalam masyarakat Indonesia telah berkembang.

Dari 6.348,780 pemilik tanah di daerah-daerah tersebut, lebih dari 65 persen diantaranya memiliki luas tanah rata-rata kurang dari 0.50 hektar, kurang lebih 31 persen memiliki luas rata-rata antara 0,60 sampai 2,00 hektar, dan hanya kurang lebih 3 persen di antara mereka yang memiliki luas tanah rata-rata antara 20.00 hektar atau lebih. Dari angka-angka tersebut dapat kita perkirakan bahwa lebih dari 65 persen petani pemilik tanah berada di bawah *subsistence level*, 31 persen merupakan *subsistence farmers*, dan hanya kurang lebih 3 persen di antara mereka yang dapat disebut sebagai petani kaya. Gambaran tersebut akan menjadi lebih berarti lagi apabila kita memperhitungkan juga mereka yang tergolong sebagai *the landless farmers*.

Mereka ternyata tidak sedikit jumlahnya. Kendati sampel yang diambil terlalu kecil untuk menggambarkan keadaan umum masyarakat Indonesia, namun hasil studi D.H. Penny dan Dr. Masri Singarimbun berikut cukup mengesankan. Dari 164 keluarga yang merupakan seluruh penghuni Dukuh Miri, satu di antara 13 pedukuhan dari Kelurahan Sriharjo di Daerah Istimewa Yogyakarta, 37 persen di antaranya tidak memiliki sawah sama sekali.

Hasil studi Widya Utami dan John Ihalauw di desa Nganjat, Kahuman, dan Pluneng di Kabupaten Klaten bahkan menunjukkan bahwa jumlah pemilik sawah ternyata lebih kecil dari jumlah petani yang tidak memiliki sawah.

BAB IX

INTEGRASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

A. Pengertian Integrasi Sosial

Abidin dan Saebani (2014: 165), menjelaskan bahwa integrasi berasal dari bahasa Inggris "*Integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Integrasi juga merupakan keadaan yang menyebabkan kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetapi mempertahankan kebudayaan masing-masing. integrasi memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu
2. Perwujudan suatu keseluruhan dan penyatuan unsur-unsur tertentu

Adapun yang dimaksud dengan integrasi sosial ialah jika yang dikendalikan, disatukan, dan dikaitkan satu sama lain ialah unsur-unsur sosial dan kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat mampu menghadapi berbagai tantangan baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya.

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosial. Integrasi sosial akan berhasil apabila memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Setiap individu dan masyarakat mampu mengendalikan perbedaan dan konflik yang ada pada kehidupan bermasyarakat.
2. Setiap masyarakat berusaha mengembangkan sikap toleransi persamaan, tolong-menolong, elegan dan demokratis.

B. Faktor-faktor Pendorong terjadinya Integrasi Sosial

Setiadi dan Kolip (2013: 392-396), menjelaskan beberapa faktor pendorong terjadinya integrasi sosial yaitu:

1. Primordial

Identitas bersama komunitas dapat terbentuk karena adanya ikatan keaslian kedaerahan, kekerabatan, kesamaan suku, ras, tempat tinggal bahasa, dan adat istiadat.

2. Sakral

Ikatan religius yang dipercayai sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak karena dipercayai sebagai wahyu ilahiah, terwujud dalam agama dan kepercayaan yang bersifat supernatural. Agama tersebut akan menjadi semangat integrasi jika masing-masing penganutna memiliki kesamaan pandang keyakinan itu.

3. Tokoh

Integrasi bisa tercipta manakala dalam masyarakat terdapat seseorang atau tokoh pemimpin yang disegani karena kepemimpinannya yang bersifat karismatik.

4. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika dilihat sebagai pemersatu suatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa.

5. Perkembangan Ekonomi

Perbedaan bidang keahlian dan pekerjaan tersebut membentuk satu sistem kerja dalam menghasilkan barang dan jasa, dan setiap orang memiliki ketergantungan dengan orang lainnya.

6. Homogenitas Kelompok

Jika antar elemen sosial terdapat kesadaran untuk memperkecil perbedaan, maka akan dapat membentuk integrasi sosial.

7. Besar Kecilnya Kelompok

Jika kehidupan sosial relatif kecil maka akan mudah untuk mencapai integrasi sosial dibandingkan dengan kelompok yang memiliki intensitas perbedaan yang lebih besar.

8. Efektivitas dan Efisiensi Komunikasi

Cepat lambatnya integrasi sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi komunikasi sosial.

C. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk

Menurut Setiadi dan Kolip (2013: 574-587), bahwa dalam integrasi sosial terjadi penyatuan atau mempersatukan hubungan anggota-anggota masyarakat yang dianggap tidak harmonis. Integrasi dalam struktur masyarakat yang majemuk bukan berarti meniadakan keragaman kultur masing-masing kelompok sosial, tetapi integrasi merupakan aktivitas yang ditujukan pada upaya penyatuan antar kelompok sosial yang beragam ke dalam wadah kesatuan sosial yang disebut bangsa.

Integrasi sosial menghasilkan seperangkat pemahaman tentang suatu bangsa yang memiliki karakter majemuk. Oleh karenanya, negara sebagai organisasi sosial terbesar hanya sebatas menjadi wadah atas berbagai keragaman antara kelompok ini, tidak menyeragamkannya. Dengan demikian, pengintegrasian suatu bangsa tetap dibidikkan pada penyatuan antara kelompok suku bangsa, ras, agama, antar daerah, adat istiadat yang antar perbedaan ini tetap dijaga keragamannya.

Pemahaman tentang integrasi banyak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman seorang pemimpin suatu bangsa. Pada zaman Orde Baru, integrasi nasional dipraktikkan dalam bentuk penyeragaman, kemanunggalan tekad, kebulatan tekad, penyeragaman asas dalam berbagai organisasi sosial politik dan slogan-slogan persatuan lainnya.

Perwujudan dari pola-pola integrasi nasional ini berdampak pada pola-pola tatanan suatu bangunan otoritarian yang melibas setiap pergerakan yang berseberangan dengan kebijakan dan program para elite politik pemegang kekuasaan. Integrasi nasional dengan pola seperti ini tanpa disadari justru memendam konflik laten yang apabila sudah tidak tertahankan lagi akan menimbulkan daya ledak yang lebih dahsyat.

Dengan demikian, membangun bangsa yang majemuk akan dapat berjalan dengan baik apabila pembangunan tersebut diarahkan pada penanaman kesadaran pada seluruh komponen bangsa agar memiliki tingkat kesadaran untuk sama-sama memerhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka dan menentukan arah kehidupan masyarakat menuju integrasi sosial.

Faktro-faktor sosial ini merupakan tujuan yang hendak dicapai bersama, sistem sosial yang mengatur tindakan mereka dan sanksi sebagai alat kontrol atas tindakan-tindakan sosial. Ringkasnya, prasyarat tercapainya suatu tatanan integrasi nasional ialah dengan menanamkan pola-pola pemikiran kepada masyarakat agar antara satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling mengisi kebutuhan dan mencapai konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang konsisten dan tidak berubah-ubah dalam waktu singkat. Dengan demikian, anggota masyarakat selalu berada dalam keadaan stabil dan terikat dalam integrasi kelompok.

William Liddle mengemukakan formulasi bagi tercapai integrasi sosial. Dia menyatakan bahwa integrasi sosial akan kuat jika:

1. Sebagian anggota masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai kehidupan politik.
2. Sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut.

Poin-poin tersebut dapat dikatakan sebagai titik pelaksanaan program pembangunan integritas nasional menuju tatanan masyarakat yang madani. Dalam konsep pemikiran ini, masyarakat madani lebih diartikan sebagai masyarakat kewargaan, sipil, beradab, atau berbudaya. Masyarakat madani

merupakan kehidupan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama dan budayanya. Semuanya dapat hidup secara damai dan hormat serta tunduk dan patuh pada hukum dan pemerintahan. Tidak dikenal privilege bagi kelompok masyarakat tertentu, apakah mereka ini birokrat, militer, atau dari kelompok partai politik.

Secara ideologis, bangsa Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, di antaranya:

1. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi suku bangsa yang secara geografis terpencar—pencar di berbagai wilayah NKRI.
2. Ada slogan pemersatu bangsa yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, dengan harapan slogan ini memiliki kekuatan pemersatu bangsa yang multietnis dan multikultur.
3. Memiliki pandangan hidup bangsa berupa Pancasila, yang disarikan dari kepribadian seluruh bangsa.

BAB X

SISTEM SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

D. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Adapun tindakan manusia yang didapat tidak dengan belajar seperti tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.

Kebudayaan berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu *buddhayah*. Bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti *budi atau akal*. Kebudayaan adalah “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Kata *culture* merupakan kata yang sama artinya dengan kebudayaan. Berasal dari bahasa latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama menyangkut tanah.

Konsep tersebut lambat laun berkembang menjadi segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Peradaban atau istilah inggrisnya *civilization*, merupakan biasa dipakai untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi

kenegaraan dan sebagainya. Istilah peradaban sering juga disebut sebagai suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks.

E. Empat Wujud Kebudayaan

1. *Artifacts* yaitu semua benda hasil karya manusia yang bersifat konkret, dapat diraba dan difoto (kebudayaan fisik). Contohnya: candi borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, computer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain.
2. *Sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola* yaitu semua gerak-gerik yang dilakukan dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari masa ke masa yang merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem (system sosial). Contohnya: menari, berbicara, tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan, dan lain-lain. Kebudayaan ini masih bersifat konkret, dapat difoto, dan dapat difilm.
3. *Sistem gagasan yaitu gagasan dalam kepala setiap individu*. Kebudayaan ini bersifat abstrak, tak dapat di foto dan difilm, dan hanya dapat diketahui dan dipahami (oleh warga kebudayaan lain) setelah ia mempelajari dengan mendalam, baik dengan wawancara yang intensif atau melalui bacaan.
4. *Sistem gagasan yang ideologis* yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga tertentu sejak usia dini, sehingga sukar diubah (nilai-nilai budaya) yang menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berfikir, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan. Gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran dan tingkahlakunya.

F. Tujuh Unsur Kebudayaan

Adapun unsur-unsur kebudayaan universal ialah:

1. Bahasa
2. System pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. System peralatan hidup dan teknologi

5. System mata pencaharian
6. System religi
7. Kesenian

Tiap unsur kebudayaan universal terdapat juga dalam ketiga wujud kebudayaan terurai di atas (wujud berupa system budaya, system sosial, dan unsure-unsur kebudayaan fisiknya). System ekonomi dapat berupa konsep, rencana, kebijakan, adat-istiadat yang ada hubungannya dengan ekonomi, tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transport, dan pengecer dengan para konsumen atau berbagai unturnya seperti perlatan, komoditi dan benda-benda ekononomi. System religi dapat mempunyai wujud sebagai system keyakinan, dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, ruh-ruh halus, neraka, surge dan lain-lain tetapi juga sebagai berbagai bentuk upacara (baik yang musiman maupun yang kaangkala), maupun berupa benda-benda suci serta religious. Kesenian dapat berwujud berbagai gagasan, ciptaan, pikiran, dongen, atau syair yang indah, tetapi juga dapat mempunyai wujud sebagai pencipta, penyelenggara, sponsor kesenian, pendengan, penonton, maupun para peminat hasil kesenia di samping wujudnya berupa benda-benda yang indah, candi, kain tenun yang indah, dan lain-lain.

G. Hubungan antara Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Menurut Prasetya (2004: 34-35), bahwa manusia, masyarakat dan kebudayana saling berhubungan. Hubungan tersebut dapat dipahami dari uraian sebagai berikut:

1. Hubungan manusia dengan masyarakat

Manusia hidupnya selalu di dalam masyarakat. Hal ini bukan hanya sekedar ketentuan semata-mata, melainkan mempunyai arti yang lebih dalam yaitu bahwa hidup bermasyarakat itu ialah rukun bagi hidup manusia agar dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaan. Tanpa masyarakat, hidup manusia tidak dapat menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan.

2. Hubungan manusia dengan kebudayaan

Di pandang dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Manusia sebagai makhluk biologi
- b. Manusia sebagai makhluk sosio-budaya

Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam ilmu biologi atau anatomi; dan sebagai makhluk sosio-budaya manusia dipelajari dalam antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, bagaimana manusia dengan akal budinya dan struktur fisiknya dapat mengubah lingkungan berdasarkan pengalaman. Juga memahami, menuliskan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat manusia.

Akhirnya terdapat suatu konsepsi tentang kebudayaan manusia yang menganalisis masalah-masalah hidup sosio-kebudayaan manusia. Konsepsi tersebut ternyata memberi gambaran kepada kita bahwasanya hanya manusialah yang mampu berkebudayaan. Sedangkan pada hewan tidak memiliki kemampuan tersebut.

Hanya manusia sajalah yang memiliki kebudayaan karena manusia dapat belajar dan dapat memahami bahasa, yang semuanya itu bersumber pada akal manusia. Kesimpulannya bahwa hanya manusialah yang dapat menghasilkan kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia.

3. Hubungan masyarakat dengan kebudayaan

Masyarakat ialah kumpulan orang yang hidup dalam satu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut manusia selalu memperoleh kecapakan, pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya.

Kebudayaan bersifat kumulatif bertimbun. Dapat diibaratkan manusia adalah sumber kebudayaan. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan eksistensi masyarakat hanya dapat dimungkinkan dengan adanya kebudayaan.

4. Hubungan manusia, masyarakat dan kebudayaan

Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan dalam artinya yang utuh. Karena ketiga unsur

inilah kehidupan makhluk sosial berlangsung. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari manusia karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak.

Sebaliknya, manusia pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat, tidak dapat menunaikan bakat-bakat manusianya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain, dimana orang hidup bermasyarakat pasti akan timbul kebudayaan.

Ada kebudayaan di masyarakat itu merupakan bantuan yang besar sekali pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya masyarakat sampai kini. Di dalam melatih dirinya memperoleh dunia yang baru. Dari setiap generasi manusia, tidak lagi memulai dan menggali yang baru, tetapi menyempurnakan bahan-bahan yang lama menjadi yang baru dengan berbagai macam cara.

Kemudian sebagai anggota generasi yang baru itu telah menjadi kewajiban meneruskan ke generasi selanjutnya segala apa yang telah mereka pelajari dari masa lampau dan apa yang telah mereka tambahkan pada keseluruhan aspek kebudayaannya itu.

Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan individu dan masyarakat. Dan akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat di sanalah ada kebudayaan.

BAB XI

SISTEM SOSIAL DAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

A. Pengertian Industri

Menurut Sri Hariyani dalam bukunya “Hubungan Industrial di Indonesia” mengatakan industri adalah kumpulan perusahaan yang sejenis. Dengan demikian kalau yang dibicarakan industri rokok, berarti seluruh perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Dan pembahasan hubungan industri dapat menyangkut seluruh perusahaan rokok tersebut. Menurut Teguh Baroto (19: 2003), industri adalah salah satu sektor bisnis. Ada dua jenis industri:

1. Industri manufaktur adalah suatu industri penghasil barang, operasinya disebut produksi. Produksi adalah aktifitas fisik berupa pengubahan bentuk, sifat, atau penampilan suatu material untuk memberikan nilai tambah.
2. Industri jasa adalah suatu industri penghasil jasa, operasinya disebut pelayanan (service).

Menurut Sritomo Wignyosubroto pengertian industri adalah:

1. Industri penghasil bahan baku (the primary raw material industries), yaitu industri yang aktivitas produksinya adalah mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Industri tipe ini sering disebut sebagai “extractive atau primary industry”. Contoh: Industri perminyakan, industri pengolahan bijih besi dan lain-lain.
2. Industri manufaktur (the manufacturing industries), yaitu industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk atau

model produk, baik yang masih berupa produk setengah jadi (semi finished good ataupun yang sudah berupa produk jadi (finished goods product). Di sini secara fisik ataupun kimiawi terhadap input material dan akan memberi nilai tambah terhadap material tersebut. Contoh: Industri permesinan, industri mobil, dan lain-lain.

3. Industri penyalur (distribution industries), yaitu industri yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan jasa industri baik untuk bahan baku maupun “finished goods product”. Di sini bahan baku ataupun bahan setengah jadi akan didistribusikan dari prosedur yang lain dan ke prosedur ke konsumen. Operasi kegiatan akan meliputi aktivitas pembelian dan penjualan, penyimpanan, sorting, grading, packaging, dan moving goods (transportasi).
4. Industri pelayanan atau jasa (service industries), yaitu industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Contoh: Bank, jasa angkutan, asuransi, rumah sakit, dan lain-lain.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa industri akan memiliki pengertian dan definisi yang luas sesuai dengan karakteristik dari jenis masukan, proses produksi yang berlangsung, dan keluaran yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan jenis keluaran yang dihasilkan maka industri yang menghasilkan keluaran berupa material, peralatan industri, mesin dan lain-lain yang akan digunakan untuk proses produksi di industri atau pabrik lain dikenal sebagai “producer goods industries”. Sedangkan industri yang hasil keluarannya akan langsung digunakan oleh konsumen disebut “consumer goods industries”.

B. Sejarah Pertumbuhan Industri

1. Revolusi Industri di Eropa

a. Istilah Revolusi Industri

Persolan ini masih tetap diperdebatkan para ahli. (P. Mantoux, 1961, 42-43) tetapi mengingat bahwa setiap revolusi didahului suatu evolusi ke arah tujuan yang sama, maka mudalah hal itu dimengerti.

Perkembangan tersebut berjalan dengan semakin cepat. Kapankah perubahan itu sampai pada taraf kecepatan yang sudah tidak evolusioner lagi, tetapi harus disebut revolusioner? Awal mula revolusi politik dapat ditentukan dengan lebih mudah (walaupun dalam hal ini pun sering terdapat perbedaan faham) misalnya saat kedua pihak mulai menembak-menembak atau ketika dimaklumkan suatu proklamasi yang mendapat dukungan hangat, sehingga dapat didirikan suatu pemerintahan baru yang cukup beralasan.

Lagipula permulaan dan perkembangannya tidak sama cepat di semua Negara dan semua industri. Inggrislah yang mendahului Negara-negara lainnya sampai selama lebih dari setengah abad. Dan diantara cabang-cabang industri, industri pemintalan serta penenunan dan selanjutnya industri besilah yang menjadi perintisnya. Akhirnya, terjadilah kemudian revolusi sosial-ekonomi sebagai akibat revolusi industri. Yakni peralihan dari suatu masyarakat yang terutama berdasarkan hubungan perseorangan dan milik pribadi, kepada masyarakat yang ciri-cirinya khas: adanya majikan atau pemilik besar yang relatif kecil jumlahnya, di samping massa tanpa milik yang tergantung pada beberapa majikan itu.

Kita dapat menerima dengan aman, bahwa di Inggris revolusi industri di bidang pertekstilan dan besi telah berlangsung sejak sekitar tahun 1780. (P. Mantoux, 1961, 101). Dengan demikian, abad ke-XVIII itu diakhiri dengan berbagai revolusi: revolusi colonial pertama di Amerika Serikat (1774), kebangkitan pertama golongan ketiga di daratan Eropa (Perancis, 1789) dan akhirnya revolusi industri, yang menjadi pokok pembahasan buku ini. Kebangkitan golongan ketiga (borjuis dan petani) di Perancis melawan masyarakat yang berdasarkan kelahiran dengan hak-hak istimewa, telah terjadi di Inggris dalam tahun 1689. Tetapi revolusi politik-demokratis maupun revolusi ekonomi-sosial, yang mulai terjadi dalam abad ke-XVIII itu, sebenarnya belum selesai hingga sekarang.

b. Abad Pertengahan

Pada jaman pertengahan Inggris merupakan sudut yang terbelakang dalam kesatuan politik dan ekonomis Eropa, sebuah pulau terpencil yang merupakan rangkaian di tepi barat. Jumlah penghuninya tidak pernah mencapai empat juta (sedangkan Perancis lebih dari 20 juta). Dalam abad ke-XI pengaruh kebudayaan Perancis untuk sementara meningkat (William the Conqueror), tetapi tradisionalisme dan isolasionisme penghuni pulau itu segera mempertahankan diri, yang mewujudkan antara lain dalam usaha mengembangkan susunan kenegaraan yang khusus. Dalam bidang ekonomi, sifat-sifat agraris aman kuat.

Tidak ada kota yang penting kecuali London, dan armada dagangpun tidak punya. Kalau toh pulau itu dikunjungi sejumlah kapal asing, itu sebabnya karena pulau itu kaya domba. Bulu domba dari Inggris merupakan bahan mentah utama bagi pusat-pusat besar industri kain wool di kota-kota Vlaanderen dan Italia Utara. Pernah ada raja yang berusaha untuk mendirikan industri itu di Inggris sendiri dengan mengundang tukang-tukang dari daratan Eropa.

Tetapi usaha ini tidak sesuai dengan kepentingan para pedagang yang menjadi kaya dari ekspor. Walaupun demikian terdapat juga industri kecil-kecilan di beberapa propinsi, tetapi hanya untuk keperluan sendiri, sebab produksinya terlalu kasar dan sederhana untuk bias bersaing dengan kain halus dari luar negeri. Kapitalisme dalam Proses Industrialisasi

c. Sejarah Kapitalisme

Pada awal abad keempat belas telah terdapat permulaan produksi kapitalis di Italia, dan di Inggris pada abad ke lima belas, namun jangkauan produksi kapitalis itu masih sangat terbatas. Kota-kota dikuasai oleh organisasi-organisasi serikat kerja yang kuat dan yang sangat membatasi jumlah magang dan lulusan permagangan yang boleh dipekerjakan oleh sang majikan, di samping itu serikat-serikat kerja itu memisahkan diri dari modal niaga, yaitu satu-satunya bentuk modal bebas, yang mempunyai kontrak dengan mereka.

Di samping itu, tiada kemungkinan bagi perkembangan kapitalisme, selama mayoritas penduduk yang bekerja itu terdiri dari kaum tani merdeka. Proses akumulasi (penimbunan) yang pertama-tama yaitu pembentukan awal dari cara produksi kapitalis melibatkan pengambil-alihan alat-alat produksi dari tangan petani. Proses ini terjadi pada periode yang berbeda-beda, dengan berbagai cara di berbagai negeri dan memusatkan perhatiannya tentang hal ini pada Inggris di mana proses itu tampak dalam bentuk klasik. Di Inggris, transformasi petani merdeka menjadi buruh penerima upah mulai sungguh-sungguh pada akhir abad kelima belas. Di saat itulah peperangan antar golongan feodal mengakibatkan menurunnya sumber-sumber kekayaan si bangsawan.

Masa pekerja buruh yang pertama dilemparkan ke pasaran dengan dibubarkannya pembantu-pembantu oleh kaum bangsawan yang jatuh miskin, dan kemunduran posisi kaum bangsawan feodal dipercepat oleh meningkatnya kekuasaan monarki. Kaum bangsawan yang mempunyai tanah semakin tertarik pada suatu ekonomi pertukaran.

Hasilnya adalah gerakan tertutup yang didorong terus oleh meningkatnya produksi wol di Vlaanderen, yang mengakibatkan kenaikan harga wol di Inggris yang sangat mencolok. Sebagai sikap menentang raja dan Parlemen, tuan-tuan tanah feodal para petani di tanah mereka, mengusir mereka dengan paksa dari tanah masing-masing. Lahan yang di tangani dijadikan padang rumput bagi ternak, yang hanya memerlukan beberapa penggembala saja.

Seluruh proses pengambil-alihan milik pada abad keenam belas itu memperoleh suatu desakan baru dan menakutkan dari pembaharuan; tanah-tanah luas kepunyaan gereja di bagi-bagikan kepada bangsawan atau di jual murah kepada para spekulan yang mengusir pengolah tanah yang telah turun-temurun, dan mereka itu mengkonsolidasikan kekayaan barunya dengan cara membuat unit-unit tanah yang luas. Para pengolah tanah yang miliknya telah diambil alih menjadi massa pengemis, gelandangan, sebagian karena memang berbakat ke arah itu, dan dalam banyak hal ini adalah karena tekanan batin oleh keadaan. Gejala ini

makin parah oleh adanya perundang-undangan keras yang mengancam gelandangan, ini berarti bahwa kaum gelandangan dibebani disiplin yang perlu bagi sistem perupahan.

Selanjutnya pada awal periode abad keenam belas, di Inggris timbul permulaan adanya pekerja buruh, suatu lapisan petani yang kehilangan tanah garapannya, yang merupakan suatu kelompok yang terpisah dari alat-alat produksinya dan terlempar ke pasaran sebagai buruh upahan yang bebas.

Para ahli ekonomi politik menafsirkan gejala ini dalam sorotan yang semata-mata positif, yang mengatakan tentang terbebasnya orang dari ikatan dan pembatasan feodal, dan sama sekali mengabaikan fakta, bahwa kebebasan ini membawa serta pelanggaran yang paling memalukan atas hak pemilihan yang paling khusus dan tindakan kekerasan yang paling buruk terhadap manusia.

Di dalam kejadian-kejadian itu sendiri, peristiwa-peristiwa ini tidak dapat dianggap sebagai syarat-syarat yang cukup bagi munculnya kapitalisme. Pada peralihan abad keenam belas, sisa-sisa feodalisme yang sedang hancur itu bersikap memilih antara kehancuran terus dan suatu gerakan untuk bentuk produksi yang lebih maju: kapitalisme.

Suatu faktor yang agak penting dalam rangsangan ke perkembangan kapitalisme adalah perluasan perniagaan lewat lautan yang jauh, yang berlangsung cepat dan berkembang sebagai hasil penemuan-penemuan geografis yang mengejutkan yang diperoleh di dalam bagian terakhir abad kelima belas. Termasuk di dalam penemuan-penemuan geografis ini, terutama penemuan Amerika dan pelayaran mengelilingi Tanjung Harapan, yang memberikan perkembangan yang cepat pada perniagaan, navigasi dan industri suatu dorongan yang sebelumnya belum pernah diketahui orang, juga kepada unsur revolusioner di dalam masyarakat feodal yang sedang goyah.

Pemasukan capital yang cepat, yang berasal dari perniagaan yang tumbuh subur bagaikan jamur, ditambah pula oleh membanjirnya logam-logam mulia ke dalam negeri sejak penemuan emas dan perak, melanda

tata sosial dan ekonomi yang telah ada di Inggris. Pabrik-pabrik baru didirikan di kota-kota pelabuhan dan dipusat-pusat negeri, di luar penguasaan kota-kota perniagaan yang lebih tua dan organisasi-organisasi serikat kerjanya. Usaha-usaha baru didirikan itu mengalami pertumbuhan cepat, kendatipun ada perlawanan sengit dari pihak kota-kota niaga terhadap tempat-tempat bibit perindustrian baru. Dengan demikian kapitalisme modern bermula di tempat yang jauh letaknya dari pusat-pusat perpabrikasi lama, yang didasarkan atas perniagaan maritime dan yang melintasi negeri dalam skala besar.

Operasi-operasi tambahan dari daerah pedesaan yang berkaitan dengan pemintalan tenun yang memerlukan sedikit latihan teknis. Masyarakat pedesaan itu merupakan tempat terakhir untuk perkembangan kapitalisme dalam bentuk yang paling murni dan paling logis, namun dorongan pertamanya adalah di situ. Sebelum tingkat ini tercapai, kapital belum merupakan kekuatan revolusioner.

Di samping perkembangan merkantilisme yang terlebih dulu yang berawal pada abad kesebelas, berperilaku sebagai suatu faktor utama dalam peleburan struktur-struktur feodal, maka kota-kota yang berkembang itu pada intinya senantiasa tergantung kepada sistem lama dan memainkan suatu peran konservatif segera setelah kota-kota itu memperoleh suatu tingkat kekuasaan.

Timbulnya mereka yang menguasai kapital, borjuis yang sedang menampakkan diri berkembang dengan progresif sejak permulaan abad keenam belas dan seterusnya. Pemasukan emas dan perak secara besar-besaran menghasilkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Hal ini berperilaku sebagai penyajian keuntungan-keuntungan besar dalam perniagaan dan perpabrikasi, akan tetapi merupakan pula suatu sumber penghancuran bagi tuan-tuan tanah besar, dan membengkakkan jumlah buruh upahan. Akibat dari semua itu pada bidang politik adalah revolusi Inggris yang pertama, yang merupakan suatu perluasan kekuasaan Negara yang berlangsung cepat.

Mekanisme yang berkembang dari administrasi terpusat dan kekuasaan politik yang terkonsolidasi, digunakan untuk mempercepat proses transformasi cara produksi feodal menjadi cara produksi kapital dan untuk memperpendek transisinya. Sekarang pun tidak banyak diketahui orang tentang asal mula khusus para kapitalis yang pertama-tama, dan sedikit saja yang dapat disajikan oleh Marx sebagai bahan sejarah yang konkret. Akan tetapi ia memberikan petunjuk, bahwa ada dua cara kemajuan sejarah yang terdapat di dalam produksi kapitalis yang masing-masing saling berlawanan. Yang pertama ialah bagaimana satu bagian kelas pedagang bergerak dari operasi-operasi dagang murni untuk langsung turun tangan di dalam produksi.

Hal ini terjadi pada perkembangan dini kapitalisme di Italia dan merupakan sumber utama untuk membentuk barisan kapitalis di Inggris pada akhir abad keenam belas. Akan tetapi bentuk dari pembentukan kapitalis segera menjadi suatu rintangan bagi suatu cara produksi kapitalis yang tulen dan mengalami kemunduran dengan adanya perkembangan cara produksi kapitalis tersebut.

Jalan kedua bagi perkembangan kapitalis itu adalah cara yang benar-benar revolusioner. Di sini para produsen sendiri yang mengumpulkan kapital dan bergerak dari produksi untuk memperluas bidang kegiatan-kegiatannya, agar bisa meliputi perniagaan. Jadi mereka itu sejak permulaan beroperasi di luar serikat-serikat pekerja dan berselisih dengan mereka. Di samping Marx hanya memberikan sedikit tanda bagaimana cara perkembangan yang kedua ini terjadi dalam proses produksi, dia juga memperincikan beberapa aspek dari proses yang terjadi dalam pertanian Inggris.

Pada pertengahan abad ke tujuh belas, banyak tanah dimiliki oleh petani-petani kapitalis yang mempekerjakan buruh penerima upah dan memproduksi untuk suatu pasar komoditi. Milik mereka menjadi meningkat berkat pengambil-alihan secara paksa tanah-tanah yang selamat dari penyerobotan pada periode feodal. Akan tetapi proses penyerobotan tanah-tanah tersebut merupakan suatu proses panjang dan

tidak berhenti sampai pertengahan kedua abad kedelapan belas. Proses ini baru berakhir bersamaan dengan lenyapnya secara keseluruhan pertanian merdeka, yang memasukkan tanah sebagai kapital dan menciptakan bagi industri-industri kota pekerja buruh yang diperlukan, walaupun hal ini dilarang. Marx membedakan dua tingkatan organisasi produksi pada periode kapitalis. Tingkatan pertama dikuasai oleh perpabrikaan.

Ciri yang nyata bentuk ini ialah digantikannya keterampilan pertukangan menjadi berbagai tugas khusus yang dilakukan oleh sejumlah pekerja, yang secara kolektif menyelesaikan sesuatu yang dapat ditangani sendiri oleh satu orang terampil di bawah sistem serikat kerja. Perpabrikaan lebih efisien daripada produksi kerajinan tangan, bukan karena ada kemajuan teknik apapun, akan tetapi berkat adanya pembagian kerja yang memungkinkan untuk memproduksi lebih banyak unit-unit per-orang/jam.

Bentuk produksi yang paling menonjol sejak abad keenam belas sampai bagian akhir dari abad kedelapan belas di Inggris ini mempunyai batas-batas tertentu. Perluasan pasaran-pasaran di akhir abad kedelapan belas demikian besarnya sehingga produktivitas perpabrikaan tidak cukup memenuhi permintaan yang ada. Sebagai akibatnya, timbul suatu dorongan untuk menciptakan cara-cara produksi yang secara teknis lebih efisien: perkembangan mesin-mesin merupakan konsekuensi dari kebutuhan-kebutuhan pasar.

Hasilnya ialah revolusi industri. Oleh karenanya mekanisme kemudian menguasai cara produksi kapitalis. Mulai bergeraklah dorongan untuk senantiasa memodifikasi teknologi yang mwnjadi tansa kapitalisme. Perkembangan mesin-mesin yang makin lama makin rumit dan mahal, merupakan suatu faktor utama di dalam sentralisasi ekonomi kapitalis.

2. Pertumbuhan Industri di Indonesia

Industrialisasi di Indonesia berkembang pesat pada tahun 1970-an di saat pemerintahan Orde Baru. Meskipun industrialisasi berlangsung

pada tahun itu, hal ini bukan berarti pada zaman Belanda dan pemerintahan Orde Lama tidak ada industri manufaktur yang berkembang. Pada zaman Belanda dengan pesat karena pemerintah kolonial tidak mengembangkannya.

Pemerintah kolonial lebih teruntungkan dengan perkembangan dunia perdagangan rempah-; pada zaman Orde Lama industri seperti ini tidak berkembang karena zaman itu pemerintahan mengembangkan sebab sikap politiknya adalah anti kapitalisme dan kolonialisme serta pemerintahan anti modal asing.

Perkembangan industrialisasi zaman Orde Baru mengulangi perkembangan dualisme sistem pertanian di Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial. HJ Boeke pernah mengemukakan hal itu yakin ada dualisme perkembangan sistem ekonomi yang di bangun melalui basis pertanian. Pertama sistem pertanian modern dengan model perkebunan dan agroindustri seperti industri gula dan sistem pertanian tradisional yang dilakukan oleh petani desa pada umumnya di mana keduanya tidak pernah ada hubungannya.

Pertanian modern berjalan sendiri sedang pertanian tradisional berjalan sendiri. Di satu pihak pertanian modern di bawah modal asing sedang tradisional adalah milik rakyat biasa. Perkembangan industri di masa Orde Baru berjalan dualistik yang tidak ada hubungannya sama sekali. industri-industri manufaktur baru yang besar-besar dengan perkembangan modal asing atau gabungan, sedang di pihak yang lain adalah industri tradisional di mana keduanya sering tidak ada hubungannya sama sekali.

Contoh nyata adalah kita memiliki industri pesawat terbang akan tetapi kita juga memiliki industri pengecoran baja secara tradisional yang tumbuh beratus-ratus tahun yang lalu/ tentu hal ini bukan bermaksud seluruhnya untuk mengaitkan industri-industri tersebut, sekurang-kurangnya bagaimana memikirkan industri yang dikerjakan oleh pribumi in berkembang sejalan dengan perkembangan industrialisasi di Indonesia.

Pada umumnya industri manufaktur (dari bahan baku menjadi barang jadi) yang berkembang di Indonesia adalah industri perakitan atau industri substitusi import yang sepenuhnya tergantung pada teknologi asing industri seperti ini sangat di dukung oleh elit politik dan para pengusaha di Indonesia yang pada umumnya adalah para perantara dari barang-barang industri luar yang menemukan pasar potensial di negeri ini. Tentu pertumbuhan ekonomi dapat digalang dengan dunia perdagangan saja tanpa negara itu harus memiliki basis industri manufaktur yang dikembangkan dengan teknologi sendiri.

Akan tetapi krisis berlangsung di Indonesia dampaknya adalah harga komponen barang industri yang harus dipenuhi oleh perusahaan harus dibeli dengan harga mahal sebab harus menyesuaikan dengan kemerosotan uang rupiah. Di era industrialisasi Orde Baru, bangsa Indonesia tidak pernah menghasilkan para industriawan, sedang industriawan tradisional yang pernah ada tidak pernah berkembang. ada sebagian besar dari mereka beralih profesi karena usaha industrinya mati sebab kalah bersaing dengan industri luar negeri.

Perkembangan pengusaha tumbuh dengan pesat terutama adalah pengusaha yang menjalin hubungan erat dengan para pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu perkembangan industri di Indonesia sesungguhnya lebih tepat dikatakan pasar barang-barang industri produk luar yang dipasarkan di Indonesia daripada industrialisasi berbasis teknologi sendiri. Contohnya tentang hal ini adalah Mobnas dengan kasus Mobil Timor.

Mobil Indonesia yang di buat di propinsi Korea. Selanjutnya hal ini erat kaitannya dengan kelompok-kelompok elit politik dan para birokrat yang memiliki perusahaan. pertanyaan selanjutnya apa makna negara dan bagaimana kekuatannya dijaga untuk kepentingan perkembangan kapitalisme? Industri di Era Orde Baru Setiap negara manapun tidak mungkin akan mengabaikan militer sebab militer sebagai organisasi merupakan bagian dari sistem yang berfungsi mempertahankan negara dari kehancuran akibat invasi fisik negara lain.

Oleh karenanya di negara-negara maju militer itu sebagai alat negara. Pada tingkat ini militer tidak memainkan politik. Persoalan di Indonesia sangat berbeda dengan prinsip sebab militer di Indonesia tidak hanya memainkan fungsi pertahanan akan tetapi memainkan fungsi sosial, politik dan ekonomi. Pertentangan antara sipil militer sudah berlangsung lama tentang kekuasaan negara Indonesia. pada zaman orde lama adalah jelas pertentangan Partai Komunis satu pihak dan militer di pihak lain. meskipun dalam tubuh militer juga terjadi perbedaan ideologi di mana beberapa kelompok militer melakukan pembelaan terhadap kelompok politik tertentu.

Perjuangan dalam bidang ekonomi juga terjadi, pada tahun 1957 perusahaan asing yang dinasionalisasikan adalah dikuasai oleh kelompok militer. Pertanyaannya prinsip militer macam apa yang sekarang ini berlangsung di Indonesia? hingga detik ini militer profesional sebagai penegak keamanan negara dan bukan kepentingan kelompok yang di support oleh militer dan kepentingan militer. Meskipun hal ini ada perubahan yakni berkurangnya jumlah anggota MPR dari 100 sampai bergeser 38 orang.

Dwi fungsi ABRI merupakan bentuk nyata tentang kekuasaan di militer di Indonesia. oleh sebab itu militer di Indonesia memiliki elite politik. Dengan prinsip seperti ini, sadar atau tidak perpecahan bangsa menuju diambang pintu. Alasannya adalah sederhana, dengan prinsip penguasaan seperti ini maka rekrutmen militer akademis atau tingkat bawah juga berkurang melainkan bertambah.

Jika bidang kedudukan pekerjaan atau jabatan politis tertentu seperti Bupati, Gubernur, Dirjen atau yang lain sampai kedudukannya dalam olahraga merupakan lahan yang diperebutkan oleh sekelompok militer yang memperebutkan jabatan tertentu dengan jumlah jabatan yang ada di negara ini tentu tidak akan sebanding, belum pula jabatan-jabatan seperti itu diperebutkan oleh penduduk sipil.

Pendek kata pengalaman Orde Baru menunjukkan bagaimana kekuasaan ditegakkan dengan prinsip militerisme yang menghasilkan

krisis hingga detik ini. Krisis bukan lagi terletak pada persoalan ekonomi semata akan tetapi yang paling dalam adalah pada sistem politik yang mengundang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Persoalan bangsa bahkan dapat menjadi persoalan perpecahan bangsa yang lebih luas. Betapa tidak jika di negeri ini terjadi perebutan kekuasaan antar elit politik militer yang nota bene memperebutkan sumber ekonomi dan melindungi kekuasaan lama.

Pada tingkat inilah konflik horizontal antara penduduk sipil dan elit politik sipil kemungkinan besar adalah konflik antara elit politik militer. Bahaya besar adalah pembagian wilayah kekuasaan yang terpecah-pecah yang intinya adalah pembagian sumber ekonomi yang akibatnya terhadap rakyat juga sama dengan periode sebelumnya.

Bentuk kekerasan yang ditegakkan seperti ini sulit untuk dikontrol. Orang yang mengontrol dianggap seperti musuh. Akibatnya kekuasaan akan berlangsung dengan cara diktator. Jika era reformasi tidak mampu menciptakan institusi kontrol, kekuasaan selanjutnya akan menciptakan pola kekuasaan yang sama yakni pindah dari diktator satu ke diktator yang lain.

Masyarakat industri adalah bentuk masyarakat yang sangat kompleks dan penuh perbedaan. Jika negara tidak dapat menjamin kepastian hukum untuk menegakkan negara demokrasi maka situasi akan kacau balau konflik kekerasan dan kerusuhan akan terjadi di mana-mana, elit politik hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan kelompok dan bukan berpikir tentang rakyat.

Reformasi Era Peralihan Indonesia Baru Ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung, pada akhirnya perjuangan mereka adalah blat yakni sepakat untuk meminta turunnya Presiden Soeharto pada waktu itu. pada saat yang sama tuntutan reformasi di lantunkan yakni perubahan terhadap sistem politik yang berlangsung untuk menuju perbaikan ekonomi dan menghilangkan korupsi yang dilakukan oleh seluruh sistem Orde Baru.

Setelah Presiden Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden Habibie situasi hingga kini belum mengalami perubahan banyak, hanya kebebasan press bertambah dan bertambah partai politik. Dengan banyaknya partai politik gerak reformasi menjadi berbeda yakni semula berorientasi untuk menggantikan sistem politik dan menghapuskan elit politik lama diganti baru dengan sistem baru untuk Indonesia baru. Perkembangan partai politik yang ada menjadi berlainan. Mereka bukan berkoalisi untuk menyumbangkan partai politik berkuasa pada masa lalu akan tetapi bersaing dan para pemimpinnya berkeinginan menempatkan diri sebagai Presiden. Pada tingkat ini reformasi masih belum tampak bentuknya bahwa Indonesia baru macam apa yang diinginkan? Jika Indonesia Baru yang demokratis hendak ditegakkan maka apa pun perbedaan yang berlangsung dengan menerimanya.

Kasus Presiden perempuan misalnya, orang tidak perlu mempersoalkan jika hal itu pilihan rakyat banyak. Persoalan paling rentan adalah agama, kemudian menjadi alat kepentingan politik. Indonesia Baru tidak mungkin ditegakkan bila bangunan rasional lebih lemah daripada emosionalitas.

Sadar atau tidak sadar, bangunan emosionalitas inilah yang mengakibatkan bangsa ini mudah di adu domba oleh kepentingan lain. institusi di mana bangunan sistem kontrol terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat itu sendiri sangat diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia Baru yang berbasis masyarakat industri. Jika institusi ini terbentuk maka bangunan sistem politik akan berubah. Negara dapat mendorong lahirnya masyarakat industri dan sebaliknya masyarakat industri dapat memberi kontrol terhadap kehidupan negara yang hendak ditegakkan dengan otoriter.

BAB XIII

SISTEM SOSIAL DAN PENDIDIKAN

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogy*” yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *paedagogos*. Dalam bahasa romawi pendidikan diistilahkan sebagai *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Kadir, dkk (2012: 66), mengemukakan beberapa konsep tentang pendidikan, sebagai berikut:

- a. Pendidikan dalam arti luas ialah segenap kegiatan manusia baik yang disengaja atau diciptakan maupun yang muncul dengan sendirinya kapan pun dan dimanapun sepanjang hayat, yang dapat memberikan pendewasaan kepada manusia.
- b. Pendidikan dalam arti sempit ialah kegiatan yang disengaja yang khusus dilakukan dan direncanakan untuk tujuan tertentu dalam situasi tertentu dan pada waktu yang terbatas.
- c. Pendidikan dalam definisi alternatif ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah baik formal, nonformal, maupun informal dan dilakukan seumur hidup untuk megoptimalkan potensi manusia.

2. Komponen

a. Tujuan pendidikan

Tujuan merupakan komponen penting dan sangat menentukan bahkan merupakan esensi dari pendidikan. tujuan pendidikan memiliki berbagai tingkatan, mulai dari tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tidak lengkap, tujuan semetara, tujuan intermediet, dan tujuan insidental.

b. Pendidik

Pendidik ialah orang laki-laki dan perempuan yang dengan sengaja memengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidik ialah orang dewasa yang mampu membawa peserta didik ke arah kedewasaan. Dewasa disini bukan hanya sebatas pada dewasa fisik atau umur, tetapi dewasa secara keseluruhan yaitu mental, intelektual, sosial, fisik, psikis.

c. Peserta didik

Peserta didik ialah anggota masyarakat laki-laki dan perempuan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

d. Alat pendidikan

Alat pendidikan ialah segala sesuatu yang bukan saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga sebagai langkah atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan.

e. Lingkungan

Lingkungan pendidikan ialah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Fungsi Pendidikan

Pendidikan sebagai sebuah aktivitas tidak lepas dari fungsi dan tujuan. Menurut Kadir, dkk (2012: 81) bahwa fungsi utama pendidikan ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata

lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya.

4. Tujuan Pendidikan

Langeveld dalam Kadir, dkk (2012: 81:82), membedakan tujuan pendidikan mejadi 6 yaitu:

a. Tujuan umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pendidikan , yaitu tecapainya kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Maksud kedewasaan jasmani ialah jika pertumbuhan jasmani sudah mencapai batas pertumbuhan maksimal, maka penyembuhan jasmani tidak akan berlangsung lagi. Kedewasaan rohani ialah peserta didik sudah mampu menolong dirinya sendiri, mampu berdiri sendiri, mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus ialah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelegensi, lingkungan sosial-budaya, tahap-tahap perkembangan, tuntutan syarat pekerjaan, dan sebagainya.

c. Tujuan tidak lengkap

Tujuan tidak lengkap ialah tujuan yang menyangkut sebagian aspek manusia, misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja, tanpa mempehatikan yang lainnya. jadi tujuan tidak lengkap ini bagian dari tujuan umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian.

d. Tujuan sementara

Proses untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karenanya perlu ditempuh setingkat demi setingkat. Tingkatan demi tingkatan diupayakan untuk mencapai tujuan akhir itulah yang dimaksud dengan tujuan sementara. Contohnya anak menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar merupakan tujuan sementara untuk selanjutnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi.

e. Tujuan intermedier

Tujuan intermedier ialah tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya, anak dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar ia kelak mempunyai rasa tanggung jawab

f. Tujuan insidental

Tujuan insidental ialah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu, yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya orangtua menegur anaknya agar berbicara sopan.

Menurut Bloom dalam Kadir, dkk (2012:81-83), tujuan pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Domain kognitif

Domain kognitif meliputi kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat tercapai setelah dilakukannya proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam kemampuan tersebut bersifat hierarkis artinya untuk mencapai semuanya harus sudah memiliki kemampuan sebelumnya.

b. Domain afektif

Domain afektif berupa kemampuan untuk menerima, menjawab, menilai, membentuk, dan mengaktualisasi.

c. Domain psikomotor

Terdiri dari kemampuan persepsi, kesiapan, dan respon terpinpin

Kemudian, dalam hubungannya dengan hirarki tujuan pendidikan, Hasbullah (2012: 15-16), dibedakan macam-macam tujuan pendidikan yaitu:

a. Tujuan nasional

Merupakan tujuan umum pendidikan nasional yang di dalamnya terkandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Yang menjadi sumber tujuan umum ini biasanya terdapat di dalam undang-undang atau ketentuan resmi tentang pendidikan.

b. Tujuan institusional

Ini merupakan tujuan lembaga pendidikan sebagai pengkhususan dari tujuan umum, yang berisi kualifikasi yang diharapkan diperoleh anak setelah menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan tertentu.

c. Tujuan kurikuler

Tujuan ini adalah penjabaran dari tujuan institusional, yang berisi kualifikasi yang diharapkan dimiliki oleh si terdidik setelah mengikuti program pengajaran dalam suatu bidang studi tertentu, misalnya tujuan untuk bidang studi sejarah, PKn dan sebagainya. Rumusannya terdapat dalam kurikulum suatu lembaga pendidikan tertentu.

d. Tujuan instruksional

Rumusan tujuan ini merupakan pengkhususan dari tujuan kurikuler dan dibedakan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. TIU merupakan rumusan yang berisi kualifikasi sebagai pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki anak didik atau siswa setelah mengikuti pelajaran dalam pokok bahasan tertentu, namun belum dirumuskan secara khusus dalam bentuk perubahan tingkah laku siswa yang mudah diamati dan tidak menimbulkan banyak interpretasi.

Tujuan Instruksional khusus merupakan penjabaran lebih lanjut berisi kualifikasi yang diharapkan dimiliki anak didik setelah mengikuti pelajaran dalam sub pokok bahasan tertentu. TIK dirumuskan dengan menggunakan istilah yang operasional, dari sudut produk belajar dan tingkah laku anak didik serta dinyatakan dalam rumusan yang sangat khusus, sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah penafsiran.

B. Pendidikan bagian dari Sistem Sosial

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Menurut Hamdani (2011: 195) masyarakat memiliki peran yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan. Salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Apabila ada lembaga pendidikan yang maju, salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah

keterlibatan masyarakat yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, apabila ada lembaga pendidikan yang bernasib memprihatinkan, salah satu penyebabnya ialah kurangnya dukungan masyarakat.

Menurut Mulyasa (2002: 50-51) sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Apabila hubungan antara sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggungjawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Menurut Mulyasa dalam Hamdani (2011:197) salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menggalang partisipasi masyarakat ialah melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Melalui hubungan yang harmonis, diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Menurut Mulyasa (2004: 510) agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat.

Hubungan timbal balik pendidikan di sekolah dan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, materil, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui beragam hal tentang sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah. Menurut Hamdani (2011: 195) bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan:

1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Menurut Pidarta (2004: 184) manfaat hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu:

1. Bagi Sekolah

- a. Memperbesar dorongan mawas diri
- b. Memudahkan memperbaiki pendidikan
- c. Memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar
- d. Konsep masyarakat tentang guru atau dosen benar
- e. Mendapat koreksi dari kelompok masyarakat
- f. Mendapat dukungan moral dari masyarakat
- g. Memudahkan meminta bantuan dari masyarakat
- h. Memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat
- i. Memudahkan pemanfaatan narasumber

2. Bagi masyarakat

- a. Tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya
- b. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan
- c. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan
- d. Melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan ada di masyarakat, hidup bersama-sama dengan warga masyarakat. Masyarakat dan sekolah saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan agar siswa dan para remaja dibina di sekolah, sebaliknya sekolah membutuhkan agar masyarakat membantu kelancaran proses belajar di sekolah dengan memberikan berbagai fasilitas.

Hubungan antara lembaga sekolah dengan masyarakat sangat penting karena masyarakat memiliki peran yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan. Menurut Hamdani (2011: 195) bahwa salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan ialah masyarakat. apabila ada lembaga pendidikan yang maju, salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah keterlibatan masyarakat secara maksimal. Begitu

pula sebaliknya, apabila ada lembaga pendidikan yang bernasib memprihatinkan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan masyarakat.

Peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan di sekolah, untuk itu sekolah perlu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak sekolah harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat. Menurut Hasbullah (2012: 100-101) peran dari masyarakat terhadap sekolah ialah:

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan mambiyai sekolah.
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian banyak sekali terdapat di masyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.
5. Masyarakatlah sebagai sumber belajar atau laboratorium tempat belajar.

Menurut Pidarta (2004: 188) bahwa partisipasi masyarakat terhadap sekolah dapat dalam bidang kurikulum terutama yang lokal, alat-alat belajar, dana, material untuk bangunan, *auditing* keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah, dan lain-lain. Cara berpartisipasi antara lain ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, ikut bazar, dan lain-lain.

Elemen pendidikan seperti sekolah dan guru dapat juga mengundang para tokoh untuk membahas bentuk-bentuk kerja sama dalam meningkatkan pendidikan. Dalam suatu pertemuan yang diadakan mereka akan mengadu pendapat, bertukar pikiran, untuk menemukan alternatif-alternatif peningkatan pendidikan. Teknik lainnya yang dapat dilakukan seperti surat-menyurat, buku

penghubung sekolah, buletin sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan anak didik dan orang tua.

Menurut Emery Stoop dalam Idi (2011: 196) bahwa hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat harus memenuhi syarat jujur, mulia, mencakup segala yang dibutuhkan, komprehensif, sensitif terhadap masyarakat, dan dapat dipahami oleh pihak lain. Cara yang dapat ditempuh adalah melakukan sosialisasi secara realistis argumentatif kepada masyarakat tentang program-program ideal yang telah dilaksanakan.

Menurut Hamdani (2011: 196) cara-cara untuk berhubungan dengan masyarakat ialah:

1. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, seperti kebersihan lingkungan.
2. Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah.
3. Menerbitkan buletin sekolah, majalah, atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah untuk diinformasikan kepada masyarakat.
4. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina program sekolah.

BAB XIV

SISTEM SOSIAL DAN POLITIK

A. Pengertian Politik

Jika dirunut dari asal katanya yakni *polis* dalam bahasa Yunani. Politik berarti kota atau negara kota. Politik tidak terbatas pada persoalan negara saja, tetapi juga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kekuasaan, kedaulatan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian atau alokasi, perubahan politik, kelembagaan politik, modernisasi politik, pemerintahan, konflik politik dan konsep lainnya yang bertautan erat dengan konsep negara dan masyarakat.

Dalam arti luas, politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Dalam arti ini, politik merupakan ilmu sosial yang tertua di dunia karena yang dibicarakan adalah seluk beluk tentang negara (state).

Politik berarti pula proses dengan mana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan kolektif. Menurut Budiardjo politik ialah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan, menyangkut seleksi diantara berbagai alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah dipukuli. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada.

Politik sebagai aktivitas dengan mana kepentingan-kepentingan yang berbeda diterima dalam unit aturan yang didamaikan dengan berbagai

kekuasaan secara proporsional guna mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh komunitas. Definisi Crick tentang politik menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan berbeda didamaikan melalui pembagian kekuasaan secara seimbang.

B. Demokrasi sebagai Bagian dari Sistem Sosial Masyarakat

1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos artinya rakyat*” dan “*kratos atau kratein artinya kekuasaan atau berkuasa*”. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa. Demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila. Demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional. Corak khas demokrasi Indonesia salah satunya terdapat pada Pancasila sila ke-5 yaitu “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Demokrasi konstitusional berbeda dengan demokrasi Marxisme-Leninisme. Demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya atau negara hukum. Sedangkan komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan bersifat totaliter.

2. Demokrasi konstitusional

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah pemerintah berdasarkan konstitusi. Pemerintah terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil. Menurut Henry B. Mayor demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, tingkah laku dan kepentingan dalam masyarakat.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut, maka penyelenggaraan lembaga harus:

- a. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk satu kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
- c. Suatu organisasi politik mencakup satu atau lebih partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

3. Asas demokrasi melahirkan sistem presidensial, parlementer, referendum

Asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam, yaitu:

- a. Sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- b. Sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, sebab kepala negara bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.

- c. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara prisedensil dan parlementer seperti Perancis dan Indonesia.

Demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis ialah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

4. Bentuk-bentuk demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

- a. *Formal democracy* menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan.
- b. *Substantive democracy* yaitu menunjukkan pada proses bagaimana demokrasi itu dilakukan.

Formal democracy dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi itu di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi negara.

- a. Demokrasi Perwakilan liberal

Pada bentuk ini, kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Individu dalam suatu negara partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi. Menurut Held bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Yang perlu disadari dari prinsip demokrasi ini ialah bahwa apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam

hidup bernegara. Konsekuensi prinsip demokrasi ini ialah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggalam. Kekuasaan kapitalisme menguasai negara.

b. Demokrasi satu partai dan komunis

Demokrasi ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang terkecil mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar atau delegasi nasional. Semua delegasi bisa ditarik kembali oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu piramida komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu, menurut komunis negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan rezim liberal yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggungjawab secara langsung.

Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi dengan suatu sistem terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosioalisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional dari kader-kader revolusioner yang disiplin. Partai evolusioner merupakan hal yang esensial, sebagai instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme.

C. Demokrasi di Berbagai Negara

1. Demokrasi di Indonesia

a. Perkembangan demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu:

- 1) Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominan partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama akan menjadi kondor.
- 2) Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas.
- 3) Periode 1966-1998 masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini ialah pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/ MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktis demokrasi pada masa ini, nama pancasila digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat ini, sebab kenyatannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- 4) Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memberi nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam

DPR. Model demokrasi era reformasi ini kurang didasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Pengertian demokrasi menurut UUD 1945

1) Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)

a) Bidang politik dan konstitusional

Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

b) Bidang Ekonomi

(1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.

(2) Koperasi

(3) Pengakuan atas hak milik perseorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.

(4) Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.

2) Munsyi Persahi: The Rule of Law 9 Desember 1966)

Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

a) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultur dan pendidikan.

b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan, atau kekuatan lain apapun.

c) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

3) Simposium Hak-hak asasi manusia (Juni 1967)

a) Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.

b) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.

c) Perlunya untuk membina perkembangan ekonomi secara cepat.

c. Demokrasi pasca reformasi

Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, baik penyelenggaraan maupun pemerintahan. Atau disebut juga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, prinsip demokrasi juga terdapat pada sila ke-4 yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

UUD 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. UUD 1945 hasil amandemen dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat 1).

Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif (pasal 4-16), legislatif (pasal 19-22), dan yudikatif (pasal 24 UUD 1945).

2. Demokrasi di Amerika Serikat

a. Hakikat demokrasi di AS

Jika dilihat praktik demokrasi di Amerika Serikat, sedikit banyak tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini telah menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam praktik kenegaraannya. Semua hal yang berkaitan dengan kenegaraan telah diatur dengan rinci dalam konstitusinya. Di samping itu, lembaga-lembaga negara yang ada pun menjalankan tugas

dengan mekanisme *check and balances* yang tinggi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Tiga lembaga pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, secara terpisah antara satu dengan yang lain masing-masing memiliki kekuasaan untuk mengimbangi di antara ketiga lembaga tersebut. Mekanisme *check and balances* yang terutama ditujukan bagi lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan tertinggi (HoR) yang diimbangi oleh Senat yang dipilih oleh lembaga legislatif negara-negara bagian merupakan suatu cara untuk membagi kekuasaan pemerintah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Di samping itu, jumlah partai politik di Amerika Serikat yang ikut dalam pemilu memang hanya dua yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, namun selain itu banyak kelompok kepentingan yang berkembang dalam masyarakat seperti *Grand Old Party Political Action Committee* (GOPAC), *Public Opinion Strategies* dan banyak lagi yang lainnya. Hal ini tidak mengherankan karena tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik lebih banyak disalurkan dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan melalui forum diskusi.

b. Prinsip demokrasi AS

Jika dilihat lagi lebih mendalam, prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan umum yang demokratis,
- 2) Sistem peradilan yang independen,
- 3) Kekuasaan lembaga kepresidenan,
- 4) Peran media yang bebas,
- 5) Peran kelompok-kelompok kepentingan
- 6) Melindungi hak-hak minoritas,
- 7) Kontrol sipil atas militer,

c. Ciri-ciri demokrasi di AS

- 1) Warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan.
- 2) Agama berbaur dengan kebiasaan bangsa.
- 3) Aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup.

- 4) Yang kuat yang menjadi pemimpin.
- 5) Individu-lais sangat kuat.

3. Demokrasi di Australia

a. Perkembangan praktek demokrasi beserta dampaknya

- 1) Dalam bidang politik terjadi perkembangan pemerintahan demokratis, hal ini terjadi saat koloni-koloni diberi kesempatan untuk mendirikan pemerintahannya sendiri.
- 2) Pada bidang sosial, terjadi perkembangan demokrasi dilihat dari adanya sistem penggajian buruh yang lebih baik.
- 3) Dalam bidang pendidikan, yaitu dilihat dari diselenggarakannya pendidikan nasional bagi seluruh rakyat di seluruh koloni Australia.
- 4) Dalam bidang agama, yaitu dilihat dari adanya kebebasan beragama bagi seluruh rakyat di koloni Australia.

b. Faktor pendukung munculnya demokrasi di Australia

- 1) Pengaruh pemerintahan negara induk sebagai pendorong perkembangan demokrasi Australia
- 2) Perubahan pemikiran masyarakat di koloni sebagai pendorong perkembangan menuju pemerintahan demokrasi di Australia
- 3) Adanya keinginan para golongan imigran bebas untuk memperoleh kesejahteraan hidup di tanah koloni.

c. Pembentukan legislatif *council*

Legislatif *council* belum mempunyai wewenang menghentikan kemauan gubernur, badan ini hanya berfungsi sebagai badan penasehat belaka. Namun betapapun demikian, pembentukan *legislative council* tersebut merupakan satu langkah maju. Dengan dibentuk *legislative council* ini telah dimulai langkah menuju perjalanan jauh dalam rangka menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang gubernur. Sekarang gubernur harus bekerja bersama badan kecil yang secara konstitusional mempunyai kewenangan sebagai badan penasehat dan mampu membawa gubernur merasakan perasaan umum. Undang-undang tahun 1823 juga menyebutkan tentang pembentukan mahkamah agung yang di

pimpin oleh seorang hakim agung untuk pertama kali jabatan itu di duduki oleh sir Francis Forbes. Pada tahun 1850 pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang baru yang di sebut *Australian colonies government act* yang berisi:

- 1) Victoria dipisahkan dari *New South Wales*
- 2) Semua koloni di Australia berhak membuka *legislative council* kecuali Australia Barat.
- 3) Tiap koloni berhak menyusun pemerintahan sesuai dengan kemauan masing-masing kemudian di sampaikan kepada parlemen inggris untuk di undangkan.

Bagi koloni-koloni di Australia, undang-undang ini penting sekali artinya, terutama di lihat dari sudut pandang pemerintahan. Dengan undang-undang ini berarti pemerintah Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni hak untuk mrnyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintah Inggris tinggal menyetujuinya, hal lain yang perlu di perhatikan dalam undang-undang ini adalah bahwa Pemerintah Inggris memberi hak menyusun pemerintahan sendiri itu kepada setiap koloni itu secara terpisah sehingga masing-masing koloni dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan koloni lain.

d. Masa pemerintahan sendiri secara terpisah

Di lihat dari satu sisi yaitu tuntutan penduduk koloni-koloni di Australia untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi, *Australian colonies government act* memiliki nilai yang sangat positif, undang-undang ini memberi kebebasan kepada setiap koloni untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing-masing, setiap koloni berhak memilih perwakilan yang mereka kehendaki menetapkan batas-batas kewenangan dan kekuasaan gubernur, menetapkan jenis pajak, serta mengatur sendiri pengaturan uangnya. Koloni-koloni di Australia bersiap mengatur dan melaksanakan pemerintahan sendiri untuk kemudian melaporkannya kepada parlemen Inggris untuk di undangkan.

Dari sisi lain yaitu dari sisi keutuhan dan integrasi Australia, *Australian colonies government act* ini justru membuka peluang untuk

timbulnya perpecahan di antara koloni itu, karena setiap koloni diberi kebebasan mengatur diri sendiri sesuai kehendak masing-masing. Setelah merasa cukup persiapan untuk melakukan pemerintahan sendiri sesuai dengan tawaran undang-undang tahun 1950 itu maka *New South Wales* mulai melaksanakannya sejak tahun 1855, kemudian Victoria 1856, Tasmania 1856, Australia selatan 1856, Queensland yang semula merupakan bagian dari New South Wales, baru terpisah pada tahun 1859 dan sejak itu memulai pemerintahannya sendiri. Demikianlah dalam waktu 10 tahun dari di keluarkannya *Australian colonies government act* itu telah lahir 5 koloni-koloni yang lain yang masing-masing memiliki otonomi serta terpisah dari koloni yang lain. Pengalaman-pengalaman dari koloni di masa lalu tentunya juga ikut menyatu dengan pilihan pemerintahan masing-masing. Setiap koloni nampaknya lebih mementingkan urusan di dalam koloninya daripada memikirkan hubungan dengan koloni yang lain. Australia barat yang memiliki kekhasan pada masa lalunya baru memulai pemerintahan sendiri pada tahun 1890.

DAFTAR PUSTAKA

- Kinloch. 2005. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ritzer, George. 2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2015. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendektan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan. 2012. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Rajawali Pers.